Pemerintah
Provinsi Lampung
2026

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
16. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20)diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026 terdiri dari;
a. Pendahuluan;
b. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
c. Kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. Prioritas dan sasaran pembangunan;
e. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f. Penutup.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan dua pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3B

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2026.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2026;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026; dan

c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2026.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 07 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 07 - 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 14

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN……I-1

1.1 Latar Belakang……I-1

1.2 Tujuan……I-4

1.3 Dasar Hukum……I-4

1.4 Sistematika Penulisan……I-8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I-2026……I-1

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2026 ……II-1

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan……II-1

2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026……II-36

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah……II-69

2.1.4. Aspek Geografi dan Demografi……II-70

2.1.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat……II-75

2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah……II-82

2.1.7. Aspek Pelayanan Umum……II-89

2.1.8. Capaian Indikator Kinerja Kunci……II-94

2.1.9. Capaian Program Unggulan Provinsi Lampung……II-115

2.1.10. Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)……II-143

2.1.11. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)……II-144

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2026……II-145

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH……III-1

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah……III-1

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan I-2026……III-1

3.1.2 Kerangka Ekonomi Daerah s.d Awal Tahun 2026, Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2026……III-36

3.1.3 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2026……III-43

3.1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2026……III-45

3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah……III-46

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2026……..III-49

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2026……..III-57

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2026……III-62

3.2.4 Kebijakan Penerimaan Pinjaman daerah Perubahan Tahun 2026……..III-66

3.2.4 Kebijakan Penerimaan Pinjaman daerah Perubahan Tahun 2026……..III-66

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN……..IV-1

4.1 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026……..IV-1

4.2 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 ……IV-27

4.2.1 Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026……IV-43

4.2.2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2026……IV-57

4.2.3 Program Unggulan Daerah……IV-58

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, Prioritas Nasional 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029……..IV-76

4.4 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)……..IV-109

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH……V-1

5.1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2026……V-1

5.2 Program Prioritas Berdasarkan SPM……..V-41

5.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026……..V-53

5.4 Dukungan Program Unggulan melalui pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Unggulan Tahun 2026……..V-58

BAB VI PENUTUP……VI-1

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman kepada RKPD. Hal ini diperlukan guna menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Lebih lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sekaligus tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Diharapkan tahun 2026 bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan memperkuat

sinergi antar stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026, merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika yang berkembang pada tingkat global, nasional, maupun regional. Ketidakpastian geopolitik dunia yang ditandai dengan berlanjutnya konflik Rusia–Ukraina, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim telah memengaruhi stabilitas perekonomian global melalui gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional dan pada

akhirnya memengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Di samping pengaruh faktor eksternal tersebut, Perubahan RKPD tahun 2026 dilakukan karena:

1. Penyesuaian Target saasran Pembangunan yang telah tercapai
2. Penyesuaian indikator makro ekonomi berdasarkan asusmsi realisasi Triwulan I tahun 2026
3. Penyesuaian Program, Kegiatan yang memiliki capaian rendah/sudah terlampu tinggi sehingga dilakukan pergeseran anggaran dantar Program, Kegiatan, Sub kegiatan untuk efektifitas dan efisiensi belanja daerah
4. Penggunaan SILPA tahun anggaran untuk pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, Perubahan RKPD Tahun 2026 juga memuat penyesuaian terhadap komponen belanja daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual pembangunan dan dinamika pelaksanaan APBD. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja daerah melalui realokasi anggaran pada program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun sebagai instrumen perencanaan tahunan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis serta responsif terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan dan kondisi keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan pada sisa tahun anggaran dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat

dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional terutama terkait substansi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Selain itu juga dalam rangka dukungan terhadap kebijakan nasional yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2026, hal tersebut sesuai dengan Pasal 343 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2026 yang akan disusun;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan APBD T.A 2026;
- Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;
- Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185).
19. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tapehun 2026;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026;
34. Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.2. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.3. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.4. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I-2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I-2026.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan samapai denga Triwulan I-2026 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2026.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d. Triwulan I-2026, Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d. Triwulan I-2026, Kerangka Ekonomi Daerah s.d. akhir Tahun 2026 perkembangan terkini dan prospek ekonomi nasional dan Daerah Tahun 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan s.d. akhir tahun 2026.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan yang diselaraskan dengan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2026.

Menjelaskan penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 dengan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2026.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029.

Menjelaskan penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 dengan kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, indikator dan target program, kegiatan, sub kegiatan dan lokasi serta pagu berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah terhadap prioritas Nasional.

BAB VI PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang pokok-pokok substansi Perubahan RKPD tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I-2026



BAB II
EVALUASI HASIL RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I-2026

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2026

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Penetapan indikator makro pembangunan daerah dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga agar target-target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu dan terukur, dilakukan evaluasi secara triwulanan. Evaluasi ini penting untuk menilai perkembangan capaian indikator, memahami pola pencapaian dari waktu ke waktu, serta memproyeksikan kemungkinan tercapainya target di akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat merespon lebih cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Dalam rangka percepatan pembangunan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dilakukan upaya-upaya antara lain melalui upaya peningkatan produktivitas seluruh sektor. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pendekatan pembangunan melalui perencanaan program yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Hal ini penting agar pelaksanaan program dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2026 memungkinkan dilakukannya perubahan kebijakan dengan mempertimbangkan situasi aktual, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang. Penyesuaian tersebut dapat mencakup pergeseran, penundaaan atau penambahan kegiatan, maupun perubahan alokasi anggaran, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan daya ungkit program terhadap pembangunan daerah.

Sejalan dengan itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan I Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut berguna untuk menilai efektivitas Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan anggaran serta seberapa jauh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan pembangunan disisa tahun anggaran, guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan secara optimal.

Berikut kami sajikan data target sasaran makro pembangunan tahun 2026 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2026	Sasaran pada APBD 2026	Capaian s/d Tw 1 2026	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,7	5,2–5,7	5,58	
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	54,0-56,0	54,0 – 56,0	55,01*	*)Capaian Tahun 2025
3	Kontribus PDRB Provinsi (Persen)	2,2	2,2	2,146	*)Capaian TW I Tahun 2026
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 - 9,90	9,90-8,90	9,66	
5	Indeks Gini	0,274 - 0,290	0,290-0,274	0,287*	*)Capaian Gini Ratio September 2025
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,55	0,55	0,53*	*)Capaian Tahun 2023
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,80-74,4	73,8-74,4	73,98*	*)Capaian Tahun 2025
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	62,41–64,03	62,41 – 64,03	55,30*	*)Capaian sementara Tahun 2025

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2026	Sasaran pada APBD 2026	Capaian s/d Tw 1 2026	Keterangan
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,2	N A	73,81*	*)Capaian Tahun 2025
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51 - 4,05	3,51 - 4,05	3,95*	*)Capaian Bulan Februari 2026

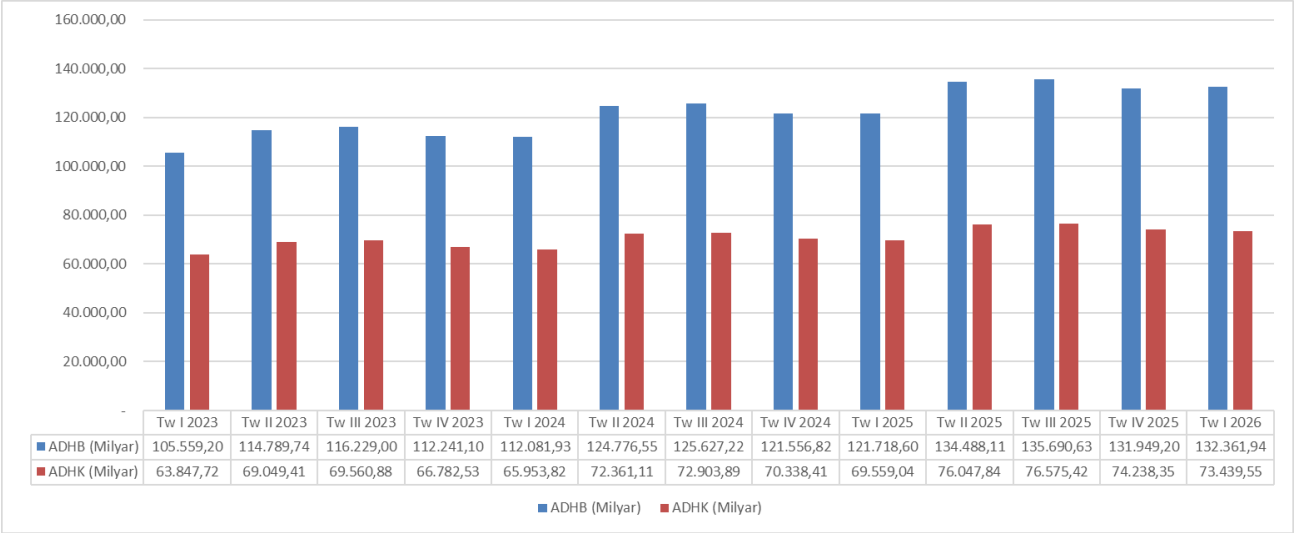
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah 2026

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat tergambar beberapa hal sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Triwulanan Provinsi Lampung periode 2023 hingga Triwulan I 2026 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, di mana puncak kinerja ekonomi secara konsisten terjadi pada Triwulan II dan Triwulan III setiap tahunnya baik pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mengindikasikan kuatnya pengaruh siklus panen sektor pertanian. Meskipun terdapat penurunan produksi pada setiap Triwulan IV 2023 dan Triwulan I 2024 akibat pergeseran musim tanam dan normalisasi konsumsi, basis perekonomian Lampung menunjukkan resiliensi yang solid dengan tren *baseline* yang terus meningkat secara tahunan (*year-on-year*), tercermin dari nilai ADHB Triwulan I 2026 sebesar 132.361,94 milyar rupiah yang jauh lebih tinggi dibandingkan posisi awal Triwulan I 2023 sebesar 105.559,20 milyar rupiah.



	Tw I 2023	Tw II 2023	Tw III 2023	Tw IV 2023	Tw I 2024	Tw II 2024	Tw III 2024	Tw IV 2024	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026
ADHB (Milyar)	105.559,20	114.789,74	116.229,00	112.241,10	112.081,93	124.776,55	125.627,22	121.556,82	121.718,60	134.488,11	135.690,63	131.949,20	132.361,94
ADHK (Milyar)	63.847,72	69.049,41	69.560,88	66.782,53	65.953,82	72.361,11	72.903,89	70.338,41	69.559,04	76.047,84	76.575,42	74.238,35	73.439,55

Sumber data : BPS dan Bappeda diolah, 2026

Gambar 2.1.1 Nilai PDRB Provinsi Lampung Triwulanan (Milyar Rupiah)

Berdasarkan data struktur PDRB triwulanan periode 2023 hingga triwulan I 2026, perekonomian wilayah ini masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar (berkisar antara 23,73% hingga 29,68%) dengan pola fluktuasi musiman yang cenderung memuncak pada triwulan II setiap tahunnya, disusul oleh sektor Industri Pengolahan (17,6%–19,83%) dan Perdagangan Besar (13,61%–15,03%) sebagai penopang utama lainnya.

Tabel 2.1.1 Distribusi PDRB (ADHB) berdasarkan Lapangan Usaha
Provinsi Lampung Triwulanan

Lapangan Usaha (Triwulanan)	2023				2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,95	29,68	28,29	24,18	23,73	29,14	27,44	24,55	24,54	28,97	28,83	24,98	25,58
B. Pertambangan dan Penggalian	5,42	4,75	5,22	5,64	5,69	4,85	4,85	5,12	5,03	4,53	4,5	4,61	4,83
C. Industri Pengolahan	18,16	17,6	18,29	18,02	18,95	17,63	19,43	19,6	19,4	18,15	19,11	19,83	18,97
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,13	0,13	0,12	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1	0,09	0,09	0,1	0,09
E. Pengadaan Air	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,1	0,1	0,09	0,09	0,1	0,09
F. Konstruksi	9,81	9,08	9,67	10,9	9,92	9,11	9,1	9,78	9,27	9,01	9,02	9,89	9,23
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	14,03	13,71	13,61	14,55	14,66	13,68	13,96	14,72	14,94	14,23	13,89	14,45	15,03
H. Transportasi dan Pergudangan	7,14	6,97	6,92	7,64	7,63	7,49	7,17	7,42	7,75	7,54	7,04	7,58	7,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	1,59	1,59	1,66	1,62	1,55	1,6	1,68	1,65	1,59	1,62	1,72	1,74
J. Informasi dan Komunikasi	3,96	3,82	3,76	3,98	4,1	3,73	3,79	3,99	4,03	3,58	3,65	3,77	3,84
K. Jasa Keuangan	2,07	1,93	2,02	2,06	2,1	1,97	1,97	1,94	2,04	1,89	1,92	2,13	2,13
L. Real Estate	2,62	2,52	2,56	2,74	2,74	2,5	2,58	2,7	2,77	2,46	2,48	2,72	2,63
M,N. Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	2,97	3,19	2,84	3,12	3,37	3,22	2,86	2,95	3,19	3,02	2,85	3,02	3,11
P. Jasa Pendidikan	2,86	2,75	2,76	2,91	3,01	2,7	2,75	2,86	2,88	2,61	2,65	2,71	2,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,94	0,96	1,04	0,99	0,96	1	1,05	1,01	0,91	0,97	0,97	0,97
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,05	1,08	1,12	1,17	1,13	1,11	1,14	1,26	1,16	1,17	1,14	1,25	1,15
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : BPS Lampung, 2026

Struktur PDRB Pengeluaran triwulanan periode 2023 hingga triwulan I 2026 menunjukkan bahwa perekonomian wilayah ini sangat ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi, dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebagai motor utama yang secara konsisten berkontribusi di atas 60% (berkisar antara 60,19% hingga 65,65%) serta didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi) yang stabil di kisaran 29,55% hingga 34,71%. Tingginya ketergantungan pada konsumsi rumah tangga mengindikasikan resiliensi ekonomi domestik yang kuat namun rentan terhadap guncangan daya beli, sehingga intervensi kebijakan ke depan harus difokuskan pada penguatan iklim investasi investasi PMTB untuk mendorong industrialisasi, substitusi impor pada bahan baku lokal, serta diversifikasi produk ekspor guna memperbaiki neraca perdagangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas serta berkelanjutan.

Tabel 2.1.2. Distribusi PDRB (ADHB) berdasarkan Pengeluaran
Provinsi Lampung Triwulanan

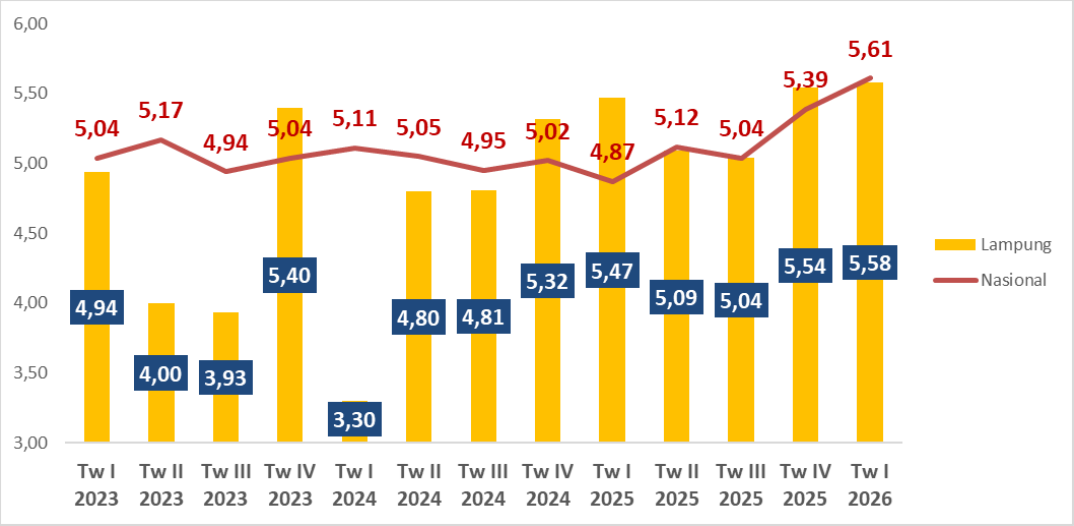
Komponen PDRB (Pengeluaran)	2023				2024				2025				2026
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,45	61,84	60,19	64,07	65,65	62,50	60,92	63,97	64,78	62,37	60,43	63,08	64,05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,70	1,65	1,64	1,90	1,95	1,76	1,70	1,90	1,87	1,77	1,69	1,88	1,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,05	6,32	5,89	9,08	5,70	6,09	5,74	8,71	5,26	5,66	5,73	8,30	5,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,97	30,52	31,23	34,71	32,23	29,55	29,98	32,79	30,84	30,07	30,27	32,80	30,73
Perubahan Inventori	0,68	0,65	-0,16	-0,15	0,48	0,64	-0,64	-1,40	0,90	0,81	0,53	-0,80	0,86
Ekspor	50,72	48,98	53,15	54,34	52,88	55,41	58,89	55,37	55,26	54,04	58,29	54,30	52,28
Impor	54,58	49,96	51,96	63,95	58,88	55,95	56,57	61,33	58,92	54,71	56,94	59,56	55,57
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Lampung, 2026

Pertumbuhan ekonomi merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berdaya saing. Selain mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan yang kuat juga menjadi prasyarat bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan secara lebih luas dan merata. Oleh karena itu, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi triwulanan mengalami fluktuasi tajam pada periode 2023 hingga awal 2024 sebelum akhirnya menunjukkan tren pemulihan yang solid dan stabil menuju triwulan I 2026. Meskipun sempat mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam hingga menyentuh titik terendah sebesar 3,30% pada triwulan I 2024 yang memperlebar jarak dengan pertumbuhan nasional di angka 5,11%; Provinsi Lampung berhasil membalikkan arah kebijakan makroekonominya secara impresif sejak pertengahan tahun 2024, bahkan berhasil melampaui performa rata-rata nasional seperti di triwulan I 2025 (5,47% berbanding 4,87% nasional). Akselerasi pertumbuhan berkelanjutan hingga mencapai posisi 5,58% pada triwulan I 2026 ini harus terus dijaga momentumnya melalui intervensi kebijakan sektoral yang adaptif, penguatan stimulus pada komoditas unggulan daerah, serta sinkronisasi program pusat-daerah

Gambar 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional Triwulanan



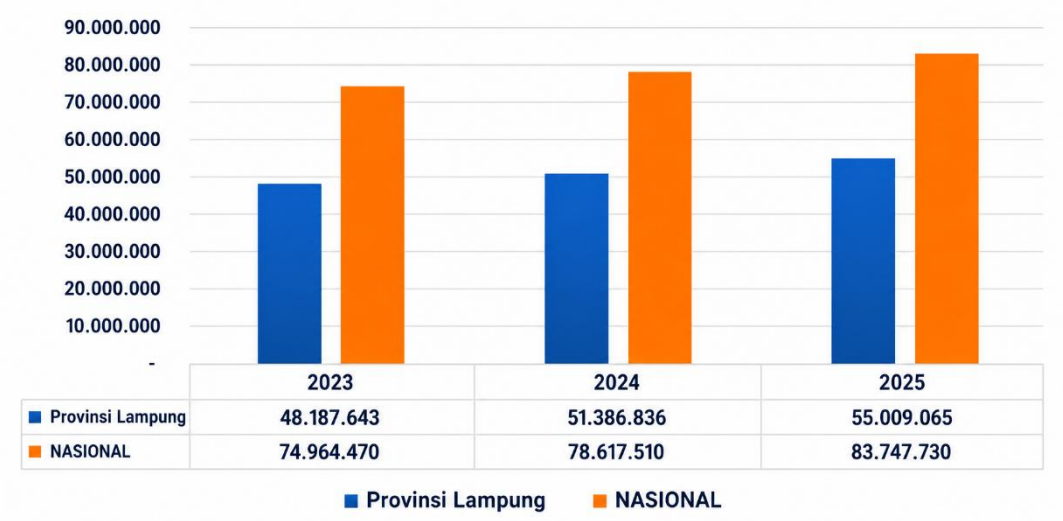
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Pusdatin Bappeda diolah

Secara keseluruhan, capaian pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Provinsi Lampung tetap terjaga dengan baik. Kinerja tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum di suatu wilayah. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk Lampung pada periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp48,19 juta menjadi Rp55,01 juta pada tahun 2025. Catatan statistik pada periode pengamatan tersebut menunjukkan bahwa PDRB per Kapita Lampung masih dibawah rata-rata nasional.

Gambar 2.1.5 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023-2025



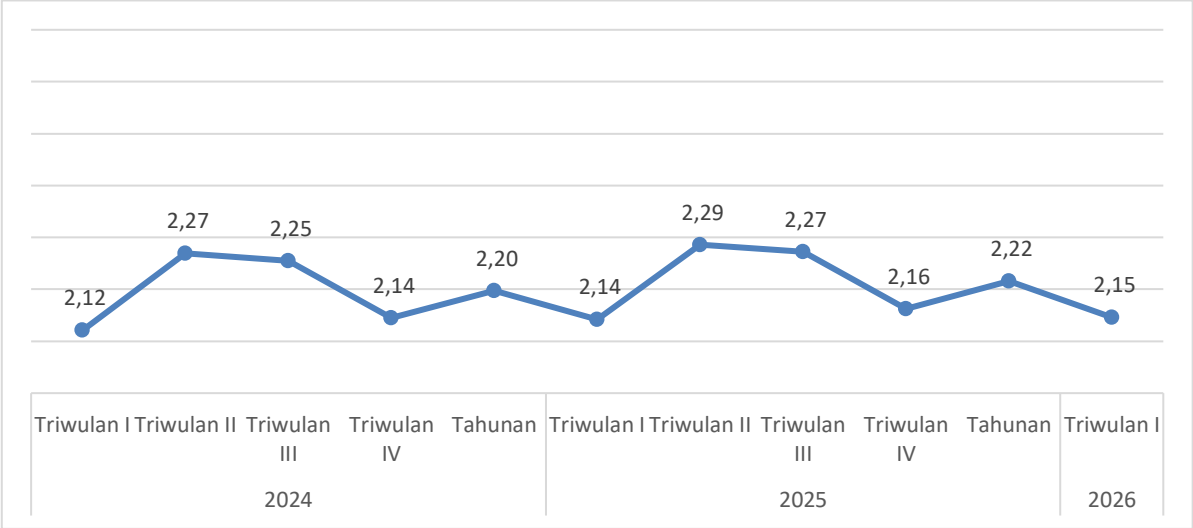
	2023	2024	2025
Provinsi Lampung	48.187.643	51.386.836	55.009.065
NASIONAL	74.964.470	78.617.510	83.747.730

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

3. Kontribus PDRB Provinsi (Persen)

Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap perekonomian nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur peran daerah dalam struktur ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Besaran kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap PDRB Nasional pada TW-I 2026 sebesar 2,15 persen. Dalam periode 2024-2026, kontribusi PDRB Provinsi Lampung menunjukkan pergerakan yang relatif konstan, berkisar pada angka 2,12-2,29 persen, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi aktual maupun target pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut disajikan data capaian persentase Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap PDRB Nasional.

Grafik 2.*6.* Kontribusi PDRB Lampung terhadap Nasional



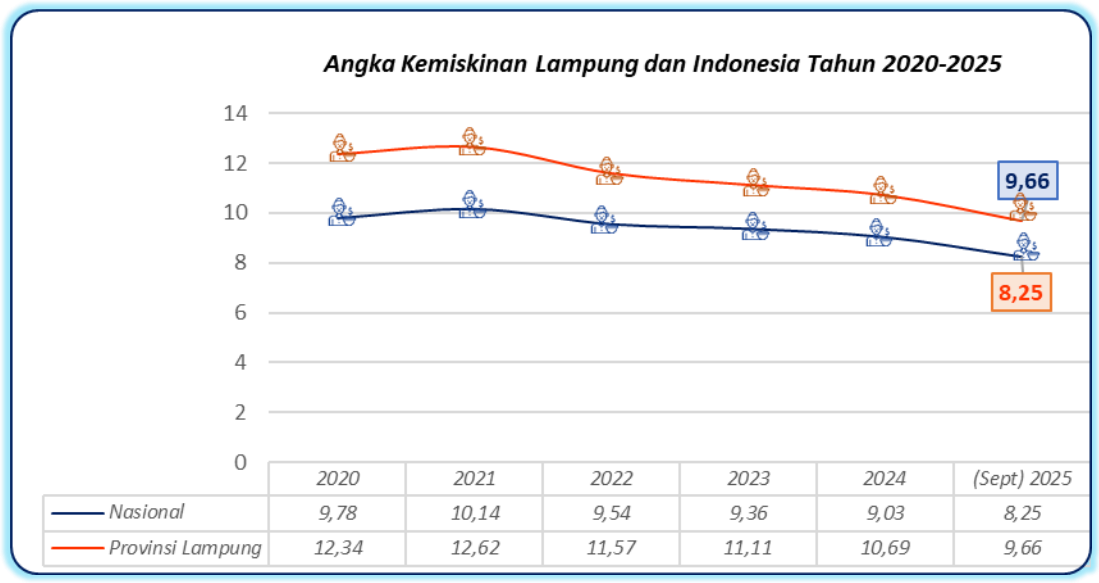
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2026, data diolah

4. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung yang digunakan adalah Capaian Bulan September 2025, berikut capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2025

Pada Tahun 2025 (September 2025), persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebesar 9,66 persen. Secara tren jangka menengah, kondisi ini menunjukkan perbaikan signifikan, ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 12,34 persen pada tahun 2020 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Hal tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung. Meskipun mengalami penurunan, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung masih berada di atas angka nasional, yang tercatat sebesar 8,25 persen. Selisih sekitar 1,41 persen, hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung masih relatif lebih besar dibandingkan rata-rata nasional dan

memerlukan penguatan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Kemudian untuk jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung di tahun 2025 tercatat mencapai 860,13 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 939,30 ribu jiwa. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 79,17 ribu jiwa, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara riil.



	2020	2021	2022	2023	2024	(Sept) 2025
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03	8,25
Provinsi Lampung	12,34	12,62	11,57	11,11	10,69	9,66

Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS Indonesia, 2026

Gambar 2.1 Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2020-2025

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Jika dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan menurun sebanyak 10,42 ribu orang (dari 239,51 ribu orang pada September 2024 menjadi 229,09 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan juga menurun sebanyak 68,76 ribu orang (dari 699,80 ribu orang pada September 2024 menjadi 631,04 ribu orang pada September 2025).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,07 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 26,81 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,49 persen menjadi 7,37 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,32 persen menjadi 10,88 persen.

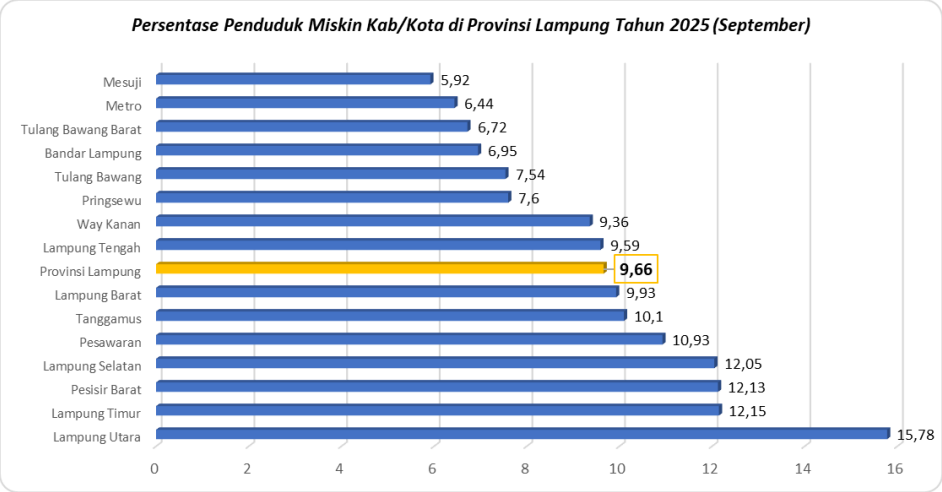
persen.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2020-2025 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KOTA	259.28	236.48	239.11	232.96	239,51	229,09
DESA	831.86	770.54	756.48	737.71	699,80	631,04
KOTA+DESA	1091,14	1007.02	995.59	970.67	939,30	860,13

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota, empat (4) Kabupaten terbanyak penduduk miskin adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Utara, walaupun dengan persentase penduduk miskin terbesar namun dari segi jumlah penduduk miskin, menempati urutan keempat setelah Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

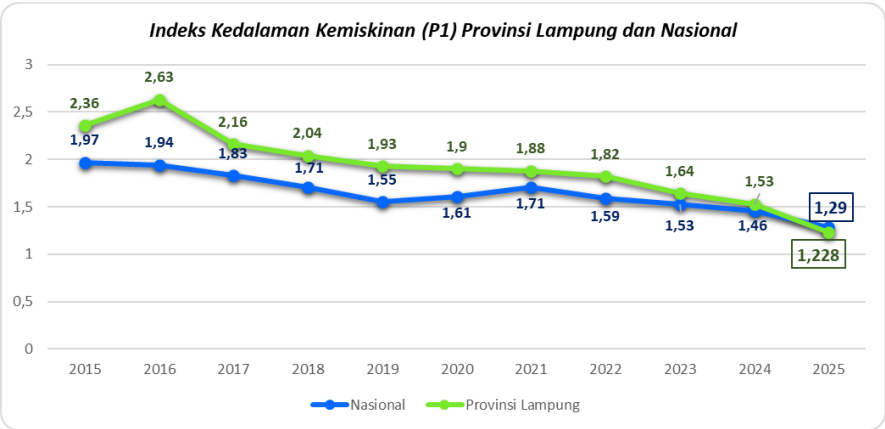
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

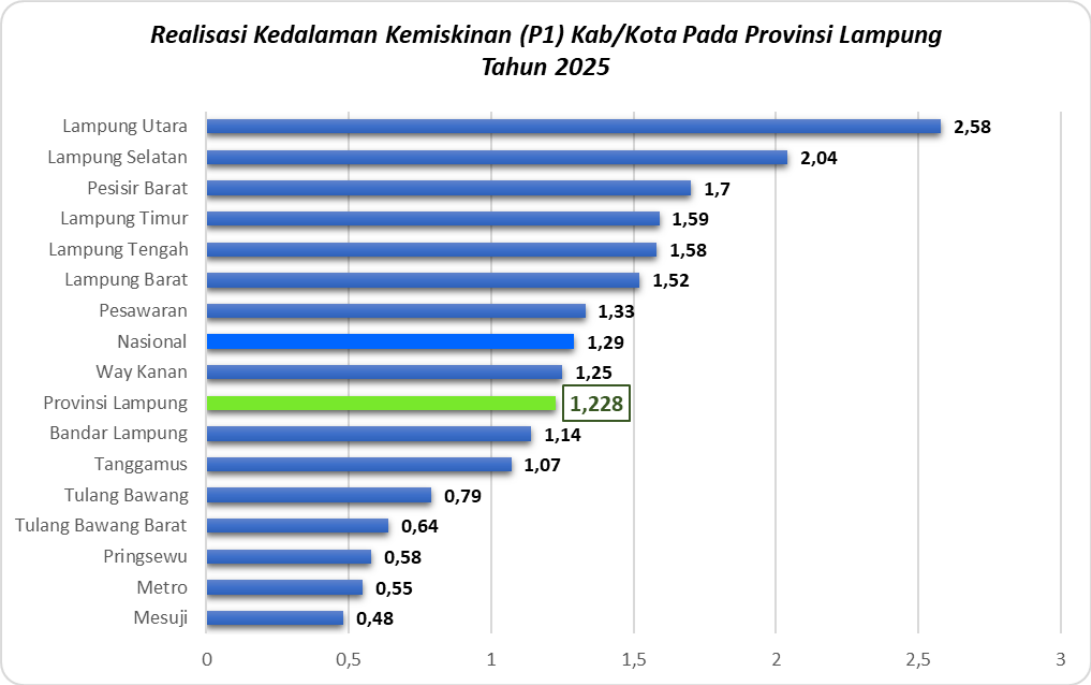
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,11 di tahun 2020 menjadi 1,74 pada Tahun 2024, namun kembali menurun menjadi 1,228 di Tahun 2025. Penurunan P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Peningkatan Nilai P1 di Provinsi Lampung seharusnya diwaspadai karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin jauh atau semakin dalam dari garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung berada di bawah Indeks P1 Nasional yang pada November 2025 berada pada angka 1,29 (menurun dari 1,53 menjadi 1,228).

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Indikator Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 menunjukkan masih adanya disparitas tingkat keparahan kemiskinan antarwilayah. Nilai P1 Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,228, yang menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa kabupaten memiliki nilai P1 di atas rata-rata provinsi, seperti Lampung Utara (2,58), Lampung Selatan (2,04), dan Pesisir Barat (1,70), yang menunjukkan kondisi kemiskinan lebih dalam. Sementara itu, daerah seperti Mesuji (0,48), Metro (0,55), Pringsewu (0,58), serta Tulang Bawang Barat (0,64) memiliki nilai P1 relatif rendah, yang mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih kecil.



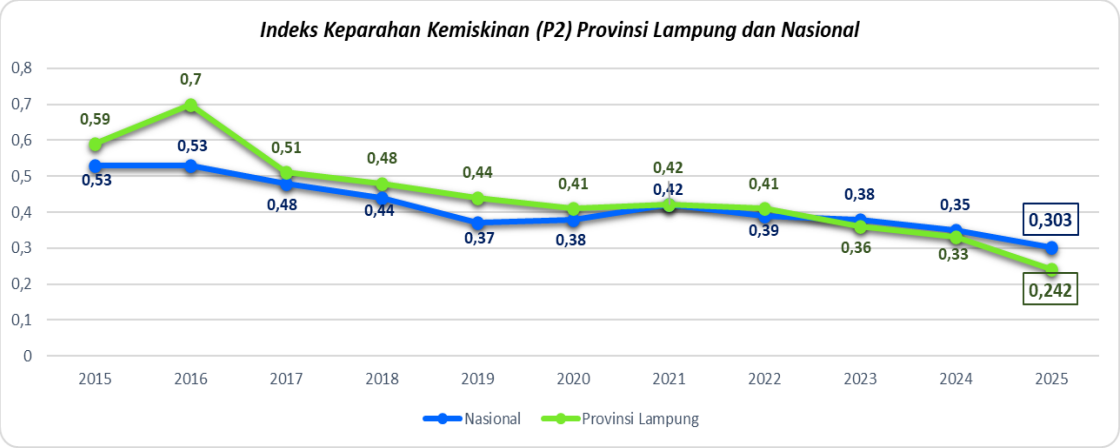
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2.4 Realisasi Kedalaman Kemiskinan Tahun 2025

- **Indeks Keparahan Kemiskinan**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. *Trend* Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun

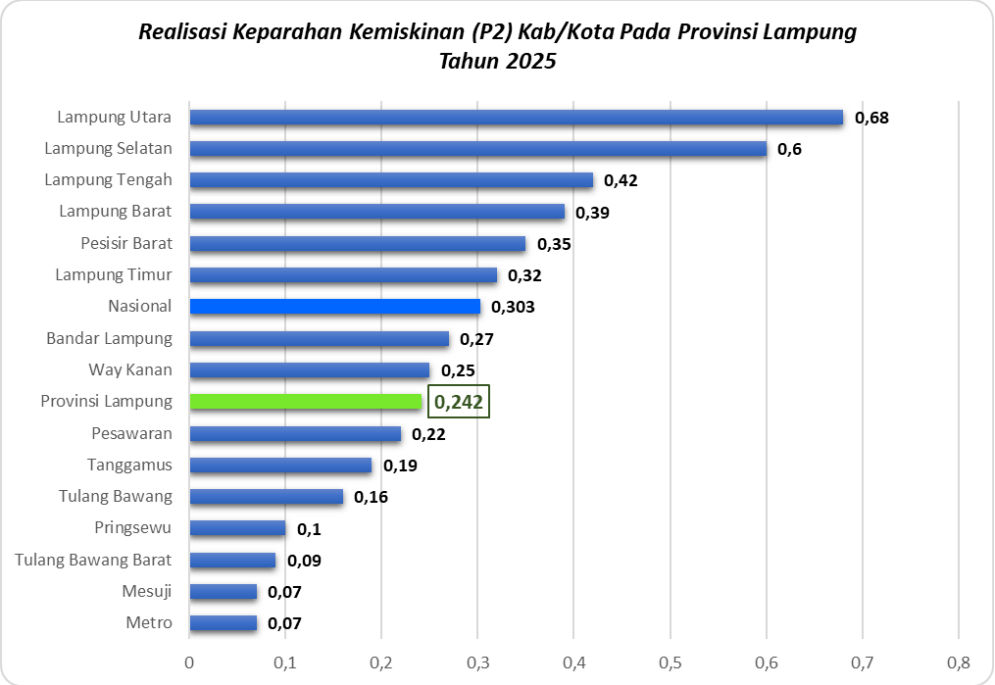
cenderung menurun dari 0,57 Tahun 2020 menjadi 0,242 di September 2025. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,242, turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,396. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di bawah Indeks P2 Nasional yang pada September 2025 berada pada angka 0,303, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,350.



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung

Beberapa daerah memiliki nilai P2 jauh di atas rata-rata provinsi, yaitu Lampung Utara (0,68) dan Lampung Selatan (0,60), yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah tersebut tidak hanya berada jauh di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mengalami kesenjangan pengeluaran yang cukup tinggi antarindividu miskin. Lampung Tengah (0,42), Lampung Barat (0,39), dan Pesisir Barat (0,35) juga berada di atas atau mendekati rata-rata provinsi, yang menandakan tingkat keparahan kemiskinan masih relatif tinggi. Sebaliknya, beberapa kabupaten/kota menunjukkan nilai P2 yang relatif rendah, seperti Metro (0,07), Mesuji (0,07), Tulang Bawang Barat (0,09), dan Pringsewu (0,10). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat penduduk miskin, tingkat kesenjangan pengeluaran di antara mereka relatif lebih kecil, sehingga intervensi ekonomi berpotensi lebih efektif dalam mendorong perbaikan kesejahteraan.



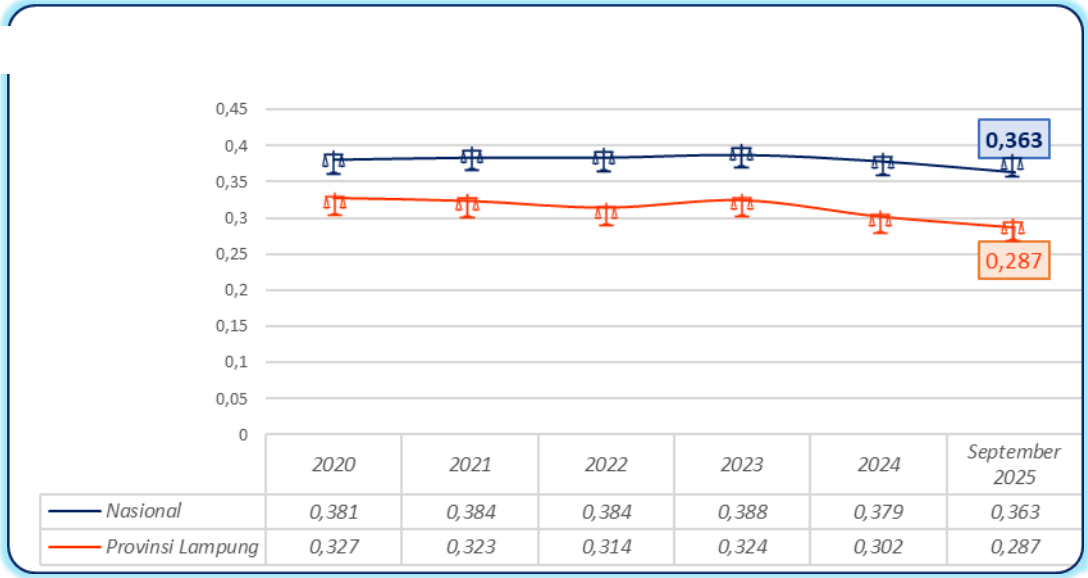
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2.6 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2025

5. Indeks Gini

Rasio Gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada Lorenz Curve, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan uniform distribution (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Rasio Gini umum digunakan untuk mengukur pemerataan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik pada skala negara, provinsi maupun kabupaten/kota. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati angka nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati angka satu.

Untuk capaian rasio gini yang digunakan adalah capaian Bulan September 2025. Berikut capaian Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2025



	2020	2021	2022	2023	2024	September 2025
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379	0,363
Provinsi Lampung	0,327	0,323	0,314	0,324	0,302	0,287

Sumber: BPS Indonesia, 2026 (diolah).

Gambar 2.7 Capaian Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2025

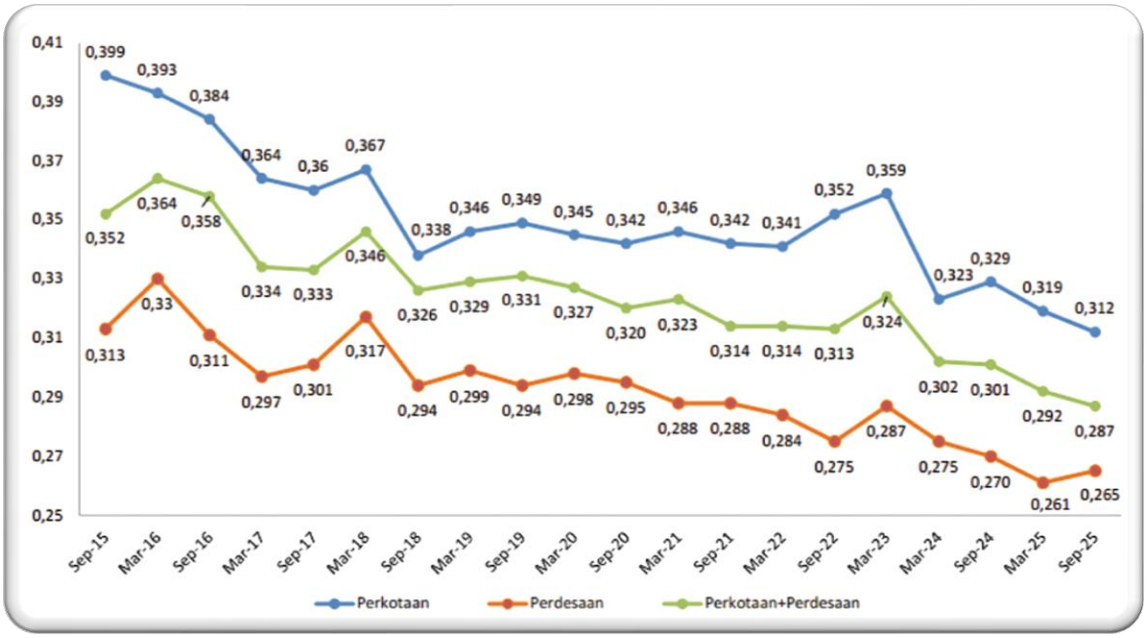
Capaian Rasio Gini Provinsi Lampung pada periode tahun 2020 hingga 2025, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,327 Tahun 2020 menjadi 0,287 pada September Tahun 2025, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,363). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah. Menurunnya Rasio Gini mencerminkan bahwa hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung semakin merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat diindikasikan oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, layanan dasar, dan program perlindungan sosial.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, ketimpangan di daerah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada September 2025, Rasio Gini perkotaan tercatat sebesar 0,312, menurun 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 (0,319) dan turun 0,017 poin dibandingkan September 2024 (0,329). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di wilayah perkotaan, yang kemungkinan didorong oleh membaiknya sektor perdagangan, jasa, dan industri

pengolahan yang menjadi penopang utama ekonomi kota. Sementara itu, Rasio Gini perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,265. Angka ini sedikit meningkat 0,004 poin dibandingkan Maret 2025 (0,261), namun masih lebih rendah 0,005 poin dibandingkan September 2024 (0,270). Secara umum, tingkat ketimpangan di perdesaan relatif lebih rendah dibandingkan perkotaan, yang mencerminkan struktur ekonomi perdesaan yang lebih homogen, terutama bertumpu pada sektor pertanian. Namun kenaikan tipis dibanding Maret 2025 perlu dicermati sebagai indikasi adanya potensi tekanan distribusi pendapatan di wilayah perdesaan. Secara keseluruhan, tren penurunan Rasio Gini hingga September 2025 menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah telah bergerak menuju pertumbuhan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dalam menjaga pemerataan hasil pembangunan.

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2.8 Capaian Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2025



Berdasarkan grafik diatas, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan, namun menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu. Sementara itu, wilayah perdesaan memperlihatkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dan penurunan yang lebih konsisten. Kondisi ini menunjukkan

bahwa distribusi pengeluaran masyarakat perdesaan semakin merata, didukung oleh penguatan sektor pertanian, kegiatan ekonomi lokal, serta program perlindungan sosial. Grafik juga memperlihatkan adanya kenaikan ketimpangan pada periode tertentu, terutama sekitar tahun 2019 dan 2023, yang mengindikasikan dampak guncangan ekonomi, termasuk pengaruh pandemi Covid-19. Namun demikian, tren kembali membaik pada periode setelahnya hingga 2025.

6. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) merupakan indikator baru yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2018 digunakan untuk menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi produktivitas individu dan negara, dengan mengukur modal manusia yang bisa diakumulasi seorang anak yang lahir pada hari ini, saat dia berusia 18 tahun nanti, serta melihat risiko kondisi kesehatan dan pendidikan yang terjadi di negara tempat dia hidup.

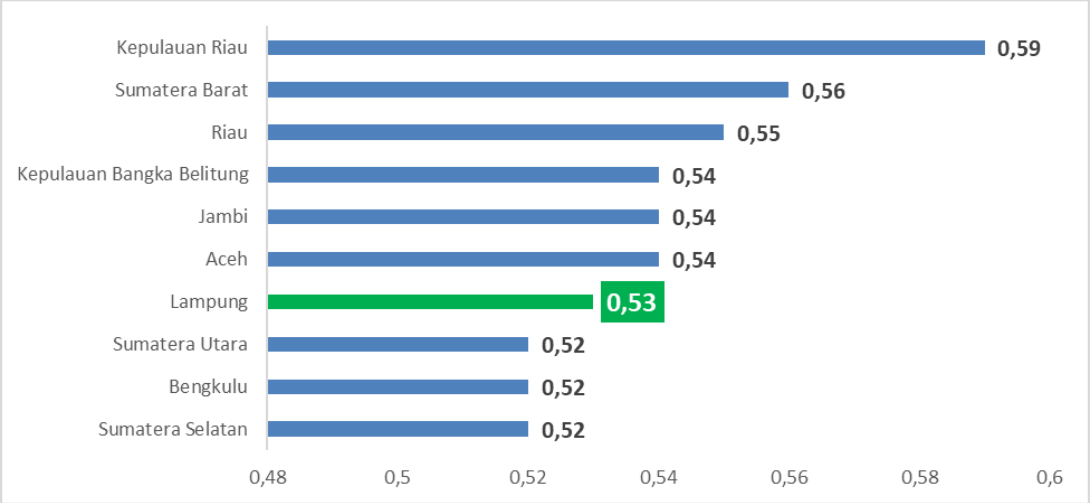
Berdasarkan penjelasan dari Bank Dunia, Indeks Modal Manusia ditampilkan dalam rentang nilai antara 0 dan 1, apabila nilai suatu negara mendekati angka 1, maka produktivitas pekerja generasi selanjutnya dipastikan sangat tinggi, didukung oleh lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan yang mumpuni.



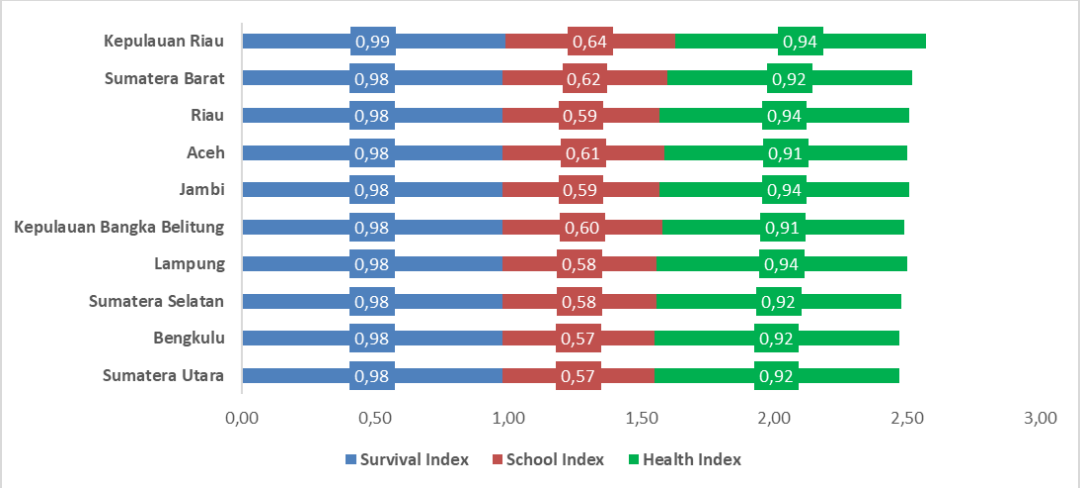
Sumber : Bappenas, 2025

Gambar xxx : Capaian IMM dan Komponennya Tahun 2023

Gambar 2.1.5 Indeks Modal Manusia Tahun 2023 di Pulau Sumatera



Gambar 2.1.5 Komponen Indeks Modal Manusia Tahun 2023 di Pulau Sumatera



Berdasarkan gambar diatas, capaian IMM Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53, berada pada peringkat ke-18 secara nasional dan sedikit di bawah rata-rata nasional (0,54). Terkait dengan capaian di atas, maka fokus intervensi program dan pendanaan Provinsi Lampung akan memprioritaskan pada strategi mempertahankan layanan kesehatan dan mendongkrak mutu pendidikan melalui kerja kolaboratif lintas sektor antara lain:

- Akselerasi Transformasi Pendidikan dengan cara mengoptimalkan program wajib belajar dan intervensi bantuan sosial pendidikan untuk mengamankan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 15 tahun penuh, Meningkatkan kompetensi guru dan ketersediaan sarana literasi/numerasi

guna mendongkrak capaian pembelajaran pada Asesmen Nasional agar mendekati target indeks nasional.

- Keberlanjutan Sektor Kesehatan dan Daya Dukung Lingkungan dengan meningkatkan kuaitas penanganan stunting sensitif dan spesifik secara konsisten demi menjaga tren positif prevalensi balita seha serta memperluas jaminan kesehatan semesta dan penguatan layanan rujukan guna menekan angka kematian usia produktif (15-60 tahun).

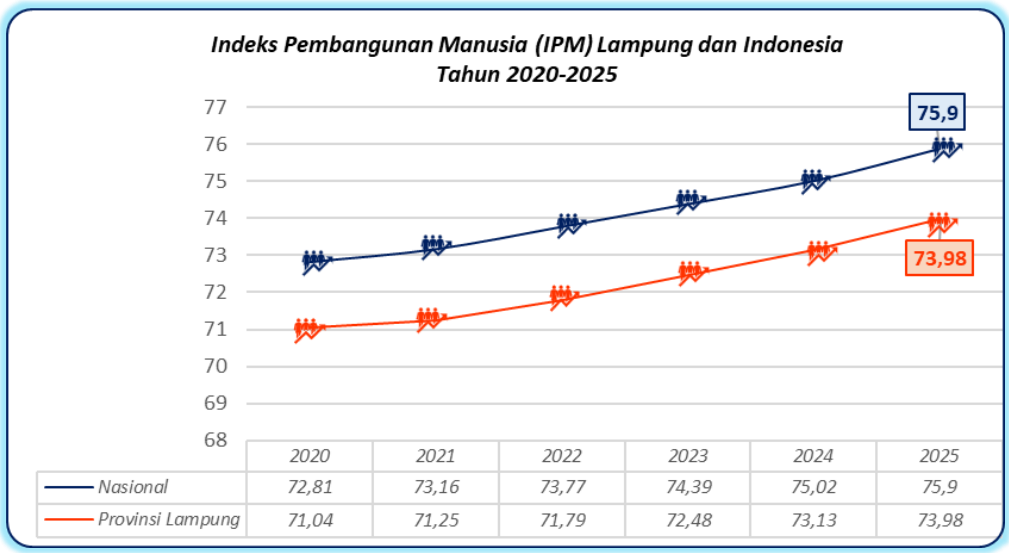
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dikarenakan capaian IPM Tahun 2026 belum rilis, sehingga masih menggunakan capaian di tahun sebelumnya. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2025 sebesar 73,98.

Grafik 2. 1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2026

Capaian nilai IPM Provinsi Lampung meningkat dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 73,98 pada tahun 2025, capaian tersebut masih dibawah capaian nasional pada Tahun 2025 yaitu sebesar 75,90. IPM Lampung tumbuh sebesar 2,94 poin dibandingkan tahun 2020 dan IPM Provinsi Lampung masuk dalam kategori "TINGGI" dengan nilai IPM 73,98. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian nasional, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, selisih IPM Lampung terhadap nasional sebesar 1,77 poin, dan pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi sekitar 1,92 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, laju perbaikan IPM Lampung relatif masih belum cukup cepat untuk menutup kesenjangan dengan tingkat nasional. Secara lebih rinci, kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Perbaikan IPM yang terjadi sejauh ini menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan intervensi yang lebih terfokus, khususnya pada wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat capaian lebih rendah.

Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39	74,71
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78	12,79
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36	8,61
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.982	10.038	10.336	10.769	11.258	11.683
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		**71,04**	**71,25**	**71,79**	**72,48**	**73,13**	**73,98**

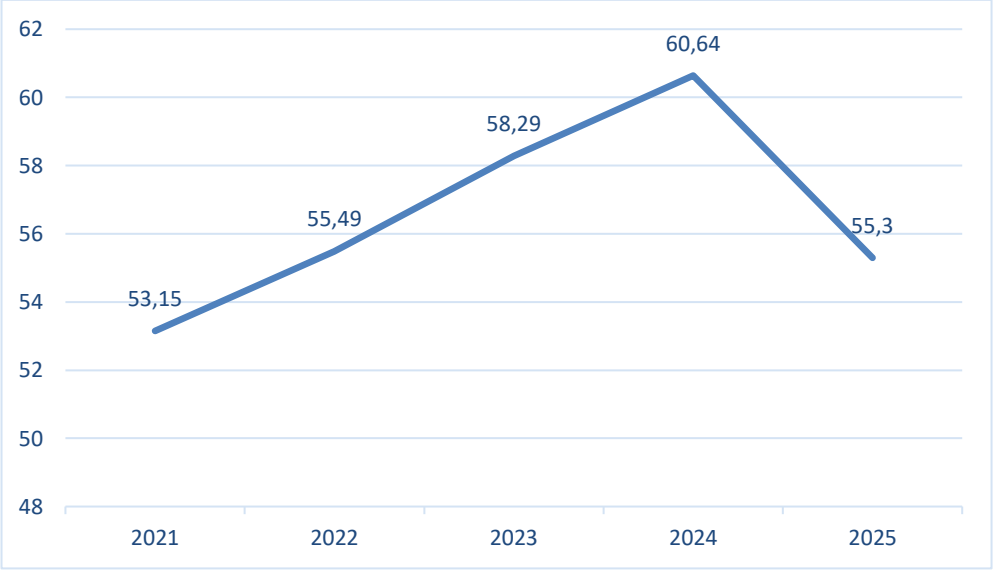
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2026

8. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Intensitas emisi GRK menunjukkan banyaknya emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010. Tahun 2010 dijadikan tahun dasar perhitungan PDB oleh Badan Pusat Statistik, mengacu pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB. Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK,

mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian target dari komitmen NDC, juga sebagai kontrol terhadap progress capaian NDC, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK), Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan inventarisasi GRK Nasional, serta Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada Intergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines Tahun 2006. Penghitungan emisi dilakukan terhadap 4 (empat) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan kehutanan serta perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah. Pada Triwulan I tahun 2026 data Emisi Gas Rumah Kaca belum rilis sehingga masih menggunakan data capaian di tahun sebelumnya yakni tahun 2025 sebesar 55,3%.



Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2025 (diolah)

Gambar 2.9 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2025

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang bersifat komparatif untuk menggambarkan kondisi suatu kabupaten dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Namun demikian, IKLH tidak ditujukan untuk pemeringkatan, melainkan sebagai instrumen evaluasi dan dorongan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikan IKLH sebagai referensi dalam menetapkan arah kebijakan menuju nilai ideal sebesar 100. Semakin rendah capaian IKLH dibandingkan nilai ideal tersebut, semakin besar upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



	2022	2023	2024	2025
Lampung	69,1	69,91	73,11	73,81
Nasional	72,41	72,48	73,57	78,76

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2026

Grafik XXX, Capaian IKLH 2025,

Tren peningkatan IKLH Provinsi Lampung periode Tahun 2021–2025 dipengaruhi oleh kombinasi antara membaiknya kualitas udara, upaya rehabilitasi dan perlindungan lahan, serta penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tekanan terhadap kualitas air dan lahan masih menjadi faktor pembatas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar peningkatan IKLH dapat berlangsung lebih signifikan dan berkelanjutan

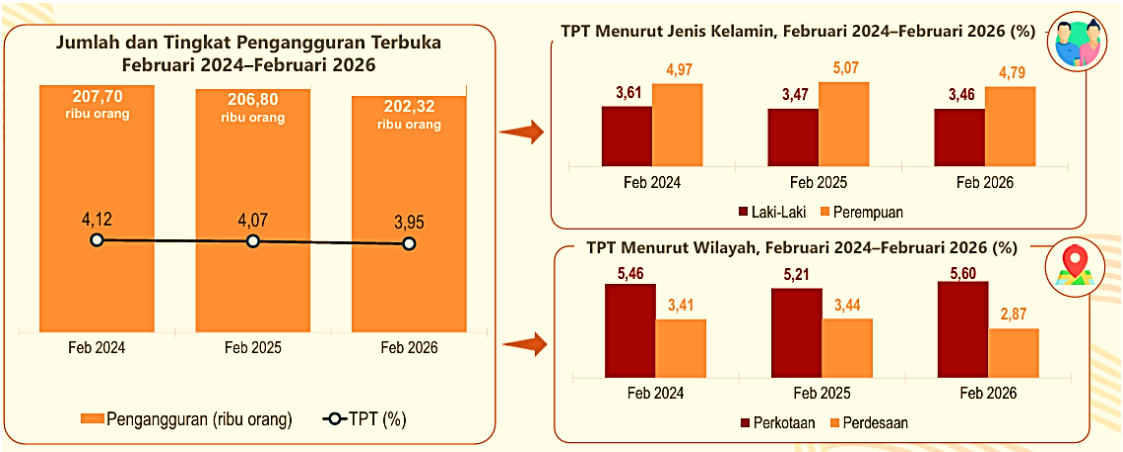
Selama periode 2021–2025, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara bertahap meningkatkan:

- Kebijakan faktor struktural dengan penetapan dan implementasi dokumen lingkungan seperti RPPLH, KLHS, dan DDDTLH Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi dasar pengendalian pembangunan agar tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,
- Pelaporan kinerja lingkungan secara lebih sistematis,
- Integrasi indikator IKLH dalam dokumen perencanaan daerah, dan
- Upaya rehabilitasi lahan kritis, konservasi kawasan lindung, serta rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir memberikan kontribusi terhadap perbaikan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan memperkuat peningkatan IKLH secara agregat.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Februari 2026, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,95 persen, mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Februari 2025. Ini mencerminkan perbaikan akses terhadap kesempatan kerja di tengah dinamika ekonomi.

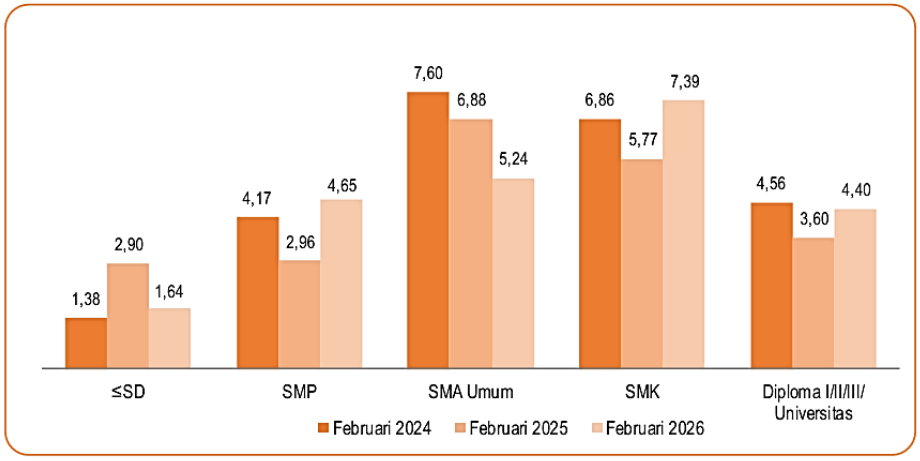
TPT hasil Sakernas Februari 2026 sebesar 3,95 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan dengan Februari 2025.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2026

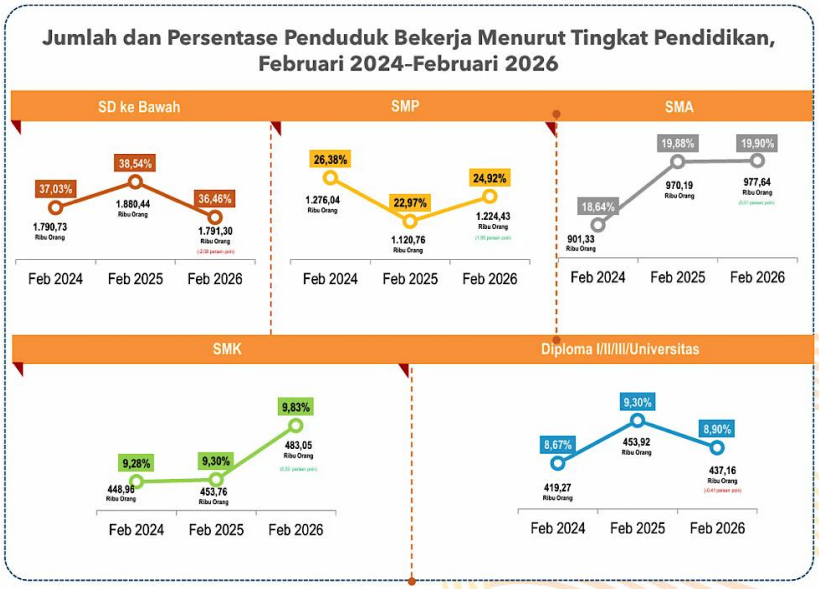
Gambar 2.10 Karakteristik Pengangguran pada Februari 2026 (Triwulan I)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2026 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif membaik, terutama pada kelompok perempuan dan wilayah perdesaan. TPT laki-laki tercatat sebesar 3,46 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan sebesar 4,79 persen. Meskipun demikian, baik TPT laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Penurunan TPT perempuan yang lebih besar mengindikasikan mulai meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,60 persen masih lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan sebesar 2,87 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di wilayah perkotaan masih cukup tinggi akibat tingginya jumlah pencari kerja dan kompetisi lapangan pekerjaan formal. Selain itu, peningkatan TPT perkotaan dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah perkotaan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan angkatan kerja. Sementara itu, penurunan TPT di wilayah perdesaan mencerminkan masih kuatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis pedesaan yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Lampung.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2026

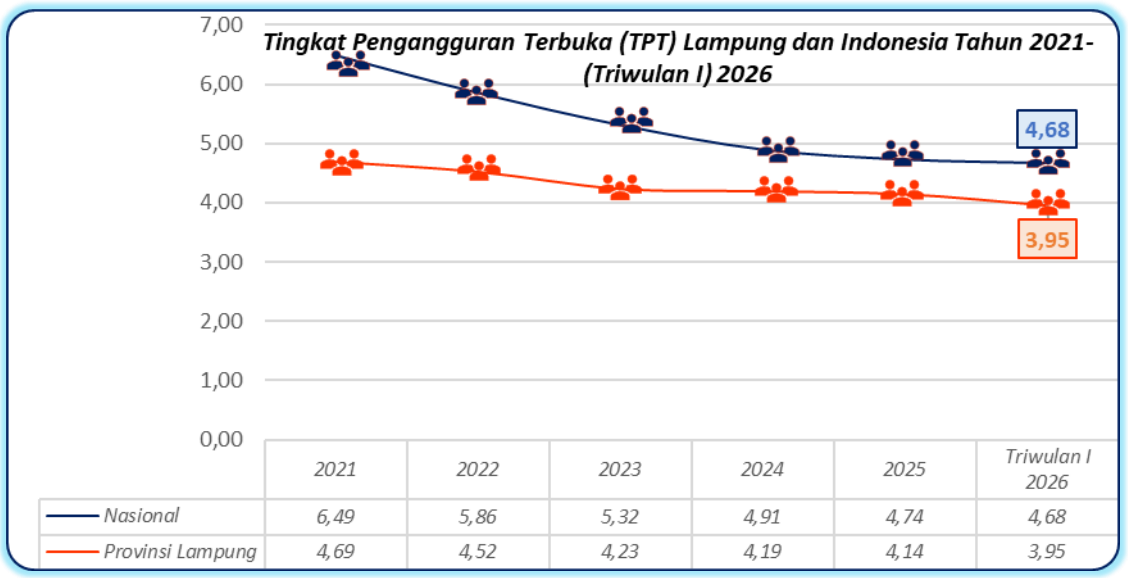
Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2024–Februari 2026



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2026

Gambar 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan,Februari 2024–Februari 2026

Pada Februari 2026, TPT tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,39 persen, sedangkan TPT terendah berada pada kelompok pendidikan SD ke bawah sebesar 1,64 persen. Dibandingkan Februari 2025, penurunan TPT terjadi pada lulusan SMA Umum dan SD ke bawah, dengan penurunan terbesar pada lulusan SMA Umum sebesar 1,64 persen. Namun demikian, peningkatan TPT pada lulusan SMK sebesar 1,62 persen dan lulusan SMP sebesar 1,69 persen mengindikasikan masih belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan antara pendidikan dan pasar kerja melalui peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri, serta perluasan kesempatan kerja



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan BPS Indonesia, 2026

Gambar 2.13 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2026 (Triwulan I)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2026 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif membaik, terutama pada kelompok perempuan dan wilayah perdesaan. TPT laki-laki tercatat sebesar 3,46 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan sebesar 4,79 persen. Meskipun demikian, baik TPT laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Penurunan TPT perempuan yang lebih besar mengindikasikan mulai meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,60 persen masih lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan sebesar 2,87 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di wilayah perkotaan masih cukup tinggi akibat tingginya jumlah pencari kerja dan kompetisi lapangan pekerjaan formal. Selain itu, peningkatan TPT perkotaan dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah perkotaan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan angkatan kerja. Sementara itu, penurunan TPT di wilayah perdesaan mencerminkan masih kuatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor

pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis pedesaan yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Lampung.

2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi keuangan dan fisik dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan I Tahun 2026.

Realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I-2026

(Formulir E.19 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T	
											I		II		III		IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9	
6	**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN**									**0,94**	**292.221.908.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1,51**	
		1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6.766.944.681.509,00	74,65	1.411.854.450.668	100	1.688.715.029.921,00	3,42	286.462.328.122,00							3,42	
		1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	100	3.050.018.342.057,36	82,73	315.780.911.668,00	100	673.513.685.300,00	1,11	4.994.580.044,00							1,11	
		1 1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik jenjang pendidikan menengah dan khusus	100	14.248.547.309,00	100	4.570.579.483	100	4.585.241.740,00	0	765.000.000,00							0,00	
5	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN**									**5,72**	**155.021.965.559,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5,72**	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP perangkat daerah	100	540.595.975.403,00	95,83	56.654.800.000	100	76.852.254.729,90	11,53	15.654.764.740,90							11,53
		1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ANC minimal 6 kali (K6)	100	1.330.086.463.351,00	80,00	10.184.500.000	100	136.151.767.159,39	5,03	2.634.010.572,00							5,03
		1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	25.394.193.215,00	65,22	149.423.000,00	100	612.314.000,00	0,00	3.079.700,00							0,00
		1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100	2.586.500.000,00	75,00	38.704.000,00	100	28.000.000,00	0	0,00							0,00
		1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang memiliki posyandu siklus hidup aktif	100	3.453.517.187,00	29,17	42.420.000	100	143.140.000,00	0	0,00							0,00
		1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RSUAM)	Nilai SAKIP perangkat daerah	100	2.241.507.257.265,00	95,83	56.654.800.000	100	512.119.000.000,00	16,67	123.369.340.653,00							16,67
		1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ANC minimal 6 kali (K6)	100	5.545.007.646,00	80,00	10.184.500.000,00	100	21.864.440.020,00	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUAM)																	
		1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RSJ)	Nilai SAKIP perangkat daerah	100	74.886.772.860,00	95,83	56.654.800.000	100	48.959.796.515,00	12,50	13.360.769.894,00							12,50
		1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSJ)	Persentase ANC minimal 6 kali (K6)	100	4.181.841.777,00	80,00	10.184.500.000	100	2.248.009.485,00	0,00	0,00							0,00
		1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RSBNH)	Nilai SAKIP perangkat daerah	100	5.569.453.802,85	95,83	56.654.779.289,00	100	3.284.921.509,90	11,67	585.679.684,02							
		1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSBNH)	Persentase ANC minimal 6 kali (K6)	100	5.592.586.551,00	80,0	10.184.543.263,00	100	100.000.000,00	0	0,00							
19	**Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												**25,04**	**182.123.941.151,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**25,04**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Penduduk berakses Air minum layak	100	10.034.604.982,79	100	940.647.471	100	2.128.344.956,00	0	1.298.504.456,00							0,00
		1	3	4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan kumuh	100	3.758.385.006,82	100	715.119.214	100	643.613.550,00	100	506.590.550,00							100,00
		1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektifitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	100	5.686.276.187,11	100	835.866.509	100	951.712.330,00	100	769.156.510,00							100,00
		1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100	448.300.672.157,99	100	43.920.226.520	100	84.719.961.769,46	0	45.770.075.960,46							0,00
		1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100	141.566.946.338,39	100	27.562.559.318	100	18.837.059.277,68	0	16.111.622.622,03							0,00
		1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan pengaturan dan pemanfaatan tata ruang	100	21.696.712.522,44	100	6.450.857.890	100	3.205.486.732,00	37,50	1.757.707.398,50							37,50

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PKPCK)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	121.441.288.014,57	87,50	14.514.420.763	100	17.850.675.314,00	8,83	3.752.848.945,00							8,83
		1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pendataan rumah	100	120.569.500	100	3.089.500	100	152.950.300,00	0	98.248.000,00							0,00
		2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100	832.546.500,00	100	809.371.500	100	38.490.800,00	0	0,00							0,00
		2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	100	10.243.917.290,98	100,00	1.544.144.414	100	826.928.600,00	100	740.278.733,00							100,00
15	**Meningkatkan Kualitas Jalan**	1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BMBK)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Tertib dan Tepat Waktu	100	361.465.302.424,05	80,95	44.774.900.000	100	58.909.648.510,00	16,59	11.557.336.848,00							16,59
		1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	100	594.208.227.094.798,00	96,42	893.250.000.000	100	1.646.419.548.000,00	11,25	35.356.415.710,00							11,25
		1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100	2.310.252.610.000,00	54,56	475.182.000	100	2.021.899.100,00	25	744.431.000,00							25,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
18	**Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air**	1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PSDA)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Tertib dan Tepat Waktu	100	78.394.160.564,00	80,95	47.464.474.946	100	58.084.662.632,00	1,39	12.906.967.885,00							1,39	
		1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi	100,00	286.417.189.733,00	76,39	97.489.700.000	100	83.175.645.443,00	0	50.753.756.533,81							0,00	
19	**Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**												**36**	**62.825.343.529,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**35,78**	
		1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Perumahan	100	60.994.798.041,13	50,00	7.627.253.337	100	16.265.088.728,80	21,55	11.384.055.029,00							21,55	
		1	4	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan kumuh	100	946.575.226.587,18	100,00	154.611.404.230,60	100	74.409.829.777,19	50	51.441.288.500,09							50,00	
32	**Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												**8,99**	**9.150.835.358,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6,74**	
		1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan	100	56.653.115.000,00	100,00	10.326.097.105	100	61.860.294.350,00	5,36	5.860.314.380,00							5,36	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						DAERAH PROVINSI (SATPOL PP)	Kepegawaian, Keuangan dan Aset serta Dokumen Perencanaan																
		1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	4.468.251.500,00	10,00	2.492.520.000	100	689.362.250,00	0	0,00							0,00
21	**Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana**	1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPBD)	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset serta Dokumen Perencanaan	100	13.668.354.586,00	100	10.326.097.105	100	10.746.856.188,09	9,10	485.732.958,00							9,10
		1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Daerah terhadap Penangulangan Bencana sesuai target dan ketentuan yang berlaku, Upaya Penyelamatan Korban Bencana melalui tanggap darurat serta Pennyediaan Logistik,dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasc	100	50.352.910.871,00	90	41.514.851.377	100	66.760.991.611,91	12,50	2.804.788.020,70							12,50
14	**Meningkatnya kualitas jaminan sosial**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG SOSIAL**												**12,74**	**5.077.430.882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**12,74**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T	
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	bagi Masyarakat miskin																					
		1	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	126.389.345.190,04	96,43	20.222.300.000	100	20.347.668.451,80	10,10	4.648.275.525,00							10,10	
		1	6	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	100	1.264.042.558,00	87,50	122.048.000	100	57.100.880,00	0	0,00							0,00	
		1	6	3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Asal Lampung yang Tertangani	100	968.100.658,00	100	165.554.000	100	98.513.000,00	6,67	4.170.000,00							6,67	
		1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Dilayani dan diRehabilitasi di dalam panti	100	50.476.092.478,00	96,67	5.577.040.000	100	5.604.776.691,00	49,39	358.771.918,00							49,39	
		1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	4.069.314.525,00	100,00	548.813.000	100	347.269.900,00	0	0,00							0,00	
		1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	25.389.289.785,00	100,00	14.273.771.218	100	17.589.760.077,20	10,37	66.213.439,00							10,37	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100	18.585.730.987,00	100	56.746.000	100	65.000.000,00	12,65	0,00							12,65
2	**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG TENAGA KERJA**												**1,33**	**6.231.822.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1,33**
		2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	100	26.802.954.667,57	70,83	25.004.759.270	100	25.947.842.880,00	7,99	6.231.822.572,00							7,99
		2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100	113.387.932,00	33,33	5.673.200	100	20.485.800,00	0	0,00							0,00
		2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	100	9.824.327.705,00	62,50	9.986.490.000	100	6.069.085.000,00	0	0,00							0
		2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	100	394.501.653,00	28,37	65.759.900	100	169.339.900,00	0	0,00							0,00
		2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	365.000.000,00	100,00	1.278.940.000	100	327.427.300,00	0	0,00							0,00
		2	7	6		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	100	396.412.335,00	100,00	179.690.000	100	156.903.000,00	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7	**Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PEMBERDAYA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												**0,71**	**2.179.987.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,71**
		2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100	64.829.656.974,00	92,71	9.666.530.371	100	10.445.190.000,00	4,95	2.179.987.625,00							4,95
		2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi pengarusutamaan gender	100	2.972.048.719,00	100	584.403.570,00	100	305.000.000,00	0,00	0,00							0,00
		2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100	7.972.180.883,00	100	1.191.920.000,00	100,00	1.122.681.900,00	0,00	0,00							0,00
		2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga	100	313.710.564,00	100	103.526.000,00	100	25.000.000,00	0,00	0,00							0,00
		2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100	1.058.561.800,00	50	29.883.460,00	100	80.000.000,00	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kab/kota layak anak yang mendapatkan predikat minimal madya	100	1.899.990.000,00	66,67	45.124.400,00	100	80.000.000,00	0,00	0,00							0,00
		2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	100	834.775.900,00	100	114.876.000	100	205.128.100,00	0	0,00							0,00
1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PANGAN**												**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
		2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Skor Pola Pangan Harapan; 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	100	776.928.900,00	16,67	20.740.000	100	363.446.000,00	0	0,00							0,00
		2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	100,00	413.929.011,00	0	0	100,00	33.725.000,00	0	0,00							0,00
		2	9	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Segar Asal Tumbuhan yang Mencukupi Syarat Keamanan Pangan	100	562.563.530,00	50	13.960.000	100	231.981.000,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
19	**Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERTANAHAN**												**50**	**740.278.733,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50,00**
		2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100	832.546.500,00	100	809.371.500	100	38.490.800,00	0	0,00							0,00
		2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	100	10.243.917.290,98	100	1.544.144.413,63	100	826.928.600,00	100	740.278.733,00							100,00
20	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**												**5,83**	**2.555.960.027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5,83**
		2	11	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku	100	96.192.613.597,24	62,78	14.755.963.338,16	100	0,00	58,33	2.535.048.027,00							58,33
		2	11	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen data dan informasi sumber daya alam dan perencanaan lingkungan hidup	100	3.531.624.297,09	100	128.272.691	100	0,00	0	9.596.000,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	11	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100	3.999.299.050,03	66,67	111.345.036	100	0,00	0	9.596.000,00							0,00
		2	11	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	100	438.489.000,00	20	12.362.200	100	0,00	0	1.720.000,00							0,00
		2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan dan penanganan kasus lingkungan	100	569.578.000,00	0	0	100	48.894.700,00									0,00
25	**Meningkatnya Pelayanan Publik Prima**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												**2,37**	**1.167.105.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,37**
		2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi lampung	100	21.824.140.656,00	78,65	5.329.150.000	100	5.370.047.320,00	11,87	1.167.105.866,00							11,87

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Kependudukan di Provinsi Lampung	100	655.716.629,00	83,33	135.823.000	100	47.585.400,00	0,00	0,00							0,00
		2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	100	204.627.161,00	100	27.871.800	100	23.716.800,00	0	0,00							0,00
		2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	161.469.385,00	100,00	35.161.800	100,00	17.999.800,00	0	0,00							0,00
		2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan Provinsi Lampung	100	209.648.775,00	100	53.031.000	100	11.567.680,00	0	0,00							0,00
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**												**2,04**	**2.295.780.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,04**
		2	13	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	100	12.652.650.026,30	87,44	11.039.300.000	100	10.549.108.000,00	4,07	2.295.780.370,00							4,07
		2	13	3		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	3.386.251.655,00	100	3.191.820.000	100	2.717.636.000,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
		2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	100	232.050.000,00	0	0	100	0,00	0	0,00							0,00
		2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota	100	464.100.000,00	0	0	100	0,00	0	0,00							0,00
		2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	690.000.000,00	50,00	148.954.000	100	175.000.000,00	0	0,00							0,00
25	**Meningkatnya Pelayanan Publik Prima**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BADAN PERHUBUNGAN**												**2,08**	**4.075.144.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,08**
		2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	19.361.080.730,00	71,98	15.055.506.891	100	17.920.671.600,00	8,33	4.075.144.271,00							8,33

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	0,00	54,22	1.253.009.877	100	1.053.280.400,00	0,00	0,00							0,00
		2	15	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100	0,00	62,50	21.059.300	100	323.500.000,00	0,00	0,00							0,00
		2	15	5		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	0,00	0	0	100	0,00	0	0,00							0,00
26	**Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												**2,60**	**3.340.110.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,60**
		2	16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	83.598.658.213,00	81,10	13.034.400.000	100	15.798.586.500,00	1,56	3.145.674.985,00							1,56
		2	16	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Terkelolanya Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah Provinsi dan Persentase Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di Pemerintah Daerah Provinsi	100	71.030.977.195,00	85,19	11.411.200.000	100	11.552.936.500,00	4,96	183.647.477,00							4,96

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	16	3		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terkelolaanya Aplikasi Informatika di Pemerintah Daerah Provinsi dan Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika yang tersedia di Pemerintah Daerah Provinsi	100	43.132.228.539,00	87,50	7.520.750.000	100	8.413.277.000,00	1,27	10.787.870,00							1,27
12	**Pengembangan Sektor koperasi dan UMKM**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**												**0,52**	**3.630.411.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,52**
		2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	100	86.807.451.875,00	66,52	11.576.100.000	100	14.736.901.299,96	4,17	3.627.411.787,00							4,17
		2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat terhadap aturan perkoperasian sesuai dengan undang-undang yang berlaku	100,00	35.000.000.000,00	0,00	0	100,00	33.354.000,00	0	0,00							0,00
		2	17	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi yang memiliki kategori sehat	100,00	265.600.000,00	100,00	999.900	100,00	15.000.000,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkat kompetensi dan pengetahuannya	100,00	585.000.000,00	0,00	0	100,00	42.544.550,00	0	0,00							0,00
		2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentasi koperasi yang meningkat volume usahanya	100,00	565.600.000,00	33,33	5.484.000	100,00	139.077.600,00	0	0,00							0,00
		2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha	100,00	1.945.600.000,00	50,00	249.175.000	100,00	394.420.550,00	0	3.000.000,00							0,00
		2	17	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan managemen usaha menuju skala menengah	100,00	744.000.000,00	50,00	206.394.000	100,00	30.750.000,00	0	0,00							0,00
3	**Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL**												**3,96**	**3.441.570.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3,96**
		2	18	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98.317.883.174,00	86,52	14.600.800.000	100	16.306.980.400,00	23,77	3.441.570.137,00							23,77

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	18	3		PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	406.366.430,00	100	6.366.430	100	274.912.600,00	0	0,00							0,00
		2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Nasional	100	375.000.000,00	94,12	0	100	59.066.000,00	0	0,00							0,00
		2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISITEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	25.800.000.000,00	0	0	100	36.063.000,00	0	0,00							0,00
9	**Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
		2	19	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Asset dan Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat daerah	100	286.902.021.510,29	71,14	51.379.100.000	100	20.679.138.875,48	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang Ditingkatkan	100	17.469.771.489,29	70,56	2.935.460.000	100	649.932.625,00	0	0,00							0,00
		2	19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	100	44.032.629.613,58	67,77	4.044.080.000	100	15.349.187.499,52	0	0,00							0,00
		2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100	140.884.979,06	0	0	100	800.000.000,00	0	0,00							0,00
26	**Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG STATISTIK**												**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		2	20	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Statistik Sektoral dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100	456.891.496,00	40,00	25.801.000	100	28.200.000,00									0,00
26	**Meningkatnya Kualitas**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANGN PERSANDIAN**												**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik																					
		2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100	414.960.591,00	37,50	143.608.340	100	30.000.000,00	0	0,00							0,00
31	**Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEBUDAYAAN**												**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
		2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah objek budaya (seni) yang dikembangkan	100,00	10.354.221.109,00	100	2.242.927.670	100	2.599.150.780,00	0	0,00							0,00
		2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan	100	2.329.527.631,00	100	295.245.500	100	169.626.499,00	0	0,00							0,00
		2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan (WBTB)	100	1.388.922.798,00	83,33	310.243.266	100	90.345.000,00	0	0,00							0,00
		2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN	Persentase Cagar Budaya yeng ditetapkan	100	1.955.584.630.471,00	98,18	302.406.262	100	156.733.080,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																	
		2	22	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	100	18.131.338.241,00	100	3.871.897.369	100	2.500.000.000,00	0	0,00							0,00	
25	**Meningkatnya Pelayanan Publik Prima**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERPUSTAKAAN**												**18,89**	**3.115.727.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**18,89**
		2	23	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	13.645.203.677,00	84,67	13.044.574.953	100	14.273.177.900,00	35,83	3.105.481.853,00							35,83	
		2	23	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan dan Unit perpustakaan yang dibina	100	524.656.840,00	80	593.123.363	100	472.139.700,00	20,83	9.248.857,00							20,83	
		2	23	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100	219.853.360,00	100	411.268.700	100	91.153.800,00	0,00	997.000,00							0,00	
25	**Meningkatnya Pelayanan Publik Prima**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEARSIPAN**												**50**	**19.748.200,00**							**50,00**
		2	24	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip yang terpelihara	100	8.028.662.900,00	52,83	164.294.911	100	99.282.600,00	50	19.748.200,00							50,00	
1	**Meningkatnya Pertumbuhan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**												**1**	**4.581.624.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,52**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Ekonomi Sektor Unggulan																					
		2	25	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	110.693.144.000,00	77,20	19.017.500.000	100	20.172.381.260,00	3,13	4.570.915.331,00							3,13
		2	25	2		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (ha)	100,00	7.650.000.000,00	150,73	115.462.000	100,00	25.834.000,00	0	0,00							0,00
		2	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	100,00	90.050.000.000,00	76,67	209.125.000	100	98.098.700,00	0,00	3.071.000,00							0,00
		2	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	100,00	11.935.000.000,00	88,89	218.008.000	100	169.678.680,00	0,00	1.450.000,00							0,00
		2	25	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Hari Operasi	100	3.400.000.000,00	50	75.260.000	100	43.943.960,00	0	6.187.700,00							0,00
		2	25	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	100,00	4.385.000.000,00	66,67	278.431.000	100,00	449.043.400,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PARIWISATA**												**2,13**	**2.732.190.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,13**
		2	26	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	17.300.000.000,00	86	11.345.140.418	100	12.462.930.300,00	10,65	2.732.190.982,00							10,65
		2	26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	100	2.203.685.280,00	58,33	0	100	113.556.100,00	0	0,00							0,00
		2	26	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	100	5.000.000.000,00	100	1.032.101.114	100	183.668.900,00	0	0,00							0,00
		2	26	4		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	100	1.900.000.000,00	83,33	219.273.900	100	60.201.900,00	0	0,00							0,00
		2	26	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	100	4.725.782.351,00	100	705.102.530	100	199.171.800,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERTANIAN**												**10**	**16.104.545.814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPTPH)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	100,00	201.603.588.988,00	81,75	14.110.076.347	100,00	44.348.858.900,00	7,61	9.093.942.991,00							7,61
		3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (KPTPH)	1. Peningkatan produksi tanaman pangan.; 2. Peningkatan produksi tanaman hortikultura.	100	1.751.426.910,00	94,17	10.000.000	100	668.148.600,00	0	0,00							0,00
		3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (KPTPH)	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	35.424.728.975,00	88,89	1.338.162.145	100	12.084.240.000,00	0	0,00							0,00
		3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DISBUN)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	100	16.197.072.164,00	81,75	14.110.076.347	100	15.113.125.894,00	12,61	2.035.537.458,00							12,61
		3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (DISBUN)	1. Peningkatan produksi tanaman pangan.; 2. Peningkatan produksi tanaman hortikultura.	100	1.156.008.387,00	94,17	10.000.000	100	65.726.740,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DISBUN)	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	4.748.197.477,00	88,89	1.338.162.145	100	1.110.788.691,32	0,00	0,00							0,00
		3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (DISBUN)	1. Persentase penanganan bencana pertanian; 2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian.	100	576.636.850,00	100	43.034.600	100	63.380.520,00	0	0,00							0,00
		3	27	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (DISBUN)	Persentase penilaian usaha perkebunan (%)	100	27.500.000,00	100	21.745.900	100	21.347.321,60	0	0,00							0,00
		3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	100	1.329.293.196,00	50	354.634.200	100	602.031.073,00	0	0,00							0,00
		3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (KPTPH)	1. Persentase penanganan bencana pertanian; 2. Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian.	100,00	57.663.685.000,00	100	43.034.600	100,00	245.594.500,00	0	0,00							0,00
		3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (KPTPH)	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	100	2.940.301.569,00	50	354.634.200	100	25.015.000,00	0	0,00							0,00
		3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	100	133.291.374.749,00	81,75	14.110.076.347	100	19.749.621.749,92	39,15	4.806.713.494,00							39,15

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						DAERAH PROVINSI (KESWAN)																		
		3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (KESWAN)	1. Peningkatan produksi tanaman pangan.; 2. Peningkatan produksi tanaman hortikultura.	100	34.781.762.750,00	94,17	10.000.000	100	3.398.471.850,00	25,00	124.435.490,00							25,00
		3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	713.757.790,00	88,89	1.338.162.145	100	1.187.220.800,00	8,33	2.180.484,00							8,33
		3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	100	9.240.926.049,00	100	1.117.315.456	100	867.164.600,00	20,00	34.748.567,00							20,00
		3	27	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (KESWAN)	Persentase penilaian usaha perkebunan (%)	100,00	500.370.350,00	100,00	21.745.900	100,00	12.654.000,00	25,00	0,00							25,00
		3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (KESWAN)	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	100	129.630.290.200,00	50,00	354.634.200	100	334.715.000,00	25,00	6.987.330,00							25,00
20	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEHUTANAN**												**2,50**	**14.865.210.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,50**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	146.015.173.170,00	83,13	51.199.689.604	100	61.252.599.430,00	12,50	14.865.210.161,00							12,50
		3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Tutupan Lahan	100	2.211.186.947,00	51,21	303.017.202	100	410.436.050,00	0	0,00							0,00
		3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di Tahura	100	1.390.866.330,00	60,16	370.735.400	100	554.442.000,00	0,00	0,00							0,00
		3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	100	3.286.971.072,00	68,84	424.204.665	100	323.171.000,00	0	0,00							0,00
		3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	146.045.550,00	100	20.047.160	100,0	22.206.400,00	0	0,00							0,00
17	**Meningkatnya Ketahanan Energi**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDNANG SUMBER DAYA MINERAL**												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
		3	29	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100	82.539.855.346,00	82,92	15.569.101.608	100	15.097.836.516,00	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		3	29	2		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	100	618.335.380,00	83,33	125.384.968	100	0,00	0	0,00							0,00
		3	29	3		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	100	827.058.337,00	100	905.300.719	100	177.708.790,00	0	0,00							0,00
		3	29	5		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	100	1.510.159.420,00	80	296.878.480	100	0,00	0	0,00							0,00
		3	29	6		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	100	27.593.639.410,00	87,50	565.267.860	100	0,00	0	0,00							0,00
1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERDAGANGAN**												**16,44**	**3.596.710.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16,44**
		3	30	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	89.055.000.000,00	95,24	15.046.546.302	100	15.567.855.600,00	20,90	3.547.749.689,00							20,90
		3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Andil Inflasi Bahan Makanan	100	8.640.000.000,00	50	525.687.300	100,00	35.238.600,00	0,00	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang memperoleh fasilitasi	100	7.675.000.000,00	100	274.307.398	100	23.567.300,00	33,33	0,00							33,33
		3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	100	7.475.000.000,00	83,48	368.956.708	100,00	240.000.000,00	44,41	48.960.640,00							44,41
1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN**												**3**	**158.715.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,78**
		3	31	2		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung	100	18.408.294.000,00	1,50	2.449.063.004	100	15.821.143.000,00	8,33	157.469.641,00							8,33
		3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	1.350.000.000,00	100	9.556.600	100	9.341.900,00	0	1.245.975,00							0,00
2	**Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**	**URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TRANSMIGRASI**												**0,00**	**0,00**	**15,56**	**0,00**					**0,00**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	100	114.461.120,00	33,33	59.399.110	100	90.450.000,00	0	0,00							0,00
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**SEKRETARIAT DAERAH**												**14,96**	**39.043.282.917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**11,78**
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	1.573.907.500,00	80,00	444.931.153	100	505.784.000,00	6,25	19.630.000,00							6,25
		4	1	8		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rencana	100	3.777.378.000,00	97,22	111.974.051	100	521.549.000,00	0	0,00							0,00
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO PEREKONOMIAN)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	2.774.041.475,00	80	444.931.153	100	420.704.000,00	8,33	63.114.895,00							8,33
		4	1	6		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	100	7.121.363.323,00	3,50	1.052.113.575	100	781.446.800,00	17,50	44.230.600,00							17,50
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	8.828.750.000,00	80,00	444.931.153	100	703.948.300,00	8,33	0,00							8,33

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						DAERAH PROVINSI (BIRO HUKUM)																		
		4	1	5		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan	100	8.211.772.324,00	90,00	410.899.115	100	406.527.700,00	6,94	0,00							6,94
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	1.444.146.320,00	80,00	444.931.153	100	312.439.770,00	19,44	27.109.652,00							19,44
		4	1	3		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2. Efektivitas kerjasama daerah	100	2.425.071.700,00	89,81	377.149.665	100	988.403.230,00	5,56	19.668.850,00							5,56
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO KESRA)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	1.675.000.000,00	80,00	444.931.153	100	637.859.400,00	23,24	67.884.191,00							23,24
		4	1	4		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	100	87.224.518.960,00	55,98	92.565.520.432	100	78.345.807.400,00	0,00	3.932.212.667,00							0,00
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO ORGANISASI)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	973.006.263,00	80,00	444.931.153	100	612.595.100,00	17,32	47.805.767,00							
		4	1	2		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Presentase Dokumen Penataan Organisasi (KelembagaanAnjab	100	1.955.000.000,00	100	340.694.880	100	431.945.900,00	27,22	52.057.500,00							

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
							reformasi birokrasiakuntabilitas kinerja Tatalaksana dan pelayanan publik) yang sesuai dengan peraturan berlaku														
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO PBJ)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	9.369.717.400,00	80	444.931.153	100	344.810.400,00	4,17	32.324.192,00							4,17
		4	1	7		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	100	16.122.518.050,00	88,89	561.793.217	100	788.511.600,00	16,67	101.073.203,00							16,67
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO UMUM)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	6.868.671.985.809,00	80,00	444.931.153	100	163.976.000.000,00	23,60	34.165.500.048,00							23,60
		4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BIRO ADPIM)	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	1.467.860.087.160,00	80,00	444.931.153	100	2.960.928.000,00	24,83	470.671.352,00							24,83
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**SEKRETARIAT DPRD**												**16,97**	**78.194.046.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16,97**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi Umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100	169.836.947.095,68	100	161.690.069.421	100	279.079.015.352,00	22,70	74.103.631.802,00							22,70
		4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	221.274.747.710,64	92,86	266.386.551.151	100	91.467.384.648,00	11,24	4.090.415.141,00							11,24
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**PERENCANAAN**												**11,28**	**6.123.435.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**11,28**
		5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	107.432.535.514,00	77,99	22.771.033.973	100	24.224.913.268,00	23,95	5.419.482.775,00							23,95
		5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100	17.433.765.682,00	100	2.576.213.300	100	1.875.669.772,00	9,90	394.100.200,00							9,90
		5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	17.583.935.630,00	100,00	1.534.944.817	100	1.727.941.950,00	0	309.852.600,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
							bidang Perekonomian serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah														
22	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**KEUANGAN**												**13,50**	**46.354.277.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13,50**
		5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPKAD)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100	849.348.954.850,31	76,34	140.114.218.080	100	169.151.750.267,89	8,44	22.187.694.134,00							8,44
		5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Persentase Pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Aktifk	100	7.133.180.355.010,35	90,56	829.219.360.904	100	939.271.855.528,49	17,44	658.841.077,00							17,44

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	100	26.079.279.749,53	100	5.455.891.751	100	7.403.795.865,00	0,00	280.327.818,00							0,00
		5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BAPENDA)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100	788.587.346.561,00	76,34	140.114.218.080	100	77.607.462.754,00	15,97	22.674.705.370,00							15,97
		5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100	113.621.940.000,00	100	11.933.954.630	100	9.717.138.751,00	25,66	552.709.580,00							25,66
28	**Meningkatnya Penguatan Implementasi Sistem Merit**	**KEPEGAWAIAN**												**24,59**	**4.307.327.223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**24,59**
		5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	59.540.239.731,00	90,48	16.831.027.230	100	18.353.070.740,00	21,74	4.271.770.443,00							21,74
		5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	100	40.073.837.331,00	100,00	2.482.610.027	100	1.625.156.260,00	27,44	35.556.780,00							27,44
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												**2,91**	**3.300.777.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**#VALUE!**

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Instansi Pemerintah																					
		5	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	114.388.505.540,00	81,01	17.644.796.045	100	19.264.620.210	18.68	3.262.985.400,00							#VALUE!
		5	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, & Fungsional, Persentase Realisasi Pendidikan Pelatihan yang Dilaksanakan, Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi, Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Teknis	100,00	27.562.363.333,00	97,40	5.804.293.361	100	6.596.298.000,00	5,81	37.792.144,00							5,81
24	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**	**PENGEMBANGAN**												**32,68**	**2.144.666.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**32,68**
		5	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan urusan pemerintahan daerah	100	72.786.449.599,35	76,53	7.818.372.946	100	8.286.966.000,00	15,36	1.895.093.655,00							15,36

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	26.298.914.438,00	70,42	276.211.085	100	303.162.000,00	50,00	249.573.200,00							50,00
25	**Meningkatnya Pelayanan Publik Prima**	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**												**13,72**	**3.299.603.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13,72**
		5	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	97.904.377.976,00	83,67	15.493.876.141	100	16.919.173.600,00	20,77	3.174.385.586,00							20,77
		5	7	2		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kualitas pelayanan Badan Penghubung	100	7.805.937.600,00	100	1.095.837.450	100	1.253.848.600,00	6,67	125.217.900,00							6,67
23	**Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah**	**INSPEKTORAT DAERAH**												**13,66**	**8.475.946.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**13,66**
		6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2.Nilai SAKIP Inspektorat	100	263.253.826.889,00	94,61	36.448.665.996	100	36.666.165.800,00	23,25	8.433.902.526,00							23,25
		6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai	100	20.420.627.642,00	100,00	1.573.629.684,00	100	934.235.200,00	9,93	22.955.000,00							9,93

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
							ditindaklanjut, 2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan , 3. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kriteria nilai ≥ BB														
		6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Capaian Nilai MCP KPK., 2. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sesuai Peraturan. 3.Persentase unit kerja yang terbina zona integritas WBK/WBBM)	100	1.532.420.800,00	75,00	65.481.000	100	123.812.100,00	7,81	19.088.788,00							7,81
30	**Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**												**0**	**1.481.220.015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1,49**
		8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	106.926.055.127,30	83,33	18.233.374.891	100,00	8.361.917.400,00	2,98	1.481.220.015,00							2,98
		8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan	100,00	14.650.000.000,00	20,00	1.415.172.603	100	1.065.521.600,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						DAN KARAKTER KEBANGSAAN	kebangsaan bagi masyarakat																
		8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	100	6.000.000.000,00	50	47.127.300	100	21.056.071.000,00	0	0,00							0,00
		8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	100	2.975.000.000,00	100	72.133.100	100	755.630.000,00	0	0,00							0,00
		8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00	3.625.000.000,00	100	10.728.400	100,00	30.800.000,00	0	0,00							0,00
		8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	100	6.000.000.000,00	20,00	7.410.900	100	73.030.000,00	0	0,00							0,00

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2030		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2025)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2026) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISA ANGGARAN s/d T
														I		II		III		IV		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														13,29	1.051.746.894.355,70	0	0	0	0	0,00	0	13,66
PREDIKAT KINERJA														SANGAT RENDAH								

Berdasarkan capaian kinerja pada Perangkat Daerah yang telah disajikan menggunakan Formulir E.1, dalam Permendagri 86/2017 dikatakan bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Tabel 2.3 Skala Penilaian Peringkat Kinerja
(Tabel T-E1, Permendagri 86 Tahun 2017)

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Predikat kinerja pada Perangkat Daerah memberikan informasi, mana Perangkat Daerah yang telah mencapai kinerja pada triwulan I Tahun 2025. Adapun rekapitulasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
1	BADAN KEPEGAGAWAIN DAERAH	24,59	21,56	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	0,5	4,73	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10,8	6,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	20,82	26,6	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	21,79	24,92	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,63	2,07	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12,25	12,76	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	13,74	18,16	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11,28	22	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DAERAH	3,13	1,91	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA DAERAH	24,83	15,9	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	BIRO HUKUM SETDA DAERAH	7,64	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH	11,62	5,06	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	BIRO ORGANISASI SETDA	22,27	9,56	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	12,5	3,6	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	10,42	11,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	BIRO PEREKONOMIAN SETDA DAERAH	12,92	10,69	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	BIRO UMUM SETDA DAERAH	23,6	20,84	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	17,62	2,79	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4,06	21,74	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	DINAS KEHUTANAN	2,5	23,76	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,69	21,86	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,37	21,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	DINAS KESEHATAN	3,31	8,56	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
25	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	0,85	15,68	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1,56	9,32	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,6	23,59	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9,72	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2,13	20,99	Sangat Rendah	Sangat Rendah
30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	1,36	17,19	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,49	17,53	Sangat Rendah	Sangat Rendah
32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,54	24,89	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,94	20,64	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,57	12,32	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	0,69	45,07	Sangat Rendah	Sangat Rendah
36	DINAS PERHUBUNGAN	2,08	21,12	Sangat Rendah	Sangat Rendah
37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17,83	8,48	Sangat Rendah	Sangat Rendah
38	DINAS PERKEBUNAN	2,1	11,99	Sangat Rendah	Sangat Rendah
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	26,67	20,99	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	29,85	60,57	Sangat Rendah	Rendah
41	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	23,75	19,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah
42	DINAS SOSIAL	12,74	11,51	Sangat Rendah	Sangat Rendah
43	DINAS TENAGA KERJA	1,33	19,06	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Triwulan I		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
44	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	13,66	22,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah
45	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG	6,25	26,09	Sangat Rendah	Sangat Rendah
46	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA	5,83	17,3	Sangat Rendah	Sangat Rendah
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK	8,33	23,1	Sangat Rendah	Sangat Rendah
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2,68	9,37	Sangat Rendah	Sangat Rendah
49	SEKRETARIAT DPRD	16,97	21,1	Sangat Rendah	Sangat Rendah
TOTAL		**13,29**	**17,42**		

Sumber : Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I, secara umum menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah masih berada pada kategori “Sangat Rendah”. Kondisi tersebut tercermin dari rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 9,87% dan realisasi keuangan sebesar 17,42%. Rendahnya capaian pada Triwulan I merupakan kondisi yang relatif umum terjadi karena sebagian besar program dan kegiatan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan, proses administrasi, penetapan dokumen pendukung, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pada awal tahun anggaran beberapa perangkat daerah juga masih melakukan penyesuaian terhadap perencanaan teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi fisik maupun keuangan belum dapat berjalan optimal.

Dari keseluruhan perangkat daerah yang dievaluasi, hampir seluruh perangkat daerah masih berada pada predikat **“Sangat Rendah”** baik untuk capaian kinerja fisik maupun realisasi keuangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perangkat daerah yang menunjukkan realisasi keuangan relatif lebih baik

dibandingkan perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan realisasi keuangan sebesar 60,57% dan predikat “Rendah”, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan realisasi keuangan sebesar 45,07%. Selain itu, beberapa perangkat daerah juga telah menunjukkan capaian fisik yang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar 29,85%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 26,67%, Biro Administrasi Pimpinan Setda sebesar 24,83%, Badan Kepegawaian Daerah sebesar 24,59%, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 23,75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan pada perangkat daerah tersebut telah mulai berjalan lebih cepat dibandingkan perangkat daerah lainnya.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah perangkat daerah dengan capaian fisik dan realisasi keuangan yang sangat rendah, bahkan beberapa di antaranya belum mencapai 5% untuk capaian fisik. Kondisi ini antara lain terlihat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan proses pengadaan, penyesuaian jadwal kegiatan, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta adanya kegiatan yang realisasinya direncanakan pada triwulan berikutnya. Selain itu, terdapat beberapa perangkat daerah dengan realisasi keuangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan capaian fisiknya, yang menunjukkan bahwa serapan anggaran belum sepenuhnya diikuti dengan pencapaian output kegiatan secara optimal.

Secara umum, perbedaan antara capaian kinerja fisik dan realisasi keuangan pada beberapa perangkat daerah menunjukkan masih perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar kesesuaian antara serapan anggaran dan capaian kinerja dapat lebih selaras. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan strategis, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian program, serta optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah. Perangkat daerah dengan capaian rendah dan sangat rendah juga perlu melakukan evaluasi internal secara lebih komprehensif untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan serta menyusun langkah percepatan agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal pada triwulan berikutnya.

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. IKD dirancang untuk mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 4 (Empat) aspek yaitu : Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum. Dalam melakukan penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi
3.	66 % ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. **Hasil Sedang**

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.1.4. Capaian Aspek Geografi dan Demografi

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung pada Aspek Geografi dan Demografi Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari **12 indikator** dengan rata-rata capaian sementara sebesar 28,41%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan

I, sebagian besar indikator pada aspek ini belum dapat diukur capaian tahunannya karena masih menunggu rilis data resmi pada akhir tahun. Hal tersebut tercermin dari sejumlah indikator yang masih berstatus “Capaian Tahunan Belum Rilis”, khususnya indikator yang bersumber dari hasil pengukuran tahunan dan survei nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga realisasi outcome belum sepenuhnya dapat tergambarkan secara komprehensif.

Dari keseluruhan indikator yang dievaluasi, indikator yang telah memiliki capaian sementara baru Kapasitas Air Baku (m^3/kapita) dengan realisasi sebesar 0,124 m^3/kapita dari target 1,18 m^3/kapita atau mencapai 28,41% dengan kategori “Sangat Rendah”. Rendahnya capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kapasitas air baku masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air, kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, serta proses pelaksanaan kegiatan fisik yang umumnya baru berjalan pada semester berikutnya. Selain itu, faktor kondisi hidrologi dan ketersediaan sumber air di beberapa wilayah juga turut mempengaruhi pencapaian target kapasitas air baku daerah.

Sementara itu, sebagian besar indikator lainnya seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Risiko Bencana, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, serta Indeks Ketahanan Daerah masih menunggu hasil pengukuran dan rilis data tahunan. Oleh karena itu, capaian indikator-indikator tersebut belum dapat dibandingkan secara penuh terhadap target tahun 2026.

Secara umum, pelaksanaan IKD pada Aspek Geografi dan Demografi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 masih menunjukkan capaian yang relatif rendah karena sebagian besar indikator bersifat outcome tahunan dan memerlukan akumulasi pelaksanaan program selama satu tahun anggaran. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan percepatan pelaksanaan program prioritas, khususnya pada sektor penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana, dan pengendalian perubahan iklim. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar target indikator pada akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Daerah Aspek Geografi dan Demografi Triwulan I Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**												
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	**73,05**	**83,58**	**NA**	**NA**	**-**	84,09	84,6	85,11	85,62	Dinas KPTPH	Capaian Tahunan Belum Rilis
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**	%	**10,62**	**7,56**	**NA**	**NA**	**-**	6,63	5,69	4,75	3,81	Dinas KPTPH	Capaian Tahunan Belum Rilis
3	Kapasitas Air Baku (m3/kapita)**	m3/kapita	**0,125**	**1,18**	**0,124**	**28,41%**	**Sangat Rendah**	1,92	2,66	3,41	4	Dinas PSDA	-
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **	%	**4,46**	**21,29**	**NA**	**NA**	**-**	23,86	25,43	29	31,57	Dinas PKPCK	Capaian Tahunan Belum Rilis
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	**73,81**	**71,2**	**NA**	**NA**	**-**	71,41	71,63	71,84	72.05	DLH	Capaian Tahunan Belum Rilis
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	**2,35**	**6,8**	**NA**	**NA**	**-**	8,6	10,4	12,2	15	Dinas PKPCK	Capaian Tahunan Belum Rilis
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	%	**3,1**	**28**	**NA**	**NA**	**-**	31	34	38	42	DLH	Capaian Tahunan Belum Rilis
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah**	%	**15,9**	**17,88**	**NA**	**NA**	**-**	21,3	24,73	28,14	31,57	Dinas PKPCK	Capaian Tahunan Belum Rilis
9.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**	%	**17,11**	**9,95**	**NA**	**NA**	**-**	10,47	11,07	11,66	12,3	Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda	Capaian Tahunan Belum Rilis
	a. Kumulatif**				**NA**	**NA**	**-**						Capaian Tahunan Belum Rilis

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
	b. Tahunan**	%	**34,31**	**17,14**	**NA**	**NA**	**-**	19,55	22,66	23,02	25,3		Capaian Tahunan Belum Rilis
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	**124,59**	**127,94-128,94**	**NA**	**NA**	**-**	125,91-127,91	123,88-126,88	121,85-125,86	119,82-124,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Capaian Tahunan Belum Rilis
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	angka	**-**	**0,546**	**NA**	**NA**	**-**	0,554	0,564	0,576	0,588	Dinas LH, Dinas Kehutanan, DKP, KPTPH	Capaian Tahunan Belum Rilis
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	**0,54**	**0,54**	**NA**	**NA**	**-**	0,6	0,66	0,72	0,78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Capaian Tahunan Belum Rilis
Total						**28,41%**							

2.1.5. Capaian Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari **30 indikator** dengan rata-rata capaian sebesar 87,52%. Berdasarkan hasil evaluasi sementara Triwulan I, terdapat sejumlah indikator yang telah menunjukkan capaian sangat baik bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, sebagian besar indikator lainnya masih berstatus "Capaian Tahunan Belum Rilis" karena pengukurannya dilakukan secara tahunan dan menunggu publikasi data resmi dari instansi terkait, terutama indikator yang bersumber dari survei dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian, maupun perangkat daerah pengampu. Indikator yang telah mencapai dan melampaui target dengan kategori kinerja "Sangat Tinggi" antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian 101,45%.
2. Tingkat Kemiskinan dengan capaian 102,48%.
3. Indeks Keluarga Sehat dengan capaian 93,10%.
4. Angka Kematian Ibu dengan capaian 128,35%.
5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) sebesar 94,73%.
6. Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 95,69%.
7. Indeks Perlindungan Anak dengan capaian 105,36%.
8. Indeks Ketimpangan Gender dengan capaian 110,71%.
9. Indeks Pembangunan Gender dengan capaian 100,90%.
10. Indeks Pembangunan Pemuda dengan capaian 103,71%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pada sektor ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan pemuda telah menunjukkan hasil yang positif pada awal tahun pelaksanaan RKPD. Pertumbuhan ekonomi yang mampu melampaui target mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu,

penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang mulai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada sektor kesehatan, tingginya capaian indikator kesehatan ibu, keberhasilan pengobatan tuberkulosis, serta cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional mencerminkan semakin baiknya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan berada pada kategori "Sedang" maupun "Sangat Rendah". Indikator tersebut antara lain:

- Prevalensi Stunting dengan capaian 74% kategori "Sedang".
- Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) sebesar 15,69% kategori "Sangat Rendah".
- Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana sebesar 11,62% kategori "Sangat Rendah".

Selain itu, sejumlah indikator strategis lainnya seperti PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia, Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi, Angka Numerasi, Indeks Pembangunan Kebudayaan, hingga Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih menunggu rilis capaian tahunan sehingga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh pada Triwulan I.

Secara umum, indikator yang belum mencapai target didominasi oleh sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, khususnya terkait penanganan stunting, penemuan kasus tuberkulosis, serta implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat. Rendahnya cakupan penemuan kasus tuberkulosis antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya deteksi dini dan pelaporan kasus di masyarakat. Sementara itu, capaian prevalensi stunting yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa intervensi penurunan stunting masih perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas gizi masyarakat, perbaikan sanitasi, serta edukasi kesehatan ibu dan

anak. Adapun rendahnya persentase kebijakan urusan kesejahteraan rakyat yang terlaksana disebabkan sebagian besar program dan kegiatan masih dalam tahap awal pelaksanaan pada Triwulan I.

Tabel 2.7 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026

N0	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**												
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	**5,28**	**5,5**	**5,58**	**101,45 %**	**Sangat Tinggi**	6	6,4	6,8	7,2	BPS	-
2	Tingkat Kemiskinan**	%	**9,66**	**8,79-9,90**	**9,66**	**102,48 %**	**Sangat Tinggi**	7,79-8,79	6,79-7,79	5,79-6,79	5,00-5,79	Dinsos, BPS	-
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	**55,01**	**60,1**	**NA**	**NA**	**-**	65,3	70,3	75,5	80,6	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll	Capaian Tahunan Belum Rilis
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	**4,14**	**3,51-3,95**	**NA**	**NA**	**-**	3,4-3,85	3,30-3,80	3,25-3,73	3,10-3,70	BPS, Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis
5	Indeks Gini	Angka	**0,287**	**0,274 - 0,280**	**NA**	**NA**	**-**		0,272 - 0,277	0,271 - 0,275	0,270 - 0,275	BPS	Capaian Tahunan Belum Rilis
6	Indeks Modal Manusia	Angka	**0,52**	**0,55**	**NA**	**NA**	**-**	0,56	0,57	0,58	0,59	BPS	Capaian Tahunan Belum Rilis
7	Usia Harapan Hidup**	Tahun	**74,71**	**74,8**	**NA**	**NA**	**-**	75	75,25	75,45	75,65	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH	Capaian Tahunan Belum Rilis
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	**0,27**	**0,29**	**0,27**	**93,10%**	**Sangat Tinggi**	0,31	0,33	0,35	0,37	Dinkes	-
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**	Angka	**65,95**	**109**	**78,09**	**128,35 %**	**Sangat Tinggi**	97	86	77	75	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH	-
9	Prevalensi Stunting**	%	**14,9**	**12,62**	**15,9**	**74%**	**Sedang**	11,77	11,3	10,83	10,36	Dinkes	-

N0	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	**131**	**90**	**NA**	**NA**	**-**	90	90	90	90	Dinkes	Capaian Tahunan Belum Rilis
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	%	**65**	**72**	**11,3**	**15,69%**	**Sangat Rendah**		78	80	85	Dinas Kesehatan	-
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**	%	**89,95**	**95**	**90**	**94,73%**	**Sangat Tinggi**	96	96	97	97	Dinas Kesehatan, RSAM, RSBNH	-
11	a) Cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (%)**	%	**71,04**	**72**	**68,9**	**95,69%**	**Sangat Tinggi**	74	76	78	80	Dinas Kesehatan	-
	b) Cakupan Kepesertaa,n Jaminan Kesehatan Nasional	%	**95,59**	**98,68**	**NA**	**NA**	**-**	98,76	98,84	98,92	99	Dinas Kesehatan	-
12	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	**8,61**	**8,55-8,60**	**NA**	**NA**	**-**	8,65-8,70	8,75-8,80	8,85-8,90	8,95-9,00	Disdikbud	Capaian Tahunan Belum Rilis
13	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	**12,79**	**12,83-12,85**	**NA**	**NA**	**-**	12,85-12,87	12,88-12,90	12,90-12,94	12,95-13,01	Disdikbud	Capaian Tahunan Belum Rilis
14	Angka Literasi **	%	**68,92**	**70,12**	**NA**	**NA**	**-**	71,1	72	72,98	73,96	Disdikbud	Capaian Tahunan Belum Rilis

N0	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
	Angka Numerasi**		**58,82**	**68,53**	**NA**	**NA**	**-**	71,73	74,03	76,33	78,63		Capaian Tahunan Belum Rilis
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:**	%	**68,51**	**32,2**	**NA**	**NA**	**-**	34,3	36,3	38,2	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Capaian Tahunan Belum Rilis
	- Literasi membaca				**NA**	**NA**	**-**						Capaian Tahunan Belum Rilis
	- Numerasi		**66,32**	**22,2**	**NA**	**NA**	**-**	24,3	26,2	28,2	30		Capaian Tahunan Belum Rilis
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)**	%	**-**	**8,08**	**NA**	**NA**	**-**	8,39	8,7	9,01	9,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Capaian Tahunan Belum Rilis
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	%	**68,79**	**73,06**	**NA**	**NA**	**-**	73,71	74,35	75	75,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis

N0	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	**32,3**	**69.03**	**NA**	**NA**	**-**	72.79	75.55	78.81	82,07	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Capaian Tahunan Belum Rilis
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)**	%	**-**	**24**	**NA**	**NA**	**-**	26	28	30	32	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial	Capaian Tahunan Belum Rilis
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	**26,68**	**45,53**	**NA**	**NA**	**-**	48,63	51,79	55,05	58,35	BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	**74,04**	**74,7**	**NA**	**NA**	**-**	75,08	75,45	75,82	75,9	Kemenag	Capaian Tahunan Belum Rilis
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Angka	**57,82**	**59,7**	**NA**	**NA**	**-**	60,28	60,87	61,45	61,8	Disdikbud	Capaian Tahunan Belum Rilis
24	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	**64,78**	**67,94**	**71,58**	**105,36 %**	**Sangat Tinggi**	69,66	71,38	72,1	74,64	Dinas PPPA	Data Tahun 2024
25	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	**0,399**	**0,395**	**0,375**	**110,71 %**	**Sangat Tinggi**	0,39	0,385	0,38	0,375	Dinas PPPA	Data Tahun 2025
26	Indeks Pembangunan Gender	Angka	**90,93**	**91,08**	**91,9**	**100,90 %**	**Sangat Tinggi**	91,18	91,3	91,4	91,5	Dinas PPPA	-
27	Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	**53,17**	**53.68**	**55,67**	**103,71 %**	**Sangat Tinggi**	53.85	54.02	54.19	54,36	Dispora	Data Tahun 2024
28	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	**-**	**100**	**NA**	**NA**	**-**	100	100	100	100	Badan Kesbangpol	Capaian Tahunan Belum Rilis

N0	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kritera						
29	Ketahanan Sosial Budaya	%	-	**83,8**	**NA**	**NA**	-	84,4	85,7	87	88,3	Badan Kesbangpol	Capaian Tahunan Belum Rilis
30	Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana	%	**100**	**100**	**11,62**	**11,62%**	**Sangat Rendah**	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat	-
Total						**87,52%**							

2.1.6. Capaian Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung pada Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari **33 indikator** dengan rata-rata capaian sebesar 110,30%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I, beberapa indikator telah menunjukkan capaian yang sangat baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, sebagian besar indikator lainnya masih berstatus "Capaian Tahunan Belum Rilis" karena pengukurannya dilakukan secara tahunan dan masih menunggu publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), OJK, Bank Indonesia, maupun perangkat daerah pengampu terkait.

Indikator yang telah mencapai dan melampaui target dengan kategori kinerja "Sangat Tinggi" antara lain:

1. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan capaian 137,04%.
2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan capaian 197,01%.
3. Rasio Kewirausahaan Daerah dengan capaian 124,57%.
4. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer dengan capaian 99,23%.
5. Tingkat Inflasi dengan capaian 178,8%.
6. Persentase BUMD Berkinerja Sehat dengan capaian 100%.
7. Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan capaian 103,57%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah pada aspek ekonomi kerakyatan, stabilitas ekonomi daerah, pengembangan kewirausahaan, transisi energi, serta tata kelola BUMD menunjukkan perkembangan yang cukup positif pada Triwulan I. Tingginya capaian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan rasio kewirausahaan daerah mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis usaha mikro, kecil, dan koperasi. Selain itu, stabilitas inflasi daerah yang terjaga juga menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan koordinasi Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga komoditas strategis. Pada sektor energi, tingginya porsi EBT dalam bauran energi primer mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pengembangan energi berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan berada pada kategori "Sangat Rendah", antara lain:

- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) dengan capaian 22,50%.
- *Return on Asset* (ROA) BUMD dengan capaian 23,24%.

Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Triwulan I dipengaruhi oleh belum optimalnya pemulihan sektor pariwisata, keterbatasan konektivitas dan promosi wisata internasional, serta masih rendahnya tingkat kunjungan wisata pada awal tahun. Sementara itu, rendahnya Return on Asset (ROA) BUMD menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas BUMD masih belum optimal, baik akibat belum maksimalnya pemanfaatan aset maupun masih terbatasnya kontribusi pendapatan usaha pada awal tahun anggaran.

Selain indikator yang telah memiliki capaian, sebagian besar indikator strategis lainnya seperti Angka Ketergantungan, Rasio PDRB Industri Pengolahan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Inklusi Keuangan, hingga indikator sektor keuangan daerah dan investasi masih menunggu rilis capaian tahunan sehingga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh pada Triwulan I.

Secara umum, capaian IKD Aspek Daya Saing Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan koperasi dan UMKM, stabilitas inflasi, penguatan sektor energi terbarukan, serta tata kelola BUMD. Namun demikian, masih diperlukan upaya percepatan pada sektor

pariwisata, optimalisasi kinerja BUMD, peningkatan investasi, penguatan daya saing industri, serta pengembangan inovasi daerah guna mendukung peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pelaksanaan program strategis agar target pembangunan daerah pada akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.8 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Daerah Triwulan I Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**												
1	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	%	**NA**	**47**	**NA**	**NA**	**-**	46,62	46,28	45,94	45,6	BPS	Capaian Tahunan Belum Rilis
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	**19,11**	**19,15**	**NA**	**NA**	**-**	19,35	19,55	19,87	20,1	BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Capaian Tahunan Belum Rilis
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	**1,64**	**1,65**	**NA**	**NA**	**-**	1,7	1,75	1,8	1,9	BPS, Disparekraf	Capaian Tahunan Belum Rilis
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	**8,6**	**8**	**1.8***	**22,50%**	**Sangat Rendah**	9,5	11	12,5	14	BPS/Disparekraf	-
5	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	**5,91**	**0,62**	**NA**	**NA**	**-**	0,71	0,82	0,94	1,09	BPS, Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan	Capaian Tahunan Belum Rilis
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**-**	NA	NA	NA	NA	BPS/Disparekraf	Capaian Tahunan Belum Rilis
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**	%	**3,7**	**2,7**	**3,7**	**137,04%**	**Sangat Tinggi**	2,73	2,76	2,8	2,83	Dinas Koperasi dan UKM	-
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)**	%	**95,47**	**99,57**	**NA**	**NA**	**-**	99,59	99,61	99,63	99,65	Dinas Perindag	Capaian Tahunan Belum Rilis

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	%	**1,22**	**0,67**	**1,32**	**197,01%**	**Sangat Tinggi**	0,68	0,69	0,7	0,71	Dinas Koperasi dan UKM	-
9	Rasio Kewirausahaan Daerah**	%	**3,65**	**2,93**	**3,65**	**124,57%**	**Sangat Tinggi**	2,96	3	3,03	3,06	Dinas Koperasi dan UKM	-
10	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	**1,84**	**4,11**	**0,955**	**23,24%**	**Sangat Rendah**	4,17	4,22	4,28	4,33	Biro Perekonomian	-
11	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**	%	**30,88**	**33**	**NA**	**NA**	**-**	34	35	36	37	Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	**70,44**	**70,7**	**NA**	**NA**	**-**	70,8	70,9	71	71,1	Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	**53,85**	**56,24**	**NA**	**NA**	**-**	57,08	58	58,89	59,5	Dinas PPPA, Dinas Tenaga Kerja	Capaian Tahunan Belum Rilis
14	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	**52,89**	**65,9**	**NA**	**NA**	**-**	66,1	66,3	66,5	66,7	Balitbangda	Capaian Tahunan Belum Rilis
15	Indeks Ekonomi Hijau**	Angka	**NA**	**51,81**	**NA**	**NA**	**-**	54,11	56,61	58,65	59,34	Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas KPTH, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	Capaian Tahunan Belum Rilis
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	**36,32**	**36,6**	**36,32**	**99,23%**	**Sangat Tinggi**	37	37,4	37,8	38,2	Dinas ESDM, Perkebunan, KPTPH, Peternakan	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	**5,91**	**6,09**	**NA**	**NA**	**-**	6,33	6,57	6,8	7,04	Dinas Kominfo	Capaian Tahunan Belum Rilis
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi**	Nilai	**6,74**	**8,75**	**NA**	**NA**	**-**	8,35	8	7,65	7,25	Dinas Perindustrian dan Perdaga ngan	Capaian Tahunan Belum Rilis
19	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	**5,28**	**2,78**	**NA**	**NA**	**-**	3,28	3,78	4,28	4,78	BPS/DPM PTSP	Capaian Tahunan Belum Rilis
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	**66,13**	**70,192**	**NA**	**NA**	**-**	71,434	72,676	73,918	75,16	Dinas PKPCK	Capaian Tahunan Belum Rilis
21	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Angka	**69,39**	**68,83**	**NA**	**NA**	**-**	69,33	70,83	71,33	73,33	Inspektorat	Capaian Tahunan Belum Rilis
22	Persentase Desa Mandiri	%	**22,85**	**23,96**	**NA**	**NA**	**-**	24,37	24,98	25,22	25,45	Dinas PMDT	Capaian Tahunan Belum Rilis
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	**0,39**	**1,19**	**NA**	**NA**	**-**	1,19	1,19	1,19	1,19	BPKAD	Capaian Tahunan Belum Rilis
24	Tingkat Inflasi**	%	**1,25**	**2,5 ± 1**	**0,53**	**178,8%**	**Sangat Tinggi**	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	Biro Perekonomian	-
25	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**	%	**9,17**	**12,9**	**NA**	**NA**	**-**	13,2	13,7	14,03	14,03	BI/OJK/Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis
26	Aset Dana Pensiun/PDRB**	%	**8,48**	**0,04**	**NA**	**NA**	**-**	0,04	0,04	0,05	0,05	BI/OJK/Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
27	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi**	Juta Rupiah	**36,55**	**1,85**	**NA**	**NA**	**-**	1,95	2,1	2,2	2,3	BI/OJK/Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis
28	Total Kredit/PDRB**	%	**16,2 (84,88 T)**	**15,5**	**NA**	**NA**	**-**	16	17	18,11	18,5	BI/OJK/Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis
29	Inklusi Keuangan**	%	**85,5**	**86,5**	**NA**	**NA**	**-**	87,5	88,43	89,3	91,35	BI/OJK/Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis
30	Persentase BUMD Berkinerja Sehat	%	**67**	**100**	**100**	**100%**	**Sangat Tinggi**	100	100	100	100	Biro Perekonomian	-
31	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal;	Angka	**107.771**	**114.793**	**NA**	**NA**	**-**	115.014	115.225	115.405	115.584	Dinas Perindag	Capaian Tahunan Belum Rilis
32	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	**1,71**	**1,78**	**NA**	**NA**	**-**	1,86	1,97	2,08	2,25	Biro Perekonomian	Capaian Tahunan Belum Rilis
33	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	**NA**	**0,56**	**0,58**	**103,57**	**Sangat Tinggi**	0,59	0,62	0,65	0,68	Biro Kesra	-
Total						**110,30%**							

2.1.7. Capaian Aspek Pelayanan Umum

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung pada Aspek Pelayanan Umum Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari **10 indikator** utama beserta beberapa indikator turunan pelayanan perangkat daerah dengan rata-rata capaian sebesar 87,66%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I, sebagian indikator telah menunjukkan capaian yang sangat baik dan mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, beberapa indikator lainnya masih menunggu rilis capaian tahunan karena pengukurannya dilakukan secara periodik tahunan oleh kementerian/lembaga maupun perangkat daerah pengampu.

Indikator yang telah mencapai dan melampaui target dengan kategori kinerja "Sangat Tinggi" antara lain:

1. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 95,23%.
2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dengan capaian 97,05%.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,59%.
4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah dengan capaian 92,05%.
5. Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan dengan capaian 91,19%.
6. Indeks Kepuasan Pelayanan DPMPTSP dengan capaian 112,50%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Tingginya nilai Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan, kemudahan akses layanan, serta upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, tingginya persepsi rasa aman masyarakat menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat relatif terjaga dengan baik. Pada

sektor pelayanan perizinan dan transportasi, capaian indeks kepuasan pelayanan juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas layanan publik mulai memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang belum mencapai target dan berada pada kategori "Sangat Rendah", yaitu Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan dengan capaian sebesar 25%. Rendahnya capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada Triwulan I masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya pelaksanaan operasi penegakan perda pada awal tahun, penyesuaian jadwal kegiatan, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta proses koordinasi lintas instansi yang masih memerlukan penguatan.

Sementara itu, beberapa indikator strategis lainnya seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Daya Saing Daerah, serta beberapa indikator survei kepuasan pelayanan pada perangkat daerah tertentu masih menunggu rilis data tahunan sehingga belum dapat dievaluasi secara menyeluruh pada Triwulan I.

Secara umum, capaian IKD Aspek Pelayanan Umum sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada dimensi pelayanan publik, kepuasan masyarakat, keamanan lingkungan, dan kualitas pelayanan perizinan. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu memperkuat implementasi reformasi birokrasi, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Selain itu, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sejak awal tahun juga diperlukan agar indikator yang masih rendah dapat mencapai target pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.9 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Triwulan I Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2025				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**												
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	**100**	**87,8**	**NA**	**NA**	**-**	88	88,3	88,5	88,7	Biro Hukum	Capaian Tahunan Belum Rilis
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	**4,15**	**4,2**	**NA**	**NA**	**-**	4,3	4,4	4,5	4,6	Dinas Kominfo	Capaian Tahunan Belum Rilis
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	**4,19**	**4,4**	**4,19**	**95,23%**	**Sangat Tinggi**	4,45	4,5	4,6	4,6	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNH	**-**
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	%	**84**	**83**	**25**	**25%**	**Sangat Rendah**	84	85	86	87	SatPol PP	**-**
5	Persentase Capaian Aksi HAM**	%	**NA**	**78**	**NA**	**NA**	**-**	78	80	80	85	Badan Kesbangpol	Capaian Tahunan Belum Rilis
6	Indeks Demokrasi Indonesia**	Angka	**72,62**	**80,5**	**NA**	**NA**	**-**	80,5	81,5	81,5	82,5	Badan Kesbangpol	Capaian Tahunan Belum Rilis
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	Angka	**73**	**73,5**	**71,07**	**97,05%**	**Sangat Tinggi**	74	74,5	75	75,5	Satpol PP	**-**
8	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	**3.50**	**3,48**	**NA**	**NA**	**-**	3,49	3,5	3,51	3,52	Balitbangda	Capaian Tahunan Belum Rilis

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2025				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU	KETERANGAN
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria						
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/Nilai	**87,51**	**87**	**87,51**	**100,59%**	**Sangat Tinggi**	87,5	88	88,5	89	Biro Organisasi	-
10	Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	**82,7**	**83,5**	**NA**	**NA**	-	84,25	84,5	85	85,25	Badan Penghubung	Capaian Tahunan Belum Rilis
		%	**80,06**	**89,9**	**82,75**	**92,05%**	**Sangat Tinggi**	90	90,1	90,2	90,3	BAPENDA	-
		%	**80,55**	**84**	**NA**	**NA**	-	86	88	90	92	RSUAM	Capaian Tahunan Belum Rilis
		%	**89,9**	**89,75**	**NA**	**NA**	-	90	90,25	90,5	91	RSJ	Capaian Tahunan Belum Rilis
		Indeks	**88,8**	**87,6**	**79,88**	**91,19%**	**Sangat Tinggi**	87,7	87,8	87,9	88	Dinas Perhubungan	-
		Indeks	**3,56**	**3,44**	**3,87**	**112,50%**	**Sangat Tinggi**	3,44	3,46	3,46	3,46	PMPTSP	-
Total						**87,66%**							

2.1.8. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari **114 indikator** yang mencakup **urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang masih belum melampaui target yang telah ditetapkan. Secara umum, sebagian indikator menunjukkan capaian yang sangat baik dengan kategori Sangat Tinggi, namun masih terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah, serta sejumlah indikator yang capaian tahunannya belum dirilis karena masih menunggu proses pengumpulan dan verifikasi data oleh perangkat daerah pengampu maupun lembaga penyedia data.

Pada **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sektor pendidikan**, capaian indikator sebagian besar masih menunggu rilis tahunan. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus belum memiliki realisasi Triwulan I Tahun 2026. Meskipun demikian, target yang ditetapkan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan menengah dan pendidikan inklusif di Provinsi Lampung.

Pada **sektor kesehatan**, beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Prevalensi wasting tercatat sebesar 2,49 persen dari target 6,5 persen dengan capaian 161,69 persen dan kategori Sangat Tinggi. Angka Kematian Ibu mencapai 78,09 per 100.000 kelahiran hidup dari target 109 dengan capaian 128,35 persen, sedangkan Angka Kematian Bayi mencapai 11,29 per 1.000 kelahiran hidup dari target 11,63 dengan capaian 102,92 persen. Selain itu, cakupan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 68,9 persen dari target 72 persen dengan capaian 95,69 persen dan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian, indikator Notifikasi Kasus Tuberkulosis masih sangat rendah, yaitu sebesar 9,3 persen dari target 90 persen dengan capaian hanya 10,30 persen. Kondisi ini

dipengaruhi oleh masih rendahnya penemuan kasus aktif di masyarakat, keterbatasan pelaporan fasilitas kesehatan, serta belum optimalnya skrining dan pelacakan kontak penderita tuberkulosis.

Pada **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, indikator perlindungan kawasan permukiman rawan banjir mencapai 123,93 persen dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir ROB mencapai 91,36 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Persentase luas layanan irigasi multi komoditas juga mencapai target 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah kewenangan provinsi. Sementara itu, indikator tingkat kemantapan jalan dan kesesuaian pemanfaatan ruang masih menunggu rilis capaian tahunan.

Pada **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**, sebagian besar indikator belum memiliki realisasi Triwulan I Tahun 2026. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam peningkatan akses air minum aman dan sanitasi aman, mengingat target indikator pada tahun berjalan relatif tinggi dibandingkan kondisi eksisting. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dasar permukiman, kebutuhan investasi yang besar, serta belum meratanya pelayanan di wilayah perdesaan dan kawasan terpencil.

Pada **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**, indikator Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas mencapai 20,75 persen dari target 83 persen dengan capaian 21 persen dan kategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian Triwulan I dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar terjadwal pada semester berikutnya, termasuk operasi penegakan perda dan kegiatan ketenteraman masyarakat yang bersifat periodik.

Pada **Urusan Sosial**, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kewenangan provinsi yang tertangani mencapai 5,55 persen dari target 19,93 persen dengan capaian 27,84 persen dan kategori Sangat Rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan pelayanan sosial, proses verifikasi dan

validasi data penerima manfaat, serta keterbatasan kapasitas pendampingan sosial pada awal tahun anggaran.

Pada **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, beberapa indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Indeks Perlindungan Khusus Anak mencapai 108,79 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 96,10 persen dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan rasio konektivitas transportasi mencapai 110,91 persen dan persentase perlengkapan jalan mencapai 97,77 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan juga mencapai 100,85 persen dengan kategori Sangat Tinggi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dengan capaian sangat rendah, antara lain persentase pemanfaatan data kependudukan yang hanya mencapai 38,54 persen. Selain itu, beberapa indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti layanan korban kekerasan, layanan anak memerlukan perlindungan khusus, dan pemanfaatan data gender baru mencapai 25 persen dari target tahunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program yang masih berlangsung bertahap serta belum optimalnya integrasi layanan dan pelaporan lintas sektor pada Triwulan I.

Pada **Urusan Pemerintahan Pilihan**, **sektor pariwisata** menunjukkan capaian yang beragam. Jumlah wisatawan mencapai 4,21 juta orang dari target 21,65 juta orang dengan capaian 14,03 persen dan kategori Sangat Rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya kunjungan wisata pada awal tahun serta masih terbatasnya penyelenggaraan event pariwisata berskala besar pada Triwulan I. Namun demikian, rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 90,71 persen dari target dan berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menunjukkan kualitas kunjungan wisatawan relatif baik.

Pada **sektor pertanian dan peternakan**, indikator peningkatan produksi komoditas peternakan mencapai 19,35 persen dari target 1,72 persen dengan capaian 1.724 persen dan kategori Sangat Tinggi. Tingkat pengendalian Penyakit

Hewan Menular Strategis (PHMS) mencapai 109,43 persen, sedangkan jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat NKV mencapai 125,58 persen. Capaian tersebut menunjukkan penguatan sektor peternakan dan kesehatan hewan berjalan efektif pada awal tahun 2026. Namun demikian, jumlah produksi komoditas perkebunan baru mencapai 15,74 persen dari target tahunan dan nilai transaksi ekonomi sektor kehutanan mencapai 12,81 persen dengan kategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor musim panen, fluktuasi harga komoditas, serta proses produksi yang belum mencapai puncak pada Triwulan I.

Pada **Unsur Pendukung, Penunjang, dan Pengawasan**, beberapa indikator menunjukkan capaian sangat baik. Nilai Kematangan Organisasi Daerah mencapai 112,60 persen dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan nilai SAKIP pada komponen pelaporan mencapai 102,98 persen. Selain itu, Indeks Perencanaan Pembangunan mencapai 102,86 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung masing-masing mencapai 97,78 persen dan 97,04 persen dengan kategori Sangat Tinggi.

Namun demikian, indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada kategori Sangat Rendah dengan capaian 36,44 persen. Realisasi PAD pada Triwulan I masih dipengaruhi oleh belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada awal tahun anggaran serta dinamika kondisi ekonomi regional. Selain itu, Persentase Layanan Internal Sekretariat Daerah yang dilaksanakan sesuai SOP hanya mencapai 24,58 persen dan berada pada kategori Sangat Rendah, yang dipengaruhi oleh proses penyesuaian pelaksanaan administrasi dan penguatan tata kelola internal perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian IKK Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada sektor kesehatan, pekerjaan umum, peternakan, tata kelola pemerintahan, dan perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, masih diperlukan

percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa sektor yang capaian kinerjanya masih rendah, khususnya pada sektor sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pariwisata, pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan PAD daerah. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pelaksanaan program pada semester berikutnya, serta percepatan realisasi kegiatan strategis diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator pada akhir Tahun 2026.

Tabel 2.10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
	Pendidikan											
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	%	**75,35**	**73,63**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	74,28	74,92	75,56	76,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayan
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus	%	**56,51**	**70,92**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	72,01	73,1	74,19	75,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayan
	Kesehatan											
1	Prevalensi Wasting	%	**6,8**	**6,5**	**2,49**	**161,69%**	**Sangat Tinggi**	6	5,5	5	4,7	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	**65,95**	**109**	**78,09**	**128,35%**	**Sangat Tinggi**	97	86	77	75	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	**5,53**	**11,63**	**11,29**	**102,92%**	**Sangat Tinggi**	10,97	10,46	9,96	9,46	Dinas Kesehatan
4	Notifikasi Kasus Tuberkulosis	%	**65**	**90**	**9,3**	**10,30%**	**Sangat Rendah**	90	90	90	90	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
5	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	**71,04**	**72**	**68,9**	**95,69%**	**Sangat Tinggi**	74	76	78	80	Dinas Kesehatan
6	Laju Kematian/Net Death Rate	%	**29**	**26**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	25	24	23	22	RSUD Abdul Moeloek
7	Readmission Rate (Tingkat Rawat Inap Ulang)	%	**9,26**	**6,7**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	6,6	6,5	6,4	6,3	RS Jiwa Daerah
8	Layanan spesialis	Persen		**60**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	70	80	90	100	RS Bandar Negara Husada
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	persen	**40**	**43**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	45	47	49	51	PKPCK
2	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	**NA**		**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**					PKPCK
3	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai standar kebutuhan	Persen	**100**	**100**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100	100	100	100	PKPCK
4	Tingkat kemantapan jalan	persen	**79,79**	**80,88**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	82,33	84,75	87,95	91,79	BMBK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029											
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (pada WS kewenangan provinsi)	persen	**31,91**	**24,99**	**31,91**	**123,93%**	**Sangat Tinggi**	25,35	25,7	26,06	26,42	PSDA
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir ROB pada WS kewenangan provinsi	persen	**24,86**	**27,21**	**24,86**	**91,36%**	**Sangat Tinggi**	28,45	29,68	30,92	32,16	PSDA
7	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas (pada DI kewenangan provinsi)	persen	**71**	**71**	**71**	**100%**	**Sangat Tinggi**	72	73	74	75	PSDA
	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	persen	**1,59**	**4**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	6	8	10	12	PKPCK
2	Persentase Rumah tidak Layak huni yang tertangani	persen	**66,13**	**66,62**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	66,95	67,28	67,61	67,95	PKPCK
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses air minum Aman	persen	**12,51**	**10,2**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	10,56	10,92	11,28	11,64	PKPCK
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses sanitasi Aman	persen	**1,84**	**2,66**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	2,83	3	3,17	3,34	PKPCK
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	**82**	**83**	**20,75**	**21%**	**Sangat Rendah**	84	85	86	87	Satpol PP
	Sosial											
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	%	**19,37**	**19,93**	**5,55**	**27,84%**	**Sangat Rendah**	20,04	20,14	20,15	20,15	Dinas Sosial
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
	Tenaga Kerja											
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	**95,79**	**96,14**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	96,49	96,62	96,8	96,9	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Perusahaan yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan	%	**26,68**	**38**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	42	46	50	54	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	**5**	**5,8**	**5**	**86,21%**	**Tinggi**	5,9	6	6,1	6,2	Dinas PPPA
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensin	%	**100**	**100**	**25**	**25%**	**Sangat Rendah**	100	100	100	100	Dinas PPPA
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	%	**100**	**100**	**25**	**25%**	**Sangat Rendah**	100	100	100	100	Dinas PPPA

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	Gender dan Hak Anak Sesuai Standar											
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	**100**	**100**	**25**	**25%**	**Sangat Rendah**	100	100	100	100	Dinas PPPA
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	**100**	**100**	**25**	**25%**	**Sangat Rendah**	100	100	100	100	Dinas PPPA
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	**83,27**	**76,54**	**83,27**	**108,79%**	**Sangat Tinggi**	76,94	77,44	77,85	78,24	Dinas PPPA
	Pangan											
1	Skor Pola Pangan Harapan	%	**93,10**	**92,8**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	93	93,2	93,4	93,6	Dinas KPTPH
	Lingkungan Hidup											
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	persen	**49,81**	**9,47**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	10,06	10,64	11,24		DLH, PKPCK
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	persen	**80**	**95**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	96	97	98	99	DLH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	persen	**106,80**	**82,05**	**89,37**	**96,10%**	**Sangat Tinggi**	93,5	94	94,5	95	Disdukcapil
2	Persentase pemanfaatan data kependudukan	persen	**89,74**	**89,74**	**34,58**	**38,54%**	**Sangat Rendah**	92,31	94,87	97,43	100	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Persentase Desa Mandiri	persen	**22,85**	**23,96**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	24.37	24,98	25,22	25	Dinas PMDt
2	Persentase BUMDes Maju	persen	**NA**	**2,88**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	3,5	4,12	4,74	5,36	Dinas PMDt
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	Indeks	**62,9**	**66,3**	**62,9**	**94,87%**	**Sangat Tinggi**	68	69,7	71,4	73,1	Dinas PPPA
	Perhubungan											
1	Rasio Konektivitas	Rasio	**0,61**	**0,55**	**0,61**	**110,91%**	**Sangat Tinggi**	0,64	0,83	0,91	1	Dinas Perhubungan
2	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang	persen	**28,92**	**29,58**	**28,92**	**97,77%**	**Sangat Tinggi**	30,56	31,54	32,52	33,5	Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	terhadap kondisi ideal pada jalan Provinsi											
	Komunikasi dan Informatika											
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	**4,15**	**-**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Indeks	**NA**	**1,5 (Base Line)**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	1,6	1,7	1,8	1,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik/ Indeks Pembangunan dan Informasi Publik	Indeks	**83,43**	**72,25**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	72,5	72,75	73	73,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase tingkat Kematangan KeamananSiber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	**52**	**50**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	53	56	58	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	**0,84**	**1**	**2,43**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	1,2	1,4	1,6	1,8	Dinas Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal											

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029											
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
1	Nilai Realisasi Investasi	Trilyun Rupiah	**15,2 T**	**10,2 T**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	10,5 T	10,8 T	11 T	12 T	DPMPTSP
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Indeks (Skala 1-4)	**3,56**	**3,530 (Indeks)**	**3,56**	**100,85%**	**Sangat Tinggi**	3,531 (Indeks)	3,532 (Indeks)	3,540 (Indeks)	3,542 (Indeks)	DPMPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga											
1	Persentase pemuda Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan (%)	%	**7,82**	**6,98**	**15,8**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	7,28	7,58	7,88	8,18	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Lampung Yang Meraih Juara 1, 2 dan 3 pada Event - event Nasional dan Internasional	Orang	**172**	**95**	**182**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	97	99	100	110	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Sebagai Peserta dalam event-event Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Orang	**5,387**	**8000**	**5,387**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	9000	10000	12000	15000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Statistik											
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	**2,62**	**2,9**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	3,1	3,3	3,5	3,7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Persandian											

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	**473**	**50**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	53	56	58	60	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Kebudayaan											
1	Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikasi nasional	%	**85**	**94**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	95	97	99	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan											
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	**58,79**	**72**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	73,3	74,07	75,07	77,12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan											
1	Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)	Niali	**85,74**	**87,84**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	87,92	87,98	88	89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	**93,53**	**86,7**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	87.10	87,5	88,5	90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
	Kelautan dan Perikanan											

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
1	Nilai Tukar Nelayan	persen	**114,42**	**110,54**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	110,81	111,09	111,37	111,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya	persen	**93,91**	**98,06**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	98,5	98,94	99,49	100,04	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata											
1	Jumlah Wisatawan	juta orang	**27,1**	**21,65**	**4.21***	**14,03%**	**Sangat Rendah**	24,37	27,8	32,1	37,57	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	**1,31**	**1,4**	**1.27***	**90,71%**	**Sangat Tinggi**	1,5	1,6	1,7	1,8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	juta rupiah	**2,05**	**2,3**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	2,4	2,5	2,6	2,7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pertanian											
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persen	**4,86**	**1,12**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	1,14	1,16	1,18	1,2	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029											
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	**2,36**	**0,74**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	0,78	0,82	0,86	0,9	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	ton	**790.262**	**841.683**	**132.449**	**15,74%**	**Sangat Rendah**	858.516	875.687	893.200	911.064	Dinas Perkebunan
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	**5,85**	**1,72**	**19,35**	**1724%**	**Sangat Tinggi**	2,12	2,77	3,16	3,6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	**95,56**	**88**	**96,3**	**109,43%**	**Sangat Tinggi**	89	90	91	92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Jumlah	**151**	**129**	**162**	**125,58%**	**Sangat Tinggi**	141	153	165	177	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Persentase peningkatan produksi produk olahan peternakan	Persen	**3**	**2,6**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	2,7	2,8	2,9	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	Kehutanan											
1	Nilai Transaksi Ekonomi sektor Kehutanan	juta rupiah	**597.595**	**329.702**	**42.241**	**12,81%**	**Sangat Rendah**	332.999	336.329	339.693	343.090	Dinas Kehutanan
2	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	persen	**0,79**	**0,51**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	0,52	0,53	0,54	0,55	Dinas Kehutanan
	Energi dan Sumber Daya Mineral											
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer* (%)	persen	**36,32**	**36,6**	**36,32**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	37	37,4	37,8	38,2	ESDM
2	Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)**	SBM/Rp	**103,597**	**159.5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	158	156.5	155	153.5	ESDM
3	Konsumsi listrik per kapita (kWh)**	kWh	**663,7**	**712**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	745	777	810	842	ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	persen	**99,99**	**99,9**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	99,9	99,9	99,9	99,9	ESDM
	Perdagangan											
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	Persen	**14,36**	**12,1**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	12,17	12,24	12,3	12,35	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Nilai	**4,07**	**≤ 5**	**1,12**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	Perindustrian											
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	**19,11**	**19,15**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	19,35	19,55	19,87	20,1	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Transmigrasi											
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	**100**	**100**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100	100	100	100	Dinas PMDT
2	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina	100	**100**	**100**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100	100	100	100	Dinas PMDT
IV	**UNSUR PENDUKUNG**											
	Sekretariat Daerah											
1	Indeks RB Provinsi Lampung	Indeks	**82,34**	**84,5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	85,5	86,5	87,5	88,5	Sekretariat Daerah
2	Skor RB General	Nilai	**73,9**	**75**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	76	77	78	78	Sekretariat Daerah
3	Skor RB Tematik	Nilai	**8,44**	**10**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	10	11	11	11	Sekretariat Daerah
4	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Indeks	**48,42**	**43**	**48,42**	**112,60%**	**Sangat Tinggi**	44,5	46	47,5	49	Biro Organisasi
5	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan	Nilai	**12,1**	**11,75**	**12,1**	**102,98%**	**Sangat Tinggi**	12	12,25	12,5	12,75	Biro Organisasi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029											
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
6	Pencapaian Kinerja LPPD	skor	**3,05**	**Skor ≥ 2,50 - < 3,00**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Skor ≥ 2,50 - < 3,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah yang terlegitimasi.	%	**85**	**80**	**9,52**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	80	80	80	80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8	Nilai survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal pada Biro Administrasi Pimpinan	nilai	**70**	**80**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	81	82	83	84	Biro Administrasi Pimpinan
9	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasi	%	**100**	**100**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100	100	100	100	Biro Hukum
10	Persentase jumlah perkara hukum yang difasilitasi	%	**100**	**100**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100	100	100	100	Biro Hukum
11	Persentase Layanan Internal Sekretariat Daerah yang diaksanakan sesuai dengan SOP	%	**100**	**96**	**23,60**	**24,58%**	**Sangat Rendah**	97	98	99	100	Biro Umum
12	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	**72,7**	**73,5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	74	74,5	75	75,5	Biro Umum
13	Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	%	**64,58**	**74**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	76	78	80	82	Biro Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai	**80,33**	**79**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	80	81	82	83	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Sekretariat DPRD											
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	%	**27**	**45**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	50	55	60	65	Sekretariat DPRD
V	**UNSUR PENUNJANG**											
	Perencanaan											
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	**NA**	**94,5**	**97,2**	**102,86%**	**Sangat Tinggi**	95	95,5	96	96,5	Bappeda
2	Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung	nilai	**22,49**	**23**	**22,49**	**97,78%**	**Sangat Tinggi**	23,25	23,5	23,75	24	Bappeda
3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi Lampung	nilai	**18,68**	**19,25**	**18,68**	**97,04%**	**Sangat Tinggi**	19,5	19,75	20	20,25	Bappeda
	Keuangan											
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	**-4,35**	**-4,61**	**1,68**	**36,44**	**Sangat Rendah**	3,17	4,65	3,5	1,76	Bapenda
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan	%	**80,06**	**89,9**	**82,75**	**92,05**	**Sangat Tinggi**	90	90,1	90,2	90,3	Bapenda

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
3	Presentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	%	**100,00**	**100,00**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100%	100%	100%	100%	BPKAD
4	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	**66,00**	**67,00**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	68%	69%	70%	71%	BPKAD
5	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah Perundangan	%	**100,00**	**100,00**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	100%	100%	100%	100%	BPKAD
	Kepegawaian											
1	Indeks sistem merit	Nilai	**304,5**	**321,5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	334,5	366,5	405	409	BKD
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	Persen	**81,73**	**88,46**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	94,23	96,15	100	100	BKD
3	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	**61,54**	**65,38**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	65,38	80,77	96,15	99,23	BKD
4	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Persen	**50**	**62,5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	62,5	87,5	100	100	BKD
5	Persentase Pegawai Dengan SKP Bernilai Baik	Persen	**87,87**	**87,87**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	93,01	93,01	100	100	BKD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
	Pendidikan dan Pelatihan											
1	Penilaian Indeks Sistem Merit Pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Nilai	**11**	**13,5 (Baik)**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	18 (Sangat Baik)	BPSDM
	Penelitian dan Pengembangan											
1	persentase rumusan kebijakan (*policy paper*) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	Persen	**63,6**	**61**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	62	63	64	65	Balitbangda
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	**52,89**	**65,9**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	66,1	66,3	66,5	66,7	Balitbangda
VI	**UNSUR PENGAWASAN**											
	Inspektorat Daerah											
1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks	**3,2**	**3,18**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	3,19	3,2	3,21	3,22	Inspektorat
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Nilai	**16,79**	**17,05**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	17,25	17,5	17,75	18,05	Inspektorat
3	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	**69,39**	**68,83**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	69,33	70,83	71,33	73,33	Inspektorat
4	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	**3,07**	**3,08**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	3,1	3,11	3,12	3,14	Inspektorat

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029												
NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2025	2026 (s.d. Triwulan I)				2027	2028	2029	2030	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Target	Realisasi	Capaian	Kriteria/Keterangan					
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**											
	Kesatuan Bangsa dan Politik											
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	**72,62**	**80,5**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	80,5	81,5	81,5	82,5	Kesbangpol
2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	**NA**	**72**	**NA**	**NA**	**Capaian Tahunan Belum Rilis**	74	75	77	79	Kesbangpol
Total Capaian Indikator Kinerja Kunci Triwulan I Tahun 2026					**124,30%**							

2.1.9. Capaian Program Unggulan Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela periode 2025–2030 telah merumuskan arah pembangunan daerah untuk mendukung visi **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**. Program pembangunan tersebut dituangkan ke dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Unggulan yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kemantapan infrastruktur jalan guna memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Tabel 2.11 Program Unggulan Provinsi Lampung

CAPAIAN	PROGRAM UNGGULAN		FOKUS UTAMA
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	1.	Pembangunan ekonomi desa	Peningkatan kapasitas BUMDes dan koperasi
	2.	Menyediakan Pupuk Hayati Cair (PHC)	Unit produksi mikro dikelola BUMDes
	3.	Stabilitasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	Prioritaskan produk lokal
Program Unggulan	1.	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Anak sekolah & santri
	2.	Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional	Ketahanan pangan dan pertanian
	3.	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Pengembangan ekonomi hijau
	4.	Peningkatan kapasitas BUMDes dan koperasi	Peningkatan BUMdes berkembang dan maju serta koperasi yang berkualitas
	5.	Stabilitasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	Prioritaskan produk lokal
	6.	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah
	7.	Kemantapan Jalan Provinsi dan dukungan jalan di Desa	Peningkatan jalan provinsi

Sesuai tabel diatas, akan dijelaskan capaian pada masing-masing program unggulan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

1. Pembangunan Ekonomi Desa

Penguatan kapasitas BUM Desa menjadi kebutuhan strategis karena BUM Desa merupakan salah satu motor penggerak ekonomi desa yang berperan langsung dalam meningkatkan pendapatan desa, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas kelembagaan BUM Desa, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas ekonomi desa yang mendukung penguatan koperasi, UMKM, dan ekosistem ekonomi lokal lainnya secara terintegrasi.



Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan penguatan kapasitas BUM Desa sebagai bagian dari pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung melalui program Desaku Maju. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan BUM Desa mampu menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi desa secara lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan, sehingga potensi ekonomi desa dapat dioptimalkan dan pembangunan dapat didorong dari desa serta dari bawah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, dukungan pelaksanaan Prioritas Gubernur melalui Program Desaku Maju pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung masih berada pada tahap persiapan sehingga belum menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran. Kondisi tersebut disebabkan karena pelaksanaan program masih difokuskan pada tahapan penyesuaian perencanaan kegiatan, koordinasi lintas perangkat daerah, penyusunan rencana aksi, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan pada desa-desa lokus prioritas. Sebagai salah satu program strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, Program Desaku Maju diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan BUMDes, serta mendorong pembangunan yang dimulai dari desa dan dari bawah. Oleh karena itu, pada tahap awal tahun anggaran diperlukan proses sinkronisasi yang matang agar seluruh dukungan program dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga masih melaksanakan proses sinkronisasi terhadap target kegiatan, penetapan lokasi prioritas, serta penyelarasan dukungan program antar pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Desaku Maju dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Meskipun sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 realisasi kegiatan belum optimal, secara umum tahapan persiapan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai berjalan lebih optimal pada triwulan berikutnya setelah seluruh tahapan administrasi, perencanaan teknis, dan koordinasi lintas sektor selesai dilaksanakan. Dengan dukungan sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, Program Desaku Maju diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi desa di Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

2. Menyediakan Pupuk Hayati Cair (PHC)

Provinsi Lampung adalah salah satu lumbung produksi pangan nasional dengan luas panen padi mencapai sekitar 531,72 ribu hektare dan produksi mencapai lebih dari 2,7

juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024, menunjukkan peran dominan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat Lampung. Namun dalam struktur pertanian di Lampung, terdapat 264.121 unit usaha pertanian perorangan (27,21%) yang tidak menggunakan pupuk sama sekali pada 2023, yang mencerminkan rendahnya adopsi praktik pemupukan yang tepat dan potensi rendahnya kesuburan tanah di banyak lahan pertanian.

Sementara itu, penggunaan pupuk kimia secara tidak berimbang masih umum dilakukan, tanpa pelibatan pupuk organik sebagai strategi pemulihan dan peningkatan kesuburan tanah, padahal pupuk hayati cair terbukti mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan unsur hara secara alami, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa meskipun produksi pangan Lampung besar, kesuburan tanah dan keberlanjutan produktivitas masih menjadi tantangan nyata; tanpa intervensi pemupukan organik yang efektif, produktivitas lahan.



Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Desaku Maju kembali melaksanakan kegiatan Pupuk Hayati Cair (PHC) sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Menyediakan Pupuk Organik Cair (POC). Program ini diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas lahan pertanian yang semakin mengalami penurunan unsur hara akibat penggunaan pupuk dan pestisida sintetis secara berlebihan. Melalui pemanfaatan pupuk cair berbahan aktif mikroba, pemerintah daerah

berupaya mendorong pembenahan lahan berbasis hayati sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat tani dan keberlanjutan sistem pertanian di Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2026, kegiatan PHC menargetkan sebanyak 800 titik lokasi penerima bantuan yang terdiri dari kelompok tani/gabungan kelompok tani yang terdaftar di SIMLUHTAN, kelompok ekonomi petani, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, serta lembaga yang aktif dan mendapat penugasan dalam mendukung program ketahanan pangan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pupuk organik cair sekaligus memperkuat produktivitas pertanian secara lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi fisik kegiatan masih sebesar 0 persen. Namun demikian, perkembangan pelaksanaan kegiatan terus berjalan melalui tahapan pengumpulan usulan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Hingga akhir Triwulan I telah terkumpul sebanyak 884 usulan CPCL dari 15 kabupaten/kota yang saat ini masih dalam proses verifikasi dan pengumpulan berkas pendukung. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang melaksanakan proses administratif berupa persiapan Surat Keputusan penerima bantuan dan pendamping, serta persiapan proses pengadaan melalui mekanisme swakelola dan e-purchasing.

Pelaksanaan kegiatan PHC Tahun 2026 memerlukan penyesuaian dan penguatan konsep pelaksanaan agar hasil yang dicapai lebih optimal dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan monitoring terhadap lokasi bantuan tahun 2025 guna memantau perkembangan distribusi dan pemanfaatan PHC oleh masyarakat tani serta pengaplikasiannya pada lahan pertanian. Selain itu, dilakukan berbagai penyempurnaan seperti reformulasi produk agar lebih mudah diterapkan di lokasi penerima, rekomposisi untuk memastikan kualitas produksi di setiap titik bantuan, evaluasi sistem pendampingan agar pembinaan lebih terkendali, serta penyusunan konsep sub produksi guna mempermudah distribusi dan pembinaan oleh tim formulator. Sebagai bagian dari penguatan implementasi program, pemerintah juga mempersiapkan kegiatan edukasi dan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi pendamping dan penerima bantuan. Kegiatan bimbingan teknis tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan teknis. Meskipun realisasi pada Triwulan I masih belum menunjukkan capaian fisik, secara umum tahapan persiapan program berjalan sesuai perencanaan dan

diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal setelah seluruh proses administrasi dan teknis selesai dilaksanakan.

Melalui pelaksanaan Program Pupuk Hayati Cair ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dalam mendorong transformasi pertanian yang lebih berkelanjutan, memperbaiki kualitas lahan pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemberdayaan masyarakat tani berbasis desa.

3. Stabilitas Harga Pangan dan Ketersediaan Produk Lokal

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh dalam percepatan pembangunan sektor pertanian, khususnya pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura. Kesiapan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi program melalui penyelarasan program daerah dengan target swasembada pangan nasional pada 2027, termasuk optimalisasi sumber daya lokal dan pembangunan sarana prasarana. Peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern. Pengembangan pasar dengan membangun jaringan pemasaran yang terintegrasi dengan pasar nasional dan mendorong kerja sama antar provinsi serta pemberdayaan petani dengan meningkatkan kapasitas petani dan pembentukan kelompok usaha tani yang kuat.



Pada komoditas padi dan jagung, Dinas KPTPH melalui Bidang Tanaman Pangan memfokuskan upaya pada peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada, peningkatan indeks pertanaman, serta penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi. Penggunaan varietas unggul, penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian menjadi bagian penting dalam memastikan stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim.

Sementara itu, pada komoditas hortikultura, kesiapan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi guna mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Dinas KPTPH mendorong penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan sarana dan prasarana produksi agar komoditas hortikultura mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.

Dari sisi perencanaan, memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas KPTPH selaras dengan kebijakan nasional dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan berbasis data dan wilayah menjadi dasar dalam penentuan sasaran, sehingga intervensi pemerintah lebih tepat guna dan berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Melalui kesiapan teknis dan perencanaan yang terarah tersebut, Dinas KPTPH Provinsi Lampung optimistis dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan kebijakan nasional di bidang pangan dan pertanian dapat memberikan dampak langsung bagi petani di daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program konkret yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani di wilayah Lampung. Program yang telah dan terus dijalankan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi, melalui optimalisasi lahan sawah eksisting dan peningkatan indeks pertanaman.

Beberapa program yang sudah dan akan dijalankan antara lain Program Swasembada Pangan Lokal dengan mengembangkan kemandirian pangan di tingkat

kabupaten/kota dengan fokus pada komoditas potensial lokal. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dan penyediaan fasilitas pasca panen dan Distribusi input pertanian seperti penyediaan pupuk subsidi, pemberian pupuk hayati cair, benih unggul, dan obat-obatan pertanian secara merata ke seluruh wilayah provinsi.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2025–2029 serta mewujudkan swasembada pangan, pengendalian inflasi daerah, dan penguatan hilirisasi pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025 melaksanakan terobosan melalui pemberian bantuan mesin pengering padi (*dryer*) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Tani (Poktan). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penanganan pascapanen, menjaga kualitas gabah kering giling dan beras, serta memperkuat daya saing produk pertanian Lampung agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Keberadaan mesin dryer menjadi penting karena proses pengeringan yang optimal dapat menekan kehilangan hasil, menjaga mutu produksi, dan meningkatkan stabilitas harga gabah di tingkat petani, terutama pada saat panen raya. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan rantai pasok pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan hasil pertanian yang lebih efisien dan modern.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung kembali menyiapkan hibah sebanyak 82 unit mesin pengering padi yang akan diberikan kepada Gapoktan, Poktan, koperasi, BUMDes, dan organisasi kemasyarakatan. Hingga April 2026, progres pelaksanaan program menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan kelembagaan pertanian, tercermin dari masuknya 250 proposal permohonan bantuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 proposal telah dilakukan verifikasi, dengan 130 proposal dinyatakan lolos verifikasi dan siap menerima bantuan. Sementara itu, sebanyak 47 proposal dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau mengundurkan diri setelah proses verifikasi, serta masih terdapat 73 proposal yang belum dilakukan survei lapangan. Tingginya minat terhadap bantuan mesin dryer menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan sarana pascapanen di Provinsi Lampung masih sangat besar dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung stabilitas

pangan, peningkatan kualitas hasil pertanian, serta penguatan ekonomi berbasis produk lokal secara berkelanjutan.

4. Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar untuk memperkuat gizi rakyat dan mempercepat penurunan stunting. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang disiplin, standar yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Program makan bergizi tidak hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan. Apabila aspek keamanan pangan diabaikan, maka yang terjadi bukan peningkatan kualitas gizi, melainkan munculnya masalah kesehatan baru yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik.

Penguatan pemenuhan gizi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan Program



MBG yang diarahkan untuk memberikan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan sasaran posyandu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. Program ini menyasar 2.372.731 jiwa yang terdiri dari siswa sekolah 2.021.981 jiwa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebanyak 350.750 jiwa. Pelaksanaan program dilakukan melalui penguatan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T sebanyak 91 SPPG guna memastikan layanan dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Satgas MBG terus melakukan percepatan pembangunan dan pengoperasian dapur MBG. Hingga tahun 2026, jumlah realisasi dapur MBG telah mencapai 1.120 unit atau 140,3% dari target awal sebanyak 798 unit, dengan 1.071 dapur telah beroperasi aktif. Selain memperkuat layanan pemenuhan gizi, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dengan total lebih dari 50.649 relawan yang terlibat dalam operasional SPPG.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat aspek regulasi, pengawasan, dan keamanan pangan melalui penerbitan berbagai keputusan gubernur, surat edaran, serta pembentukan Satgas MBG tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan standar higiene, sanitasi, dan tata kelola dapur berjalan sesuai ketentuan. Hingga saat ini, tercatat 23.888 penjamah makanan telah memiliki sertifikasi, sementara proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terus dipercepat guna menjamin mutu layanan kepada masyarakat, adapun SLHS yang telah terbit sebanyak 405 SPPG (37,81%).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pelibatan Lembaga Ekonomi Desa seperti BUM Desa, koperasi, dan Gapoktan. Melalui kemitraan dengan SPPG, kebutuhan bahan pangan program MBG diharapkan dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal masyarakat desa sehingga mampu menciptakan pasar yang pasti bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi kemitraan antara Lembaga Ekonomi Desa seperti BUM Desa, koperasi, dan Gapoktan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai penyokong utama kebutuhan program MBG sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Dengan langkah tersebut, program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi

masyarakat, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menciptakan perputaran ekonomi desa yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inklusif.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain memastikan ketersediaan bahan baku yang aman dan berkualitas, kemitraan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta menjadikan Lembaga Ekonomi Desa sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mendukung keberhasilan program MBG di Provinsi Lampung.

Meskipun demikian, hasil monitoring lapangan masih menemukan beberapa kendala, seperti standar bangunan dapur yang belum optimal, pengelolaan limbah yang belum memadai, hingga kedisiplinan relawan terhadap SOP keamanan pangan. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan perbaikan pada peningkatan kualitas infrastruktur, sertifikasi wajib, penguatan SOP, serta pengawasan ketat terhadap operasional dapur MBG. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan target zero case keracunan makanan sekaligus memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5. Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional

Provinsi Lampung memiliki peran dan potensi strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Lampung tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan untuk



komoditas tertentu, tetapi juga menjadi wilayah prioritas dalam program-program pangan pemerintah. Pada tahun 2026 Provinsi Lampung memperkuat sektor peternakan sebagai bagian dari strategi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan daerah menuju lumbung pangan nasional. Penguatan ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari aspek penyediaan pakan ternak berkualitas, pengendalian penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis, peningkatan mutu pembibitan, hingga penguatan kapasitas peternak. Salah satu capaian penting dalam penguatan pakan ternak adalah pengembangan Rumput Pakchong Varietas Tansa di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, yang telah mencapai luas tanam 55 hektar. Dari sisi kesehatan hewan, Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam pengendalian PMK dengan capaian vaksinasi hingga bulan April 2026 sebesar 84.624 layanan atau 25,04%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pelayanan terpadu kesehatan hewan di sentra peternakan rakyat yang tidak hanya melakukan vaksinasi PMK dan LSD, tetapi juga pemeriksaan kesehatan ternak serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak.

Langkah ini memberikan dampak nyata dalam menjaga kesehatan ternak, melindungi usaha peternakan rakyat, dan memastikan stabilitas produksi pangan asal ternak tetap terjaga. Penguatan reproduksi ternak juga dilakukan melalui UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan produksi mani/semen beku sapi sejak tahun 2001. Seiring dengan peningkatan mutu, sejak Juni 2022 produksi semen beku telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga saat ini melalui Sertifikasi SNI Nomor 45023/LSPro/I-SNI-SBI/IX/2025, sebanyak 16 ekor sapi pejantan dari berbagai bangsa seperti Limousin, Simmental, Brahman, dan Bali telah memenuhi standar nasional, sehingga mutu semen beku lebih terjamin dan tingkat keberhasilan inseminasi buatan bagi peternak dapat meningkat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi (monev) Uji Zuriat Sapi Perah Periode IV di Dairy Farm PT. GGLC Lampung Tengah bersama Tim BET Cipelang. Hingga 2025, tercatat capaian uji zuriat sebanyak 28 ekor dari target 40 ekor sebagai bagian dari penguatan pemuliaan sapi perah berbasis performa produksi. Rataan produksi susu sapi perah hasil uji zuriat menunjukkan capaian di atas 27 liter/ekor/hari, yang menggambarkan potensi genetik lokal yang kompetitif dan berpeluang meningkatkan produksi susu dalam negeri.

6. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan

Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 menjadi momentum penguatan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendukung ketahanan energi daerah dan nasional, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Berbagai capaian strategis telah direalisasikan, khususnya dalam percepatan eksplorasi migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).



Pada subsektor minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan survei seismik 2D Garbera di Wilayah Kerja (WK) Migas Sumbagsel Area I yang dikelola oleh PT Pertamina pada Juni 2025. Kegiatan ini menjadi tonggak penting setelah lebih dari 13 tahun wilayah kerja tersebut tidak menunjukkan progres signifikan. Selain itu, WK Migas Air Komering milik Huatong Services Indonesia telah memulai tahapan eksplorasi pada Mei 2025, menandai meningkatnya kembali aktivitas hulu migas di wilayah Lampung. Wilayah administrasi pekerjaan berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur. Pelaksanaan pekerjaan diperkirakan akan slesai di bulan Agustus tahun 2026.

Pada WK Migas Sumbagsel Area I yang dikelola oleh PHE OSES, telah diimplementasikan Participating Interest (PI) 10 persen sebagai bentuk peningkatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi penerimaan daerah di masa mendatang.

Dalam pengembangan energi panas bumi, sejumlah kemajuan signifikan juga telah dicapai. Pada WK Panas Bumi Way Panas, PT Pertamina Geothermal Energy melaksanakan ground breaking eksplorasi sebesar 2 x 27,5 MW pada Juni 2025 serta ground breaking Pilot Plant Green Hydrogen pada September 2025. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan hidrogen hijau berbasis panas bumi yang pertama di Indonesia, sekaligus mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon.

Selanjutnya, pada WK Panas Bumi Sekincau Selatan yang dikelola oleh PT Star Energy Suoh Sekincau, telah dilakukan boundary modification TRHS serta penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai persiapan pengeboran eksplorasi. Pada WK Panas Bumi Way Ratai yang dikelola oleh PT Cahaya Anagata Energy, telah dilaksanakan proses 3G Surveys dan Pre-Transaction Agreement (PTA) serta persiapan eksplorasi, termasuk perpanjangan masa berlaku Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero).

Untuk WK Panas Bumi Danau Ranau, pada November 2025 telah dilakukan persiapan pelelangan kembali wilayah kerja sebagai langkah percepatan pengembangan potensi panas bumi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan potensi panas bumi Way Umpu melalui usulan penambahan data dan/atau penetapan sebagai Wilayah Penugasan Pendahuluan dan Eksplorasi (WPPE), serta percepatan penetapan Potensi Panas Bumi Sri Rejo menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Upaya pengembangan energi terbarukan di Provinsi Lampung terus dilakukan dan diarahkan ke tahap implementasi. Pada bulan April tahun 2025 telah dilaksanakan rapat pembahasan Rencana Percepatan Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya yang merupakan langkah mitigasi terhadap krisis kapasitas TPA di wilayah aglomerasi yang direncanakan akan melayani Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.



Calon Lokasi PSEL Lampung Raya ditetapkan di Kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini progres pekerjaan sampai pada tahap persiapan proses lelang oleh Danantara dan penjadwalan penandatangan MOU antara Danantara dan Pemerintah Daerah.

Potensi energi terbarukan juga dimiliki Bendungan Batutegi yang sampai saat ini akan dikembangkan melalui Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 2 × 14 MW dan Bendungan Sekampung sebesar 2 × 27 MW. Sementara itu, Bendungan Margatiga juga memiliki potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.



Secara keseluruhan, capaian sektor ESDM sampai dengan Tahun 2026 menunjukkan progres signifikan dalam mengakselerasi investasi, meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat bauran energi bersih. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi dan peningkatan kapasitas pembangkitan listrik berbasis EBT, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

7. Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi

Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan penguatan kapasitas BUMDes sebagai bagian dari pelaksanaan program Desaku Maju. Kegiatan Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan BUMDes mampu menjalankan peran sebagai penggerak ekonomi desa secara lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan. Penguatan BUMDes melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pendampingan serta pengawasan dilaksanakan pada empat BUMDes percontohan Desaku Maju, yaitu Desa Sukadamai di Lampung Selatan, Desa Tambahrejo di Pringsewu, Desa Tamansari di Lampung Timur, serta Desa Wonomarto di Lampung Utara.



Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDes yang telah dilaksanakan dalam dua angkatan, diikuti oleh 125 peserta yang berasal dari unsur Dinas PMD kabupaten, koordinator TA PM Provinsi, TA PM Kabupaten, Kepala Desa, Direktur dan Bendahara BUMdesa, serta pelaku usaha ketahanan pangan.

Para peserta tidak hanya berasal dari pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan unsur pendamping dan pemangku kepentingan desa agar koordinasi, pengawasan, dan pembinaan dapat berjalan secara terpadu. Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, bimtek, pendampingan, dan pengawasan Ini, diharapkan BUMDes semakin kuat secara kelembagaan, mampu meningkatkan kualitas tata kelola usaha, serta dapat

mengembangkan unit unit usaha yang produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan basis UMKM, basis pertanian, basis koperasi, basis produksi pangan, dan basis ekonomi keluarga, penguatan BUMDes adalah instrumen nyata membangun ekonomi dari bawah, BUMDes butuh peningkatan kapasitas karena banyak tantangan tata kelola, Program Desa adalah strategi menekan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan

Pembangunan desa bukan sekadar program tambahan. Pembangunan desa adalah strategi utama untuk memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Selama puluhan tahun, pembangunan terlalu banyak bertumpu pada kota. Akibatnya, desa menjadi pemasok tenaga kerja, pemasok pangan, tetapi belum sepenuhnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal, desa memiliki sumber daya besar: lahan pertanian, perkebunan, perikanan, wisata, dan tenaga produktif.

BUMDes adalah alat negara dan alat rakyat untuk memastikan pembangunan benar-benar bergerak dari bawah. Ketika BUMDes berjalan baik, maka lapangan kerja tercipta di





desa. Ketika lapangan kerja tercipta di desa, maka urbanisasi dapat ditekan. Ketika ekonomi desa bergerak, maka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan.

Selain itu, terdapat pula beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung terutama pada bidang UMKM di Tahun 2026 ini. Perkembangan teknologi digital dan perdagangan elektronik telah memberikan peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam penguatan ekosistem UMKM di Provinsi Lampung. Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan digitalisasi UMKM, TikTok bersama Tokopedia bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan **"Maju Bareng Tokopedia & TikTok Shop Lampung 2026"**. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana edukasi, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital secara optimal dalam pengembangan usaha. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Premiere Lampung dan diikuti oleh pelaku UMKM, koperasi, komunitas usaha, serta stakeholder terkait di Provinsi Lampung. Peserta kegiatan terdiri dari Pelaku UMKM Provinsi Lampung (Pengurus Koperasi; Komunitas Wirausaha Muda; Pendamping UMKM; Akademisi dan Praktisi Bisnis Digital), Jumlah peserta : ± 175 peserta.

Kemudian terdapat kegiatan fasilitasi akses pembiayaan KUR bagi UMKM dari Taun 2025 sampai dengan April Tahun 2026. Kegiatan fasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM dilaksanakan sebagai upaya membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan usaha melalui perbankan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan alternatif pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dengan koordinasi bersama Bank Lampung. Kegiatan ini memberikan manfaat seperti:

a. Rekapitulasi UMKM calon debitur KUR yang terinput dalam Aplikasi SIKP
b. Rekapitulasi UMKM calon debutur KUR Perumahan
c. Surat Penyampaian data pelaku usaha calon debitur KUR Perumahan Tahun 2026





Kegiatan fasilitasi akses pembiayaan KUR bagi UMKM Tahun 2025 dan April 2026 telah dilaksanakan melalui pendataan, penyebaran informasi, koordinasi dengan Bank Lampung, serta monitoring perkembangan pengajuan pembiayaan UMKM. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha UMKM.

8. Stabilitas Harga Pangan dan Ketersediaan Produk Lokal

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi prioritas Pemerintah Pusat, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh dalam percepatan pembangunan sektor pertanian, khususnya pada komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura. Kesiapan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi program melalui penyelarasan program daerah dengan target swasembada pangan nasional pada 2027,

termasuk optimalisasi sumber daya lokal dan pembangunan sarana prasarana. Peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern. Pengembangan pasar dengan membangun jaringan pemasaran yang terintegrasi dengan pasar nasional dan mendorong kerja sama antar provinsi serta pemberdayaan petani dengan meningkatkan kapasitas petani dan pembentukan kelompok usaha tani yang kuat.



Pada komoditas padi dan jagung, Dinas KPTPH melalui Bidang Tanaman Pangan memfokuskan upaya pada peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada, peningkatan indeks pertanaman, serta penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi. Penggunaan varietas unggul, penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian menjadi bagian penting dalam memastikan stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim.

Sementara itu, pada komoditas hortikultura, kesiapan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi guna mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Dinas KPTPH mendorong penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan sarana dan prasarana produksi agar komoditas hortikultura mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.

Dari sisi perencanaan, memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas KPTPH selaras dengan kebijakan nasional dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan berbasis data dan wilayah menjadi dasar dalam penentuan sasaran, sehingga intervensi pemerintah lebih tepat guna dan berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Melalui kesiapan teknis dan perencanaan yang terarah tersebut, Dinas KPTPH Provinsi Lampung optimistis dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan kebijakan nasional di bidang pangan dan pertanian dapat memberikan dampak langsung bagi petani di daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program konkret yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani di wilayah Lampung. Program yang telah dan terus dijalankan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi, melalui optimalisasi lahan sawah eksisting dan peningkatan indeks pertanaman.

Beberapa program yang sudah dan akan dijalankan antara lain Program Swasembada Pangan Lokal dengan mengembangkan kemandirian pangan di tingkat kabupaten/kota dengan fokus pada komoditas potensial lokal. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dan penyediaan fasilitas pasca panen dan Distribusi input pertanian seperti penyediaan pupuk subsidi, pemberian pupuk hayati cair, benih unggul, dan obat-obatan pertanian secara merata ke seluruh wilayah provinsi.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2025–2029 serta mewujudkan swasembada pangan, pengendalian inflasi daerah, dan penguatan hilirisasi pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025 melaksanakan terobosan melalui pemberian bantuan mesin pengering padi (*dryer*) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Tani (Poktan). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penanganan pascapanen, menjaga kualitas gabah kering giling dan beras, serta memperkuat daya saing produk pertanian Lampung agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Keberadaan mesin dryer menjadi penting karena proses

pengeringan yang optimal dapat menekan kehilangan hasil, menjaga mutu produksi, dan meningkatkan stabilitas harga gabah di tingkat petani, terutama pada saat panen raya. Selain itu, program ini juga mendukung penguatan rantai pasok pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan hasil pertanian yang lebih efisien dan modern.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung kembali menyiapkan hibah sebanyak 82 unit mesin pengering padi yang akan diberikan kepada Gapoktan, Poktan, koperasi, BUMDes, dan organisasi kemasyarakatan. Hingga April 2026, progres pelaksanaan program menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan kelembagaan pertanian, tercermin dari masuknya 250 proposal permohonan bantuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 proposal telah dilakukan verifikasi, dengan 130 proposal dinyatakan lolos verifikasi dan siap menerima bantuan. Sementara itu, sebanyak 47 proposal dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau mengundurkan diri setelah proses verifikasi, serta masih terdapat 73 proposal yang belum dilakukan survei lapangan. Tingginya minat terhadap bantuan mesin dryer menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan sarana pascapanen di Provinsi Lampung masih sangat besar dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung stabilitas pangan, peningkatan kualitas hasil pertanian, serta penguatan ekonomi berbasis produk lokal secara berkelanjutan.

9. Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Untuk menerima masukan dari berbagai kalangan Provinsi Lampung membuka saluran resmi untuk menyerap aspirasi Masyarakat, Pengaduan masyarakat yang paling banyak adalah tentang kondisi jalan rusak yang membutuhkan perbaikan dan tentang keberatan atas pungutan uang komite sekolah. Beban masyarakat yang ditimbulkan oleh uang komite ini diperkuat oleh masih rendahnya angka partisipasi lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke SMA hanya 62% dan dari yang lulus SMA hanya 22% yang melanjutkan ke perguruan tinggi.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung 2025 mengalami kenaikan 0,85 poin (1,16%) dibandingkan tahun 2024, dengan nilai IPM 73,98. Kebijakan prioritas di bidang Pendidikan yaitu perluasan akses pendidikan ke-jenjang menengah atas melalui kebijakan penghapusan biaya daftar ulang, SPP, dan uang komite. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh peserta didik, baik siswa baru maupun siswa lama yang naik tingkat, di semua jalur penerimaan. Terobosan penting adalah menyediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi putra-putri Lampung, salah satunya melalui kebijakan menghapus uang komite sekolah dan komitmen meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, termasuk kualitas guru, kepala sekolah, dan seluruh instrumen pendidikan sehingga bisa menciptakan proses belajar yang unggul.

Penghapusan uang komite, SPP, dan daftar ulang di SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini didasarkan pada revisi Pergub Nomor 61 Tahun 2020 bahwa operasional sekolah akan ditanggung APBD dan BOS, tidak lagi dibebankan kepada orang tua siswa. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ringannya biaya pendidikan 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri di seluruh Lampung.

Data BPS di Lampung mencatat biaya pendidikan di Lampung turun 15 persen atau mengalami deflasi sangat dalam -15,10 persen. Indeks harga pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Secara umum, inflasi tahun ke tahun (*y-on-y*) Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen, lebih

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya tingkat inflasi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Provinsi Lampung relatif terjaga, termasuk pada kelompok pendidikan yang turut menjadi salah satu penekan inflasi daerah. Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban biaya pendidikan masyarakat melalui penghapusan uang komite, SPP, dan biaya daftar ulang pada SMA/SMK/SLB Negeri. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya beban pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah, terutama melalui penurunan biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD. Dengan terjaganya inflasi pada level rendah, daya beli masyarakat tetap terpelihara dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah.Ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam. Uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung. Penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.

Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat. Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan. Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam inflasi.

Dalam rangka mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan Program Pelatihan Vokasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan keterampilan tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat, khususnya pada bidang keterampilan teknis yang memiliki kebutuhan tinggi di dunia usaha dan dunia industri, sekaligus mendukung pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. Pada Tahun Anggaran 2026,

Pemerintah Daerah menetapkan target pelatihan sebanyak 528 peserta yang terbagi ke dalam 33 paket pelatihan pada kejuruan listrik dan las. Pelaksanaan program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja. Selain memperkuat kapasitas individu, pelatihan vokasi juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi kegiatan masih sebesar 0 persen baik dari sisi fisik maupun jumlah peserta pelatihan. Kondisi tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahapan persiapan administrasi dan teknis. Beberapa proses yang sedang dilaksanakan meliputi penyusunan jadwal dan mekanisme pelatihan, koordinasi dengan lembaga pelatihan dan instruktur, penyusunan dokumen pendukung kegiatan, penetapan lokasi pelatihan, serta proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada awal tahun anggaran masih diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan jadwal pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, hingga Triwulan I Tahun 2026 kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan pelatihan kepada peserta. Meskipun demikian, secara umum progres kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan dan pelaksanaan pelatihan direncanakan mulai dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026 setelah seluruh proses persiapan selesai dilakukan.

Dengan dukungan koordinasi antarperangkat daerah, lembaga pelatihan, dan seluruh pihak terkait, Program Pelatihan Vokasi diharapkan mampu mencapai target secara optimal sampai akhir tahun anggaran. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan berbasis keterampilan, sehingga mendukung terwujudnya pemerataan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

10. Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Jalan di Desa

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mencatat total panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.695,479 kilometer, tersebar dalam 98 ruas jalan dan 16 koridor utama yang menghubungkan wilayah strategis di Provinsi Lampung. Dari total panjang tersebut, kondisi jalan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mengalami penambahan 1,71% dari tahun 2024 sepanjang 1.323,908 km, atau sekitar 78,08% dari total ruas jalan dan pada tahun 2025 Jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 1.352,825 km, atau sekitar 79 79% dari total ruas jalan..
- Jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) sepanjang 342,654 km, atau 20,21%.
- Dengan kondisi ini capaian tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung mencapai 79,79 persen

Pada RKPD tahun 2026 direncanakan pembangunan jalan ruas jalan Provinsi sebanyak 14 ruas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14. Rencana Pembangunan jalan Provinsi lampung pada tahun 2026.

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KABUPATEN	PANJANG RUAS (Km)
1	042	Lempasing - Padang Cermin	Pesawaran	29,157
2	022	Bandar Jaya - Sp. Mandala	Lampung Tengah	37,016
3	032	Padang Ratu - Kali Rejo	Lampung Tengah	22,603
4	025	Kali Rejo - Bangunrejo	Lampung Tengah	14,086
5	030	Padang Ratu - Pekurun Udik	Lampung Tengah	24,796
6	006	Jabung - Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	22,962
7	075	Kasui - Ai Ringkih (Bts Sumatera Selatan)	Way Kanan	26,295
8	045	Sp. Umbar - Putih Doh	Tanggamus	23,830
9	092	Sp. Unit Viii - Gedong Aji	Tulang Bawang	22,050
10	088	Tegal Mukti - Tajab	Way Kanan	36,000
11	016	Sp. Korpri - Purwotani	Lampung Selatan	14,551
12	043	Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan	Pesawaran	31,732
13	049	Suoh - Sp. Blok 9	Lampung Barat	30,447
14	095	Brabasan - Wiralaga	Mesuji	29,443

Untuk lebih meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, diperlukan perluasan penanganan ruas jalan di provinsi lampung guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, ketahanan pangan dan menurunkan disparitas wilayah.

Pada Tahun Anggaran 2026, dialokasikan penanganan jalan desa pada 4 (empat) desa prioritas dengan rincian yaitu Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 110,91 meter; Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sepanjang 110,91 meter; Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur sepanjang 110,91 meter; serta Desa Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 221,82 meter. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah desa sekaligus mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah perdesaan.

Peningkatan kualitas jalan desa diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih merata. Dukungan infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat integrasi kawasan dan mempercepat pembangunan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan aksesibilitas. Sampai dengan saat ini, progres pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara tertib administrasi, efektif, transparan, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Setelah seluruh proses persiapan selesai dilaksanakan, kegiatan penanganan jalan desa diharapkan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan fisik sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan Jalan Desa dalam Program Desaku Maju, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dalam memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis wilayah desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan daerah. Dukungan terhadap peningkatan kemantapan jalan desa

diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan.

2.1.10. Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan prinsip – prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan mengintegrasikan TPB/SDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan TPB/SDGs menyesuaikan dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Gubernur melakukan fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Data paling ter update terkait capaian realisasi SDGs Provinsi Lampung tahun 2024 yang telah di *realease* di Tahun 2024, dengan data-data capaian berdasarkan data yang bersumber dari BPS serta data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah. Namun untuk beberapa data capaiannya belum tersedia. Seperti dijelaskan oleh para stakeholder TPB bahwa salah satu tantangan terbesar untuk mengukur capaian TPB adalah masalah ketersediaan data.

Indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2024 yang tercapai sebesar 75% yaitu 161 dari 214 indikator. Dimana pada masing-,masing pilar TPB antara lain :

1. Pilar Sosial

   Pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10% serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.

2. Pilar Ekonomi

   Pilar sosial terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih menggunakan data sebelumnya 12%.

3. Pilar Lingkungan

   Pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%, sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

4. Pilar Pembangunan hukum dan tata kelola

   Pada pilar lingkungan sebanyak 32 indikator, dimana terdapat 94 % tercapai atau sebanyak 30 indikator, dan tidak tercapai sebesar 6 % atau sebanyak 2 indikator.

Adapun indikator tidak tercapai yaitu rendahnya pemanfaatan E-procurement dalam pemerintahan.

2.1.11. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Target capaian SPM tersebut umumnya berada pada angka **100%**, yang mencerminkan harapan pencapaian maksimal dalam pelaksanaan layanan dasar di setiap sektor.

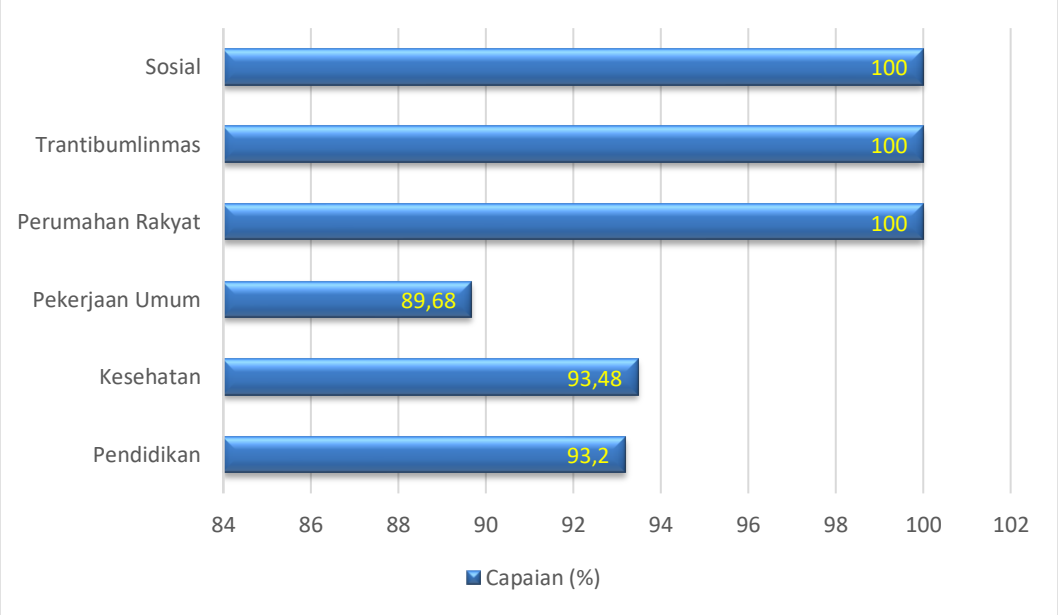
Jika dibandingkan dengan target tersebut, realisasi capaian menunjukkan bahwa beberapa sektor telah mencapai target sepenuhnya, yaitu sektor **Perumahan Rakyat**, Trantibumlinmas dan Sosial, yang masing-masing mencatat **100% capaian**. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan dasar di tiga sektor tersebut telah dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, sektor lainnya mencatat realisasi yang mendekati target, meskipun belum mencapai 100%. Sektor **Pendidikan** mencapai **93,2%**, **Kesehatan**

mencapai **93,48%** dan **Pekerjaan Umum** mencapai **89,68%**,, yang semuanya menunjukkan kinerja sangat baik dan hanya terpaut sedikit dari target yang ditetapkan.

Di antara 6 sektor SPM tersebut, sektor **Pekerjaan umum** masih menunjukkan capaian yang paling rendah, yaitu **89,68%**, sehingga menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan program SPM lebih lanjut agar dapat tercapai di tahun 2026.

Di antara 6 sektor SPM tersebut, sektor **Pendidikan** masih menunjukkan capaian **98,57%** tertinggi, untuk sektor sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan program SPM lebih lanjut agar dapat tercapaia di tahun 2026.

Capaian SPM sampai denga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2026 diolah

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan Pembangunan yang diperoleh berdasarkan hasil telaahan dan pencermatan terhadap capaian kinerja sampai dengan triwulan I-2026 adalah sebagai berikut :

- **Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Sektor Unggulan** dengan cara mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, seperti jasa lainnya dan ekspor barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung.
- **Peningkatan Daya Tarik Investasi** melalui Percepatan perizinan dan penyederhanaan regulasi di sektor pariwisata, industri pengolahan, Industri sektor energi dan properti wisata, Promosi peluang investasi secara agresif ke tingkat nasional dan internasional, dengan fokus pada sektor unggulan seperti agroindustri, pariwisata bahari, dan energi terbarukan dan Peningkatan kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk penguatan lembaga promosi dan pendampingan investor.
- **Pengembangan Sektor Pariwisata** melalui meningkatkan daya tarik investasi, pengembangan infrastruktur pendukung dengan prioritas pembangunan akses ke destinasi wisata utama, seperti jalan menuju Pantai Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Pahawang, Penguatan SDM dan Ekonomi Lokal melalui Pelatihan keterampilan kerja di sektor pariwisata (*hospitality*, bahasa asing, digital marketing) dan fasilitasi UMKM lokal pariwisata serta membangun platform digital pariwisata Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan sistem reservasi, peta wisata, dan agenda wisata.
- **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja** melalui pelatihan dan pendidikan vokasional perlu ditingkatkan, terutama di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- **Pengembangan Ekspor dan Industri Pengolahan** dengan memperluas pasar ekspor dan mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, seperti kopi robusta, CPO, serta ikan dan udang.
- **Stabilisasi Konsumsi Rumah Tangga** dengan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok.

- **Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dan mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

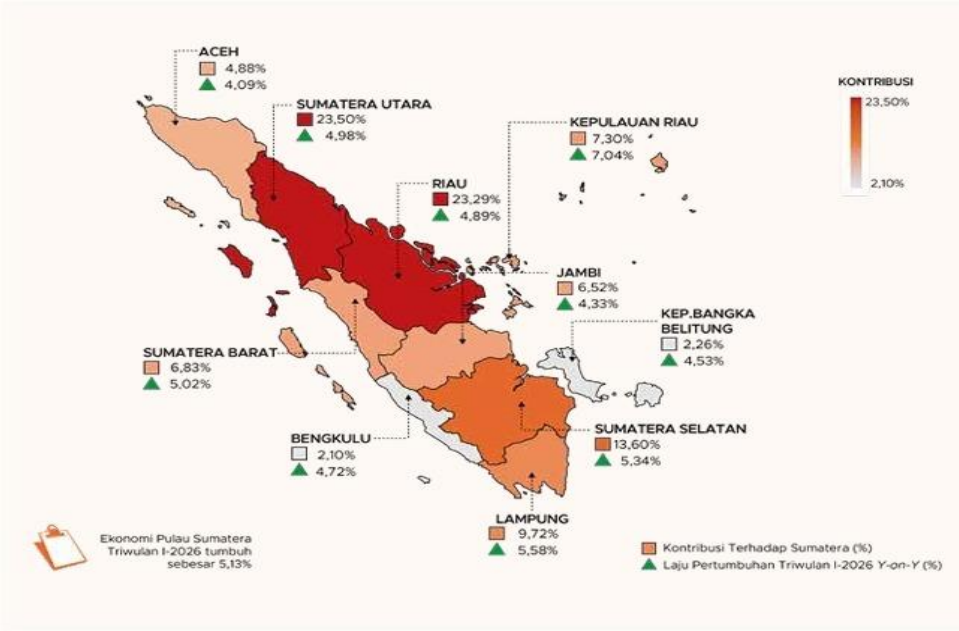


BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan I-2026

Secara regional, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada Triwulan I tahun 2026 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,50 persen dan 23,29 persen. Provinsi Lampung secara khusus memberi kontribusi sebesar 9,72 persen atau hampir sepersepuluh dari total Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Sumatera yang besarnya 5,13 persen (*y-on-y*). Secara umum, pada periode ini seluruh Provinsi mengalami pertumbuhan positif dengan *variatif range* 4-7 persen. Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,04 persen, kemudian Provinsi Lampung di urutan kedua sebesar **5,58 persen**, diikuti Sumatera Selatan 5,34 persen, dan Sumatera Barat 5,02 persen. 4 Provinsi lainnya mencatat pertumbuhan dibawah 5 persen dengan yang terendah Provinsi Aceh sebesar 4,09 persen.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2026

Gambar 3.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2026 (*y-on-y*) (persen)

Tabel 3. 1 Perbandingan Pertumbuhan PDRB (ADHB) Lampung terhadap regional Sumatera dan Nasional, Tw I 2025 - Tw I 2026 *(y-o-y)*

PDRB (ADHB)	Tw I 2025		**Tw I 2026**		Peningkatan	
	%	Rp. (triliun)	%	Rp. (triliun)	%	Rp. (triliun)
Lampung	5.47	121.70	**5.58**	**132.36**	0.11	10.66
Sumatera	4.85	1,258.23	5.13	1,361.60	0.28	103.37
Nasional	4.87	5,665.90	5.61	6,187.20	0.74	521.30

Dilihat berdasarkan Lapangan Usaha, Perekonomian Lampung masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi senilai Rp. 33,85 triliun atau sekitar 25,6% dari total PDRB Triwulan I 2026 sebesar Rp 132,36 triliun. Kontribusi terbesar berikutnya adalah dari sektor Industri Pengolahan (19,0%) dan Perdagangan Besar dan Eceran (15,0%). Hal ini menunjukkan struktur ekonomi Lampung pada periode ini masih bertumpu pada sektor primer dan sektor yang terkait aktivitas perdagangan hasil pertanian.

Tabel 3. 1 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	**Harga Berlaku**			**Harga Konstan**		
	Triw I 2025	**Triw IV 2025**	**Triw I 2026**	**Triw I 2025**	**Triw IV 2025**	**Triw I 2026**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29.872,92	29.872,92	29.872,92	29.872,92	29.872,92	29.872,92
Pertambangan dan Penggalian	32.966,66	32.966,66	32.966,66	32.966,66	32.966,66	32.966,66
Industri Pengolahan	33.854,68	33.854,68	33.854,68	33.854,68	33.854,68	33.854,68
Pengadaan Listrik dan Gas	15.461,20	15.461,20	15.461,20	15.461,20	15.461,20	15.461,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.658,84	16.658,84	16.658,84	16.658,84	16.658,84	16.658,84
Konstruksi	11.277,95	13.054,55	12.223,39	7.108,00	8.104,28	7.460,72

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	Triw I 2025	Triw IV 2025	Triw I 2026	Triw I 2025	Triw IV 2025	Triw I 2026
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.179,08	19.062,39	19.889,65	10.668,33	11.094,11	11.405,45
Transportasi dan Pergudangan	9.434,69	10.004,08	10.251,18	4.988,67	5.237,00	5.293,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.005,49	2.263,23	2.302,87	1.167,93	1.300,51	1.313,15
Informasi dan Komunikasi	4.903,00	4.977,79	5.083,23	4.236,59	4.287,48	4.373,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.480,33	2.804,55	2.815,16	1.381,29	1.535,14	1.525,82
Real Estate	3.366,12	3.590,61	3.484,66	2.147,09	2.241,55	2.169,12
Jasa Perusahaan	204,89	222,33	217,09	113,44	122,15	118,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.879,18	3.986,08	4.115,18	2.185,96	2.237,13	2.229,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.508,04	3.581,33	3.575,61	2.021,05	2.032,28	2.025,72
Jasa Lainnya	1.407,38	1.649,81	1.523,49	851,65	1.001,96	923,12
PDRB	**121.718,60**	**131.949,20**	**132.361,94**	**69.559,04**	**74.238,35**	**73.439,55**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026
**) : data s.d. Triwulan-I 2026*

Pertumbuhan PDRB Lampung Triwulan I 2026 dibandingkan Triwulan I 2025 *(y-on-y)* secara total mengalami peningkatan, baik pada pengukuran PDRB Harga Berlaku maupun pada PDRB Harga Konstan 2010, meskipun didalamnya masih ada beberapa sektor yang mengalami penurunan pada harga konstan, antara lain Pertambangan dan Penggalian serta sektor

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor musiman, berkurangnya proyek pembangunan atau normalisasi aktivitas setelah periode tertentu.

Penurunan juga terlihat dari angka Triwulanan *(q-to-q)* PDRB Harga Konstan yang pada Tw IV 2025 sebesar Rp74,24 triliun menjadi Rp73,44 triliun pada Tw I 2026 atau turun sekitar -1,1%. Penurunan *q-to-q* ini merupakan pola yang cukup umum pada Triwulan I karena berakhirnya momentum belanja akhir tahun, panen beberapa komoditas yang belum memasuki puncak musim, serta berkurangnya aktivitas perdagangan setelah periode liburan. Capaian sumber Pertumbuhan PDRB pada Triwulan I 2026 menurut lapangan usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB Tw I-2026

Komponen	Triw I-2026 Terhadap Triw IV-2025 (q-to-q)	Triw I-2026 Terhadap Triw I-2025 (y-to-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2026
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,99	9,89	2,20
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,30	-1,91	-0,09
C. Industri Pengolahan	-4,82	3,28	0,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-3,78	1,83	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,89	-3,85	0,00
F. Konstruksi	-7,94	4,96	0,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,81	6,91	1,06
H. Transportasi dan Pergudangan	1,08	6,11	0,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,97	12,43	0,21
J. Informasi dan Komunikasi	2,01	3,23	0,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,61	10,46	0,21
L. Real Estate	-3,23	1,03	0,03
M,N. Jasa Perusahaan	-3,22	4,21	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,32	2,01	0,06
P. Jasa Pendidikan	-0,32	0,23	0,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,33	2,50	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-7,87	8,39	0,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**-1,08**	**5,58**	**5,58**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan persentase kumulatif Lapangan Usaha, pada Triwulan pertama ini komponen Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,43 persen; diikuti Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi 10,46 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,89 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya dari Lapangan Usaha Lainnya sebesar 8,39 persen.

Tabel 3. 3 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung 2026 menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Tw I 2025	Tw I 2026
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,61	64,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,80	1,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,25	5,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,99	30,73
5. Perubahan Inventori	0,35	0,86
6. Ekspor Barang dan Jasa	55,49	52,28
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	57,49	55,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Pertumbuhan Ekonomi Lampung sebesar 5,58 persen pada periode ini utamanya didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 64,05 persen serta Ekspor Barang dan Jasa 55,57 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,73 persen. Pengurangan Impor Barang dan Jasa sebesar 55,57 persen juga membatasi pertumbuhan, meski penurunan per kuartal nya justru berdampak positif terhadap PDRB.

Tabel 3. 4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw I-2026 Terhadap Triw IV-2025 (q-to-q)	Triw I-2026 Terhadap Triw I-2025 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2026 (y-on-y)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,01	5,54	3,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,72	9,11	0,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-31,02	13,84	0,73

Komponen	Triw I-2026 Terhadap Triw IV-2025 (q-to-q)	Triw I-2026 Terhadap Triw I-2025 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2026 (y-on-y)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-7,51	4,39	1,38
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-6,64	0,75	0,40
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-9,54	1,06	0,58
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**5,54**	**5,58**	**5,58**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Dari sisi Pengeluaran, Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,54 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kenaikan sebesar 13,84 persen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 0,75 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,54 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,11 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) turun sebesar 1,06 persen.

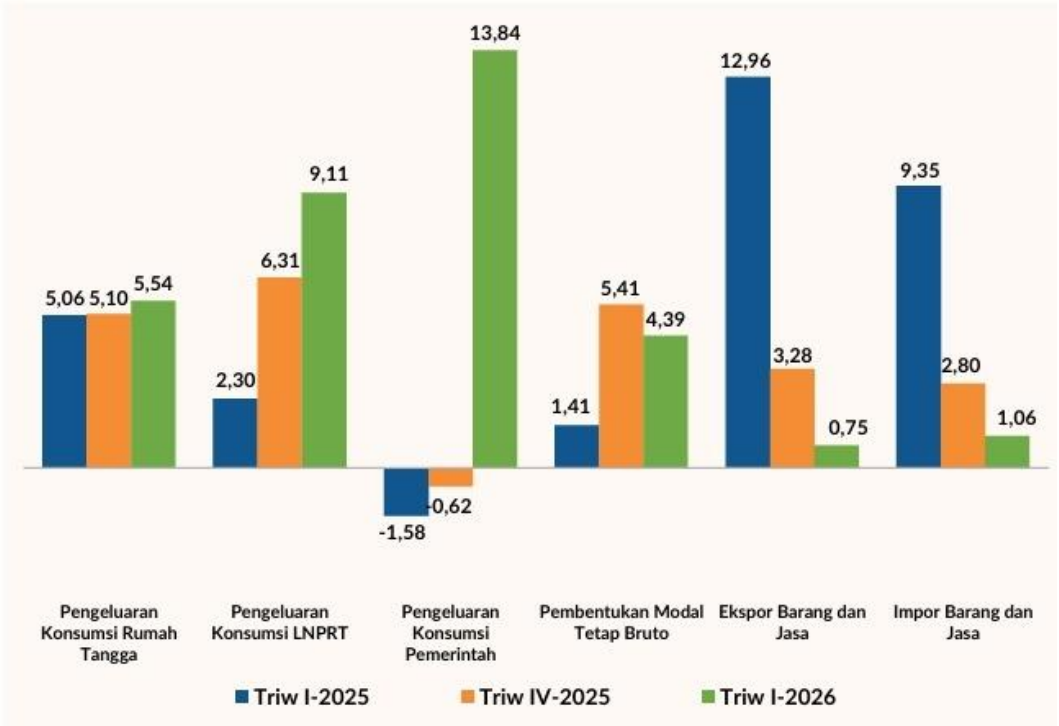
Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2026 Terhadap Triwulan I-2025 (y-on-y) berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2026

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2026 dibanding triwulan yang sama tahun 2025 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,58 persen, menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 12,43 persen. Selanjutnya, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan yang tumbuh sebesar 10,46 persen. Lapangan usaha lain yang juga tumbuh pesat adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Jasa Lainnya; serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor yang tumbuh masing-masing sebesar 9,89 persen; 8,39 persen; dan 6,91 persen. Di sisi lain, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu lapangan usaha Pengadaan Air yang terkontraksi sebesar 3,85 persen serta Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,91 persen.

Grafik 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2026 Terhadap Triwulan I-2025 (y-on-y) berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS Lampung, 2026

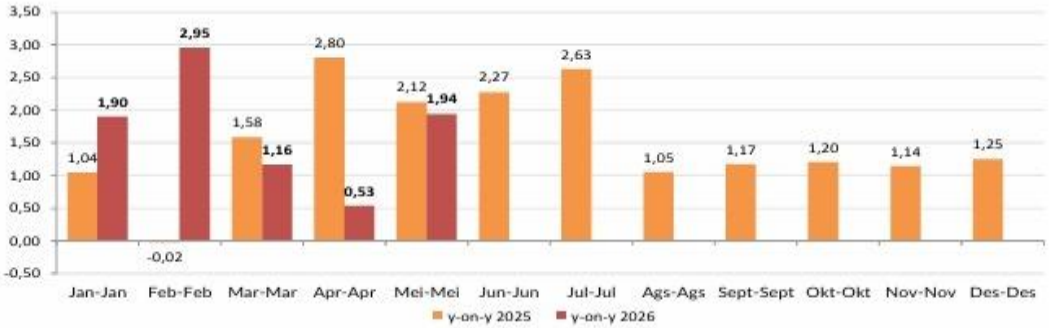
Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 13,84 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,11 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,54 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,39 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 0,75 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 1,06 persen.

Inflasi Daerah

Pada Mei 2026, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 1,94 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,84. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 2,82 persen, dengan IHK sebesar 116,39 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 1,79 persen dengan IHK sebesar 110,29.

Tabel 3. 5 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan Mei 2025 dan Mei 2026(Persen)

Tingkat Inflasi	Mei 2025	Mei 2026
(1)	(2)	(3)
Month to Month (m-to-m)	-0,58	0,82
Year to Date (y-to-d)	1,18	1,87
Year on Year (y-on-y)	2,12	1,94



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Tabel 3. 6 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Mei 2026 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100)

Kabupaten/Kota	Mei 2026		
	IHK	Inflasi *y-on-y* (%)	Inflasi *m-to-m* (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab. Lampung Timur [1)]	114,55	1,88	0,59
2. Kab. Mesuji [1)]	116,39	2,82	0,59
3. Kota Bandar Lampung [2)]	110,29	1,79	0,93
4. Kota Metro [2)]	110,41	2,81	1,13
Provinsi Lampung	111,84	1,94	0,82

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

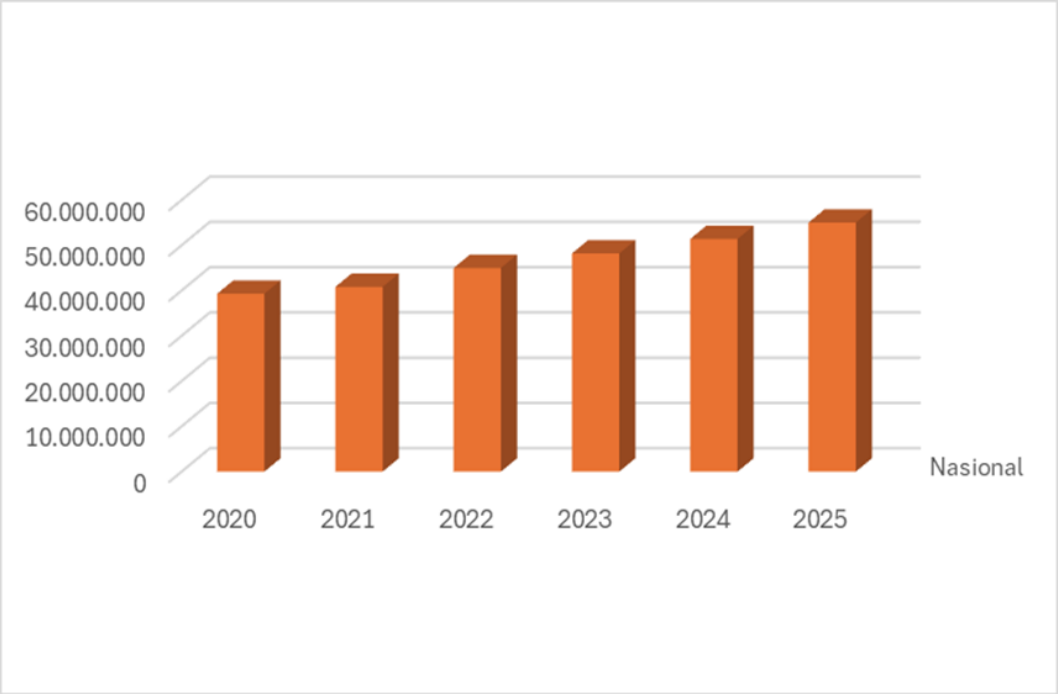
Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2025 mengalami peningkatan dari Rp. 39,29 juta menjadi Rp. 55 juta atau mengalami peningkatan sebesar 71,4 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata

PDB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 83,75 Juta Rupiah pada tahun 2025.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung mulai menunjukan peningkatan sampai dengan Tahun 2025 senilai Rp 51,39 Juta.

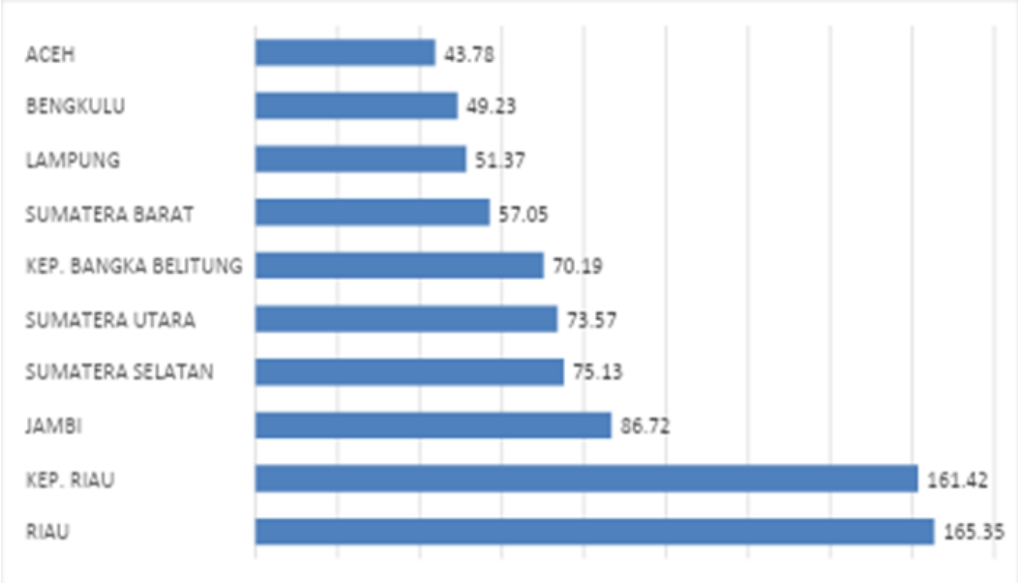
Grafik 3. 3 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020- 2025 (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3. 4 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2025
(ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025 menunjukkan Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan perkapita tertinggi sebesar 6,98 persen, diikuti Kabupaten Lampung Utara sebesar 6,59 persen dan Kabupaten Way Kanan sebesar 6,54 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang, masing-masing sebesar 4,97 persen dan 5,44 persen. Pada Tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar dengan capaian sebesar Rp. 67,7 juta, lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp. 51,3 juta.

Grafik 3. 5 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)					
Kabupaten / Kota	**Tahun 2025**				
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Triwulan IV**	**Tahunan**
Lampung Barat	2498,78	2700,29	2818,6	2755,35	10773,02
Tanggamus	5285,42	5847,51	5830,04	5761,77	22724,73
Lampung Selatan	15199,61	16875,9	17028,39	16554,76	65658,66
Lampung Timur	14128,2	15980,45	15784,23	15043,58	60936,45
Lampung Tengah	24229,96	27203,45	27824,24	26195,83	105453,48
Lampung Utara	7973,75	8848,51	8877,23	8760,29	34459,78
Way Kanan	4870,02	5359,77	5504,06	5270,69	21004,54
Tulang Bawang	7632,59	8538,81	8673,26	8394,55	33239,21
Pesawaran	5460,19	6039,62	6094,71	5852,01	23446,54
Pringsewu	3837,41	4160	4204,68	4212,49	16414,57
Mesuji	3562,97	3961,79	3994,34	3917,85	15436,94
Tulang Bawang Barat	3801,29	4398,36	4468,85	4193,81	16862,32
Pesisir Barat	1563,01	1710,2	1723,63	1682,9	6679,74
Bandar Lampung	20603,85	21605,62	21692,57	22077,53	85979,57
Metro	2179,88	2301,1	2349,01	2355,21	9185,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026

Nilai Tukar Petani

NTP Provinsi Lampung Mei 2026 sebesar 128,01 atau kenaikan sebesar 3,29 persen dibanding NTP April 2026 yaitu dari 123,93 menjadi 128,01. Peningkatan NTP pada Mei 2026 disebabkan oleh naiknya It sebesar 4,35 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Ib sebesar 1,02 persen. Peningkatan Ib disebabkan oleh naiknya IKRT sebesar 1,14 persen dan Indeks Biaya Produksi serta Penambahan Barang Modal (IBP-PBM) yang naik 0,64 persen. NTP yang mengalami kenaikan yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,07 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 17,58 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,95 persen, dan subsektor peternakan sebesar 1,58 persen. Sedangkan NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor perikanan tangkap sebesar 2,13 persen, dan subsektor perikanan budidaya sebesar 1,36 persen.

Tabel 3. 7 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, April 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100)

Subsektor	Mei 2025			Mei 2026			Perubahan NTP (%)
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tanaman Pangan	126,24	124,77	101,17	138,25	128,69	107,43	6,18
2. Tanaman Hortikultura	148,19	123,76	119,74	176,27	128,04	137,67	14,97
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	223,05	126,68	176,07	208,63	131,19	159,03	-9,68
4. Peternakan	121,33	120,46	100,73	128,06	126,10	101,55	0,82
5. Perikanan							
a. Tangkap	137,11	121,31	113,02	144,40	124,25	116,22	2,83
b. Budidaya	115,57	120,25	96,11	120,25	123,55	97,33	1,27
Provinsi Lampung	163,10	124,85	130,64	165,36	129,18	128,01	-2,02

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2026, diolah.

Nilai Tukar Petani (NTP) Mei 2026 lebih rendah dibandingkan NTP Mei 2025 dengan penurunan sebesar 2,02 persen dari 130,64 menjadi 128,01. Perubahan terbesar terjadi pada subsektor tanaman hortikultura yang naik

14,97 persen dari 119,74 menjadi 137,67. Selain itu subsektor lain yang mengalami penurunan adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan subsektor yang mengalami peningkatan adalah subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, subsektor perikanan tangkap, dan subsektor perikanan budidaya. Penurunan NTP Mei 2026 dipengaruhi oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 9,68 persen. Sementara itu, subsektor yang mengalami peningkatan yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 6,18 persen; subsektor tanaman hortikultura sebesar 14,97 persen; subsektor peternakan sebesar 0,82 persen; subsektor perikanan tangkap sebesar 2,83 persen; dan subsektor perikanan budidaya sebesar 1,27 persen.

3.1.2 Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan I 2026

Kondisi sosial ekonomi Provinsi Lampung pada periode ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Kinerja ekonomi mengalami pertumbuhan yang kuat, didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Di sisi sosial, berbagai indikator seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, dan pemerataan pendapatan menunjukkan kecenderungan membaik, meskipun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan.

Kinerja ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Pertumbuhan sebesar 5,58 persen merupakan salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan berada di atas rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera. Kontraksi sebesar 1,08 persen (q-to-q) lebih dipengaruhi oleh pola musiman setelah tingginya aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

Dengan mempertimbangkan perkembangan hingga Triwulan I 2026, prospek sosial ekonomi Lampung diperkirakan tetap dapat positif apabila didukung oleh:

- keberlanjutan produksi pertanian;
- stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat;

- peningkatan investasi dan realisasi proyek strategis;
- pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi;
- penguatan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi layanan publik dan ekonomi.

Secara keseluruhan, perkembangan sosial ekonomi Provinsi Lampung hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58 persen (y-on-y)—tertinggi dalam lima tahun terakhir—dengan dukungan utama dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Perbaikan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, fokus pembangunan perlu diarahkan pada transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, penguatan daya saing daerah, serta pemerataan hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh masyarakat Lampung.

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah s.d Awal Tahun 2026

Hingga Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Lampung menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan tetap bertumbuh, didukung oleh meningkatnya aktivitas pada sektor Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi, dan Jasa. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp132,36 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) sebesar Rp 73,44 triliun.

Secara tahunan *(y-on-y),* ekonomi Lampung diperkirakan masih mengalami pertumbuhan positif sekitar 5,6 persen, mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil. Sementara itu, secara triwulanan *(q-to-q)* terjadi perlambatan dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025 yang merupakan fenomena musiman berakhirnya periode puncak konsumsi masyarakat pada akhir tahun dan menurunnya aktivitas beberapa sektor usaha.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sekitar 25,6 persen terhadap total PDRB Harga Berlaku. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi pondasi utama perekonomian daerah sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sekitar 19,0 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,0 persen, Konstruksi sekitar 9,2 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,7 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi menuju peningkatan nilai tambah industri dan jasa mulai berkembang, meskipun peran sektor primer masih sangat dominan.

Dari sisi pertumbuhan sektoral, beberapa Lapangan Usaha menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**, **Perdagangan Besar dan Eceran**, **Transportasi dan Pergudangan**, **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**, serta **Jasa Keuangan dan Asuransi**. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Sebaliknya, beberapa sektor seperti **Pertambangan dan Penggalian**, **Konstruksi**, **Real Estate**, dan sebagian jasa pemerintahan mengalami perlambatan atau kontraksi, yang dipengaruhi oleh faktor musiman maupun penyesuaian aktivitas ekonomi.

Dari perspektif makro, kinerja Ekonomi Lampung hingga Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- produksi pertanian yang relatif baik sebagai penopang utama ekonomi daerah;
- meningkatnya aktivitas perdagangan dan distribusi seiring membaiknya permintaan domestik;
- berkembangnya sektor jasa, khususnya transportasi, akomodasi, komunikasi, dan jasa keuangan;

- stabilitas konsumsi masyarakat yang masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain tingginya ketergantungan terhadap sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas, belum meratanya pertumbuhan sektor industri bernilai tambah tinggi, perlambatan investasi pada beberapa lapangan usaha, serta perlunya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Ke depan, arah kebijakan ekonomi daerah perlu difokuskan pada :

1. **Penguatan sektor pertanian modern** melalui mekanisasi, peningkatan produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. **Percepatan hilirisasi** komoditas unggulan agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
3. **Peningkatan investasi** pada industri pengolahan, logistik, dan ekonomi digital.
4. **Pengembangan UMKM, sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif** sebagai sumber pertumbuhan baru.
5. **Peningkatan kualitas SDM** melalui pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
6. **Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas** untuk mendukung distribusi barang dan menurunkan biaya logistik.

Secara keseluruhan, perekonomian Lampung pada trimester pertama 2026 telah cukup kondusif dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, yang didukung sektor pertanian sebagai basis ekonomi dan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri serta jasa. Tantangan ke depan adalah mendorong transformasi struktur ekonomi menuju kegiatan yang lebih produktif, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan lebih berdampak.

3.1.4 Prospek Ekonomi Global Tahun 2026

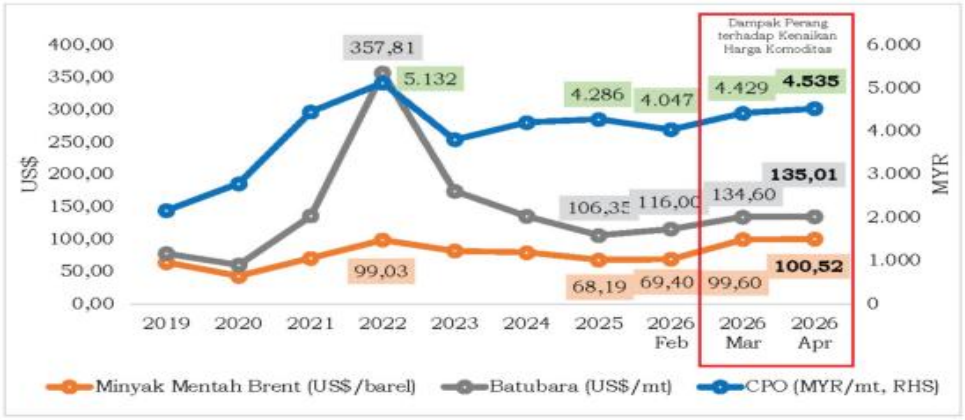
Perekonomian dunia pada tahun 2026 diperkirakan masih terus tumbuh, dengan dibayangi tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar **3,3%** pada tahun 2025 dan berlanjut dengan angka yang sama pada tahun 2026. Meskipun menunjukkan pemulihan, proyeksi ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan global sebelum pandemi COVID-19 yang berada di kisaran **3,7%**. Proyeksi ini telah didukung dengan masuknya investasi teknologi, penurunan inflasi secara bertahap, serta kemampuan dunia usaha beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perdagangan. Meski demikian, risiko dari konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan gejolak harga energi masih menjadi tantangan utama.

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, sejumlah risiko utama diperkirakan masih akan membayangi dan berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi dunia. Salah satu risiko terbesar adalah **ketegangan perdagangan internasional**, khususnya antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagangnya. Peningkatan tarif, kebijakan proteksionis, serta ketidakpastian regulasi dapat menekan arus investasi global dan menghambat kegiatan ekspor-impor, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas rantai pasok dan perdagangan dunia.

Risiko berikutnya adalah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memperbesar risiko kenaikan harga energi dan komoditas. Harga minyak mentah pada pertengahan April 2026 berada di kisaran US$100 per barel atau meningkat 76,43 persen secara *year to date* (YtD), sehingga meningkatkan risiko *imported inflation*, menahan ruang pelonggaran moneter, dan mendorong perpindahan modal ke aset aman. Volatilitas juga terjadi pada batubara dan *Crude Palm Oil* (CPO), dua komoditas ekspor utama Indonesia, yang masing-masing meningkat 23,95 persen dan 12,98 persen secara YtD.

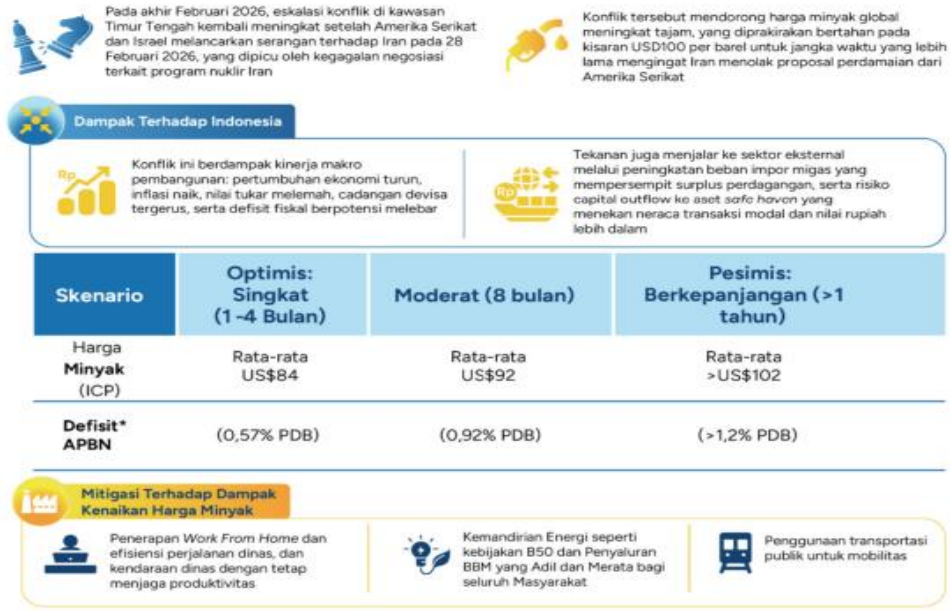
Namun, disisi lain aktivitas manufaktur global masih ekspansif, tercermin dari *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur pada Maret 2026 sebesar 51,30.

Gambar 2.2
Perkembangan Rata-Rata Harga Komoditas Global



Sumber: Bloomberg, per 24 April 2026
Keterangan: Data Februari-April 2026 adalah rata-rata bulanan

Boks 2.1
Simulasi Dampak Konflik Timur Tengah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2026

Gambar 3. 4 Simulasi Dampak Konflik Timur Tengah

Pada tahun 2026, neraca perdagangan nasional diperkirakan surplus US$47,23 miliar, utamanya didukung produk hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global, pemanfaatan *free trade agreement* (FTA), kerja sama internasional, dan reformasi kebijakan perdagangan dan iklim usaha. Neraca

keseluruhan diperkirakan surplus US$1,75 miliar dengan cadangan devisa US$158,22 miliar pada tahun 2026.

Tabel 3. 8 Realisasi Tahun 2025 dan Perkiraan 2026

Uraian (Miliar US$)	Realisasi 2025	Prakiraan 2026
Transaksi Berjalan	**-1,45**	**-4,67**
dalam persen PDB	**-0,10**	**-0,30**
Barang	49,82	47,23
Ekspor	280,43	302,15
Impor	230,61	254,92
Jasa-Jasa	-19,82	-19,36
Ekspor	42,80	44,57
Impor	62,63	63,93
Pendapatan Primer	-38,17	-39,80
Pendapatan Sekunder	6,72	7,27
Transaksi Modal dan Finansial	**-4,19**	**8,62**
Investasi Langsung	14,08	17,68
Investasi Portofolio	-9,42	1,89
Investasi Lainnya	-9,15	-11,35
Neraca Keseluruhan	**-7,84**	**1,75**
Cadangan Devisa	**156,47**	**158,22**
dalam bulan impor	**6,2**	**6,0**

Sumber: Bank Indonesia (BI) dan Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2026 (diolah)

Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian nasional sebagai dampak kondisi ekonomi global pada tahun 2026 diantaranya :

1. Perlambatan Pertumbuhan Negara Maju, Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan sebagian negara maju diperkirakan lebih moderat dibandingkan sebelum pandemi. Tingginya suku bunga riil, penyesuaian kebijakan fiskal, dan lemahnya permintaan menjadi faktor penekan pertumbuhan.

2. Inflasi yang mulai terkendali, Inflasi global menunjukkan tren menurun seiring meredanya tekanan rantai pasok dan normalisasi harga komoditas,

meskipun risiko kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik tetap diwaspadai .

3. Perdagangan Dunia masih tumbuh , Volume perdagangan internasional diperkirakan tetap meningkat. Negara-negara berkembang di Asia diperkirakan tetap menjadi motor pertumbuhan perdagangan dunia.

4. Harga Komoditas cenderung berfluktuasi, Harga pangan, energi, pupuk, dan komoditas perkebunan masih berpotensi berfluktuasi akibat dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok global.

5. Investasi bergeser ke Teknologi Hijau dan Digital, Transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), energi terbarukan, dan industri hijau (kendaraan listrik, robotika, pesawat nirawak dan industri sejenis) menjadi pendorong utama investasi global pada tahun 2026.

Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, kondisi ekonomi global juga akan memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi dari berbagai komoditas unggulan; kopi robusta, lada, karet, singkong, gula, jagung, udang serta bermacam produk olahan pertanian. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Apabila permintaan dunia tetap meningkat maka ekspor komoditas unggulan Lampung juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi petani, pelaku usaha, serta industri pengolahan. Namun sebaliknya, perlambatan ekonomi dari negara tujuan ekspor justru akan menekan volume maupun harga komoditas ekspor. Demikian pula pengaruh Inflasi global yang amat dipengaruhi harga minyak dunia, yang akan berdampak terhadap biaya transportasi, logistik, distribusi pangan dan harga pupuk. Hal ini juga sangat berpotensi meningkatkan inflasi daerah.

Melihat berbagai aspek dari kondisi ekonomi global, dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi yang berbasis pertanian menjadikan Lampung sensitif terhadap perubahan harga komoditas global, namun di sisi lain membuka peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat hilirisasi industri. Dengan penguatan investasi, infrastruktur, serta transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, Lampung berpotensi mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) **Membangun Ekosistem ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.**

   Provinsi Lampung memegang keyakinan bahwa kekuatan pembangunan ekonomi daerah terletak di akar rumput—di desa-desa yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan

lebih dari 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pedesaan, Lampung menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan yang harus diberdayakan, disambungkan, dan dinaikkan kelasnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Lampung tahun 2025–2026 dan ke depan diarahkan untuk membentuk ekosistem desa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing dalam jaringan ekonomi yang lebih luas.

2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.

Upaya meningkatan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat

Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran

4) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki

kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik full employment. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan *demand* dan *supply* di pasar kerja.

5) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat booming namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

6) Pemerataan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

3.1.5. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2026

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan perekonomian daerah terkini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai tantangan, peluang, dan prospek pembangunan yang akan dihadapi, Pemerintah Provinsi Lampung juga mencermati arah kebijakan nasional dan berbagai langkah strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan asumsi dasar makro ekonomi daerah Tahun 2026 mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2026	Sasaran pada APBD 2026	Capaian s/d Tw 1 2026	Sasaran pada Perubahan RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,7	5,2–5,7	5,58	5,3 - 5,8
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	54,0-56,0	54,0 – 56,0	55,01 (Capaian 2025)	58,00 - 62,00
3	Kontribus PDRB Provinsi (Persen)	2,2	2,2	2,146	2,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 - 9,90	9,90-8,90	9,66	8,90- 9,65
5	Indeks Gini	0,274 - 0,290	0,290-0,274	0,287 (Capaian Sept 2025)	0,274-0,286
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,55	0,55	0,53 (Capaian 2023)	0,55
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,80-74,4	73,8-74,4	73,98 (capaian 2025)	74,00-74,40
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	62,41– 64,03	62,41 – 64,03	55,30 (Angka sementara 2025)	62,41– 64,03
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,2	N A	73,81 (Capaian 2025)	74,48
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51 - 4,05	3,51 - 4,05	3,95 (Capaian Febriari 2026)	3,51 – 4,05

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap berbagai perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan dengan perkembangan kondisi aktual, baik yang berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK dan adanya perubahan kerangka kebijakan keuangan negara tahun 2026.

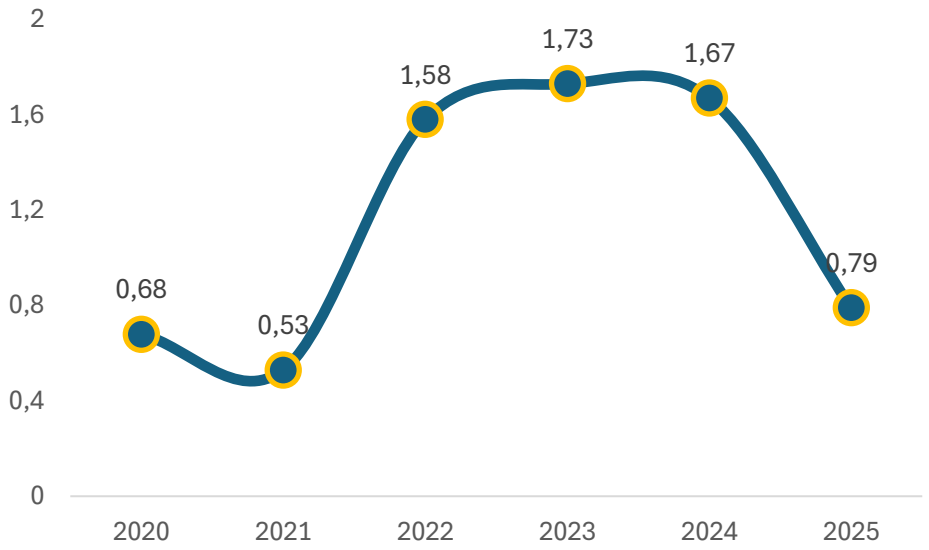
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan penyelarasan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah dengan arah dan sasaran pembangunan nasional, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Penyelarasan tersebut diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, sinergi, dan saling mendukung dalam pencapaian target pembangunan baik daerah maupun nasional.

Arah Kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 sendiri ditujukan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2021 hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2023. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, kapasitas fiskal kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2025.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Dari sisi global, meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, telah memberikan tekanan terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh berlanjutnya konflik Rusia–Ukraina serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan pasar global. Sementara itu, dari sisi domestik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dinamika kebijakan fiskal nasional turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.

Berbagai faktor tersebut berdampak pada menurunnya kapasitas fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: Kemenkeu RI, 2026

Grafik 3. 11 Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung 2020-2025

Memperhatikan kondisi di atas, maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Lampung pada perubahan RKPD Tahun 2026 ini difokuskan pada:

1. Optimalisasi pendapatan daerah secara terukur, realistis, dan berkelanjutan melalui penguatan kinerja pemungutan pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya beli masyarakat;
2. Peningkatan kualitas belanja daerah yang efektif, efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome based budgeting*), dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan daerah;
3. Pengelolaan pembiayaan daerah yang prudent, produktif, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, mendukung

kesinambungan pembangunan, serta mengantisipasi berbagai risiko dan kebutuhan pendanaan strategis daerah;

4. Penguatan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, melalui penyelarasan kebijakan RKPD dengan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 guna memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tercapainya sasaran pembangunan prioritas daerah, regional, dan nasional;
5. Percepatan pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur, melalui optimalisasi alokasi anggaran, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan pelaksanaan program prioritas yang memberikan manfaat nyata dan cepat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mewujudkan visi Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yaitu *"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"*.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2026

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sebagai sumber utama pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara optimal melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pendapatan daerah Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung pada Semester I Tahun 2026 telah melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis, antara lain melalui program pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, perluasan aksesibilitas dan kemudahan layanan pembayaran pajak, penguatan rekonsiliasi dan koordinasi data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta peningkatan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pendapatan daerah.

Memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga Semester I Tahun 2026, dinamika perekonomian daerah, serta kebutuhan pendanaan pembangunan pada sisa tahun anggaran berjalan, maka kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap diarahkan pada upaya optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, berbagai upaya strategis akan terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak dan penerapan teknologi informasi *(e-tax system*). Penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis. Beberapa upaya yang akan dilakukan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Samdes (aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis android yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa/ Bumdes di Provinsi Lampung), pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan QR Code Qris BI disemua pelayanan samsat dan juga menambah kanal-kanal pembayaran digital seperti ATM dan Mobile Banking.
4. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung, diantaranya melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).

5. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung dan Mengupayakan adanya *reward* (Gebyar Samsat) bagi masyarakat.
6. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindaklanjut UU Nomor 1 Tahun 2022.
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
8. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah dalam bentuk pertukaran data pajak daerah.
9. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pengawasan penyaluran bahan bakar minyak ke wilayah Lampung.
10. Melakukan pembahasan join audit bersama BPKP Perwakilan Lampung untuk penjualan BBM oleh Wajib Pajak (Wapu) dan pemakai BBM industry ke perusahaan di wilayah Lampung.
11. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian Bahan Bakar Minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar ke Perusahaan di wilayah Lampung.
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
13. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
14. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
15. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder penghasil pendapatan daerah.

16. Bekerjasama dengan BPKAD dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah dalam mengoptimalkan PAD.
17. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
19. Mengoptimalkan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer

Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah.Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif

Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2024–2026 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2024 (Rp)	Realisasi APBD 2025 (Rp)	APBD 2026	Realisasi APBD 2026 (s.d Mei 2026)	% Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	7.451.586.834.830,78	6.712.630.728.622,85	7.012.532.370.311,00	1.001.423.230.966,22	14,28%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	4.039.218.171.476,78	3.345.617.754.494,85	4.025.032.820.130,00	567.727.749.032,22	14,10%
4.1.01	Pajak Daerah	3.301.063.910.591,76	2.654.542.762.519,73	3.231.083.331.000,00	469.924.307.368,21	14,54%
4.1.02	Retribusi Daerah	485.949.536.889,25	526.676.749.091,06	481.946.670.000,00	50.567.220.820,28	10,49%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.520.241.461,01	27.350.092.457,96	202.001.691.000,00	40.658.955.793,85	20,12%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	58.684.482.534,76	137.048.150.426,10	110.001.128.130,00	6.577.265.049,88	5,97%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	3.401.546.333.354,00	3.356.470.884.128,00	2.876.490.559.581,00	431.882.541.934,00	15,01%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.375.379.510.190,00	3.319.225.727.070,00	2.843.560.795.781,00	429.464.778.934,00	15,10%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.166.823.164,00	37.245.157.058,00	32.929.763.800,00	2.417.763.000,00	7,34%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	10.822.330.000,00	10.542.090.000,00	111.008.990.600,00	1.812.940.000,00	1,63%
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.822.330.000,00	10.542.090.000,00	111.008.990.600,00	1.812.940.000,00	1,63%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	

Sumber : Bappeda, Diolah, 2026

Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2026 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026	Realisasi APBD 2026 (Mei 2026)	Proyeksi P-RKPD 2026	Bertambah/Berkurang
4	**PENDAPATAN DAERAH**	7.012.532.370.311,00	1.001.423.230.966,22	6.992.864.757.010,00	-19.667.613.301,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	4.025.032.820.130,00	567.727.749.032,22	4.007.634.413.730,00	-17.398.406.400,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.231.083.331.000,00	469.924.307.368,21	3.197.083.331.000,00	-34.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	481.946.670.000,00	50.567.220.820,28	498.548.263.600,00	16.601.593.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	202.001.691.000,00	40.658.955.793,85	202.001.691.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.001.128.130,00	6.577.265.049,88	110.001.128.130,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	2.876.490.559.581,00	431.882.541.934,00	2.874.221.352.680,00	-2.269.206.901,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.843.560.795.781,00	429.464.778.934,00	2.843.560.726.000,00	-69.781,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.929.763.800,00	2.417.763.000,00	30.660.626.680,00	-2.269.137.120,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	111.008.990.600,00	1.812.940.000,00	111.008.990.600,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	111.008.990.600,00	1.812.940.000,00	111.008.990.600,00	0,00

Sumber : Bappeda, Diolah, 2026

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2026

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diarahkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better)* agar lebih efisien dan produktif yang dilakukan melalui :

- Penataan Belanja Pegawai yang bersumber dari hasil rekonsiliasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2026 berdasarkan perkembangan kebutuhan riil pegawai, hasil pemutakhiran data kepegawaian, penyesuaian kebijakan penggajian dan tunjangan, serta pemenuhan belanja pegawai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memprioritaskan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota DPRD; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; serta kebutuhan operasional rutin perkantoran yang wajib diselenggarakan.
- Mengalokasi belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Mengarahkan Belanja Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan program prioritas daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, Asta Cita, tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Memprioritaskan pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan provinsi serta perkuatan ekonomi lokal melalui peningkatan ketahanan pangan dan pariwisata daerah

- Memfokuskan alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja pelayanan publik, sehingga perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kewenangannya.
- Menetapkan alokasi anggaran perangkat daerah berdasarkan target kinerja dan capaian pelayanan publik yang terukur, bukan berdasarkan pemerataan alokasi antar perangkat daerah maupun alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.
- Percepatan pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai upaya mewujudkan target pembangunan prioritas yang memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Lampung.

Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Provinsi Lampung Tahun 2023–2026 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2024 (Rp)	Realisasi APBD 2025 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Realisasi APBD 2026 (s.d Mei 2026)	% Realisasi
5	**BELANJA DAERAH**	**7.506.810.403.825**	**6.686.472.850.674,13**	**7.916.532.370.311,00**	**931.706.010.782,28**	**11,76%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.164.775.276.916**	**4.747.399.472.671,0**	**5.247.615.876.240,58**	**824.990.571.023,27**	**15,72%**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.386.292.035.527	2.675.470.145.118,00	2.899.991.387.983,03	569.917.770.719,00	19,65%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.510.550.970	1.685.839.359.144,19	1.953.092.600.303,05	222.753.475.155,25	11,40%
5.1.03	Belanja Bunga	-		41.297.723.215,00	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-		25.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	797.803.865.119	385.525.364.508,90	350.287.558.960,00	32.291.941.149,02	9,21%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.168.825.300	564.603.900,00	2.921.605.779,50	27.384.000,00	0,93%
5.2	**BELANJA MODAL**	**797.024.095.018**	**1.115.836.984.437,04**	**1.739.168.382.893,58**	**106.675.439.759,01**	**6,13%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.077.864.999**	**1.493.747.989,00**	**40.000.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,10**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.077.864.999	1.493.747.989,00	40.000.000.000,00	40.000.000,00	**0.10**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.543.933.166.892**	**821.742.645.577,00**	**889.748.111.176,84**	**-**	**-**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.543.933.166.892	810.742.645.577,00	847.788.111.176,84	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	11.000.000.000,00	41.960.000.000,00	-	-

Sumber : Bappeda, Diolah, 2026

Tabel 3. 13 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Belanja Provinsi Lampung Tahun 2026 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026 (Rp)	Realisasi APBD 2026 (s.d Mei 2026)	Proyeksi P-RKPD 2026	Bertambah/Berkurang
5	**BELANJA DAERAH**	**7.916.532.370.311,00**	**931.706.010.782,28**	7,896,864,757,010.00	(19,667,613,301.00)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.247.615.876.240,58**	**824.990.571.023,27**	5,227,948,262,939.58	(19,667,613,301.00)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.899.991.387.983,03	569.917.770.719,00	2,755,373,853,704.29	(144,617,534,278.74)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.953.092.600.303,05	222.753.475.155,25	2,078,042,521,280.79	124,949,920,977.74
5.1.03	Belanja Bunga	41.297.723.215,00	-	41.297.723.215,00	0
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0
5.1.05	Belanja Hibah	350.287.558.960,00	32.291.941.149,02	350.287.558.960,00	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.921.605.779,50	27.384.000,00	2.921.605.779,50	0
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.739.168.382.893,58**	**106.675.439.759,01**	**1.739.168.382.893,58**	**0**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40.000.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**0**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000.000,00	0
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**889.748.111.176,84**	**-**	**889.748.111.176,84**	**0**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	847.788.111.176,84	-	847.788.111.176,84	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	41.960.000.000,00	-	41.960.000.000,00	0

Sumber : Bappeda, Diolah, 2026

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2026

Pembiayaan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin dinamis, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, serta mendukung stabilitas keuangan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan ketidakpastian ekonomi.

Selama periode Tahun 2022–2025, realisasi pembiayaan daerah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, antara lain melalui pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan kebutuhan penguatan kinerja dan pelayanan publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan kondisi fiskal daerah, kebutuhan pendanaan pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung terciptanya struktur APBD yang sehat, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi maupun kebijakan fiskal nasional. Pembiayaan daerah juga diharapkan mampu menjadi instrumen penyangga fiskal guna menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas daerah, khususnya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Penetapan SiLPA definitif ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pos pendapatan dan belanja. Pemanfaatan SiLPA juga dilakukan secara selektif dan terukur untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung tetap membuka peluang pemanfaatan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alternatif pembiayaan daerah yang mempertimbangkan kapasitas fiskal, kemampuan pengembalian, serta risiko fiskal daerah. Setiap kebijakan pembiayaan akan dilaksanakan secara hati-hati *(prudent)* dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang. Pengeluaran pembiayaan dapat dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD yang memiliki prospek usaha dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembentukan dana cadangan sesuai kebutuhan daerah, pembayaran pokok utang daerah apabila diperlukan, serta bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pengeluaran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memastikan bahwa setiap kebijakan pengeluaran pembiayaan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan tidak membebani kondisi fiskal daerah pada masa yang akan datang.

Apabila dalam pelaksanaan APBD terdapat SiLPA Tahun Berjalan yang positif, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung program dan kegiatan prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan yang mendesak dan strategis. Sebaliknya, apabila terjadi potensi defisit atau SiLPA Tahun Berjalan yang lebih rendah dari perkiraan, maka

penyesuaian akan dilakukan melalui pengendalian belanja, penajaman prioritas program dan kegiatan, serta pengurangan pengeluaran pembiayaan yang tidak bersifat wajib guna menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah.

Dengan kebijakan tersebut, pembiayaan daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyeimbang APBD, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan, meningkatkan ketahanan fiskal daerah, serta memperkuat kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;
2) Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang sebagai kewajiban atas pinjaman yang telah dilaksanakan.
3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan**.**

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 – 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2024 (Rp)	Realisasi APBD 2025 (Rp)	APBD 2026 (Rp)	Realisasi APBD 2026 (s.d Mei 2026)	% Realisasi
6	**Pembiayaan Daerah**	**931.706.010.782,28**	**69.897.281.620,32**	**904.000.000.000,00**	**-**	**-**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**824.990.571.023,27**	**69.897.281.620,32**	**1.004.000.000.000,00**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	569.917.770.719,00	69.897.281.620,32	4.000.000.000,00	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	1000.000.000.000,00	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**100.000.000.000,00**	**-**	**-**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	100.000.000.000,00	-	-

Sumber : BPKAD, Diolah, 2026

Tabel 3. 15 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	APBD 2026	Realisasi APBD 2026 (s.d Mei 2026)	Proyeksi P-APBD 2026	Bertambah/Berkurang
6	**Pembiayaan Daerah**	**904.000.000.000,00**	**-**	998.323.122.951,69	94.323.122.951,69
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.004.000.000.000,00**	**-**	1.098.323.122.951,69	94.323.122.951,69
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.000.000.000,00	**-**	98.323.122.951,69	94.323.122.951,69
6.1.04	Penerimaan Pinjaman daerah	1000.000.000.000,00	**-**	100.000.000.000,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**100.000.000.000,00**	**-**	100.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	100.000.000.000,00	**-**	100.000.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD, Diolah, 2026

3.2.4 Kebijakan Penerimaan Pinjaman daerah Perubahan Tahun 2026

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Provinsi lampung diarahkan pada pemanfaatan dana Penerimaan Pinjaman Daerah yang berasal dari Bank Jawa Barat (BJB). Dalam hal pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta strategi kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung agenda peningkatan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan investasi.

Dengan pemanfaatan skema pembiayaan pinjaman daerah diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat lebih cepat terealisasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, sekaligus menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani kapasitas fiskal daerah. Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pinjaman daerah pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Dalam rangka mempercepat peningkatan kemantapan jalan provinsi sekaligus mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2026 menguapayakan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan melalui skema pinjaman daerah senilai satu triliun rupiah. Pemanfaatan skema pembiayaan tersebut merupakan upaya percepatan penyediaan infrastruktur pada koridor-koridor strategis yang

memiliki peran penting dalam menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan produksi, kawasan pariwisata, pusat pelayanan, serta simpul-simpul distribusi barang dan jasa di Provinsi Lampung. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan daya saing daerah.

Pada tahap awal penyusunan rencana, pembiayaan melalui skema pinjaman daerah diprioritaskan untuk penanganan 14 ruas jalan provinsi yang dipilih berdasarkan fungsi strategis jaringan jalan, tingkat pelayanan terhadap pergerakan orang dan barang, kontribusinya dalam mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, tingkat kerusakan jalan, serta kesiapan teknis pelaksanaan. Seiring perkembangan proses perencanaan dan hasil evaluasi teknis, dilakukan penyempurnaan terhadap komposisi ruas yang akan dibiayai melalui skema pinjaman daerah agar selaras dengan perkembangan sumber-sumber pendanaan infrastruktur.

Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui optimalisasi alokasi pembiayaan, seiring sebagian penanganan pada koridor Lempasing–Padang Cermin–Teluk Kiluan memperoleh dukungan pendanaan melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD). Kondisi tersebut memberikan ruang untuk memperluas cakupan manfaat pembiayaan pinjaman daerah dengan mengakomodasi penanganan pada ruas-ruas strategis lainnya yang memiliki urgensi tinggi terhadap peningkatan konektivitas wilayah dan pelayanan jaringan jalan provinsi.

Berdasarkan hasil penyempurnaan tersebut, cakupan penanganan yang semula direncanakan sebanyak 14 ruas jalan berkembang menjadi 17 ruas jalan, melalui penambahan ruas Sp. Teluk Kiluan–Sp. Umbar, Kalirejo–Pringsewu, dan Wates–Metro. Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan konstruksi dan pengendalian pekerjaan di lapangan, penanganan ruas Gedong Aji–Umbul Mesir dilaksanakan dalam dua paket pekerjaan. Dengan demikian, usulan akhir pembiayaan melalui skema pinjaman daerah mencakup 17 ruas jalan yang dilaksanakan dalam 18 paket pekerjaan dengan total panjang penanganan sekitar 63,807 kilometer.

Adapun data pembangunan jalan provinsi yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pinjaman daerah pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26 : Rencana penanganan Ruas jalan dari Pinjaman daerah

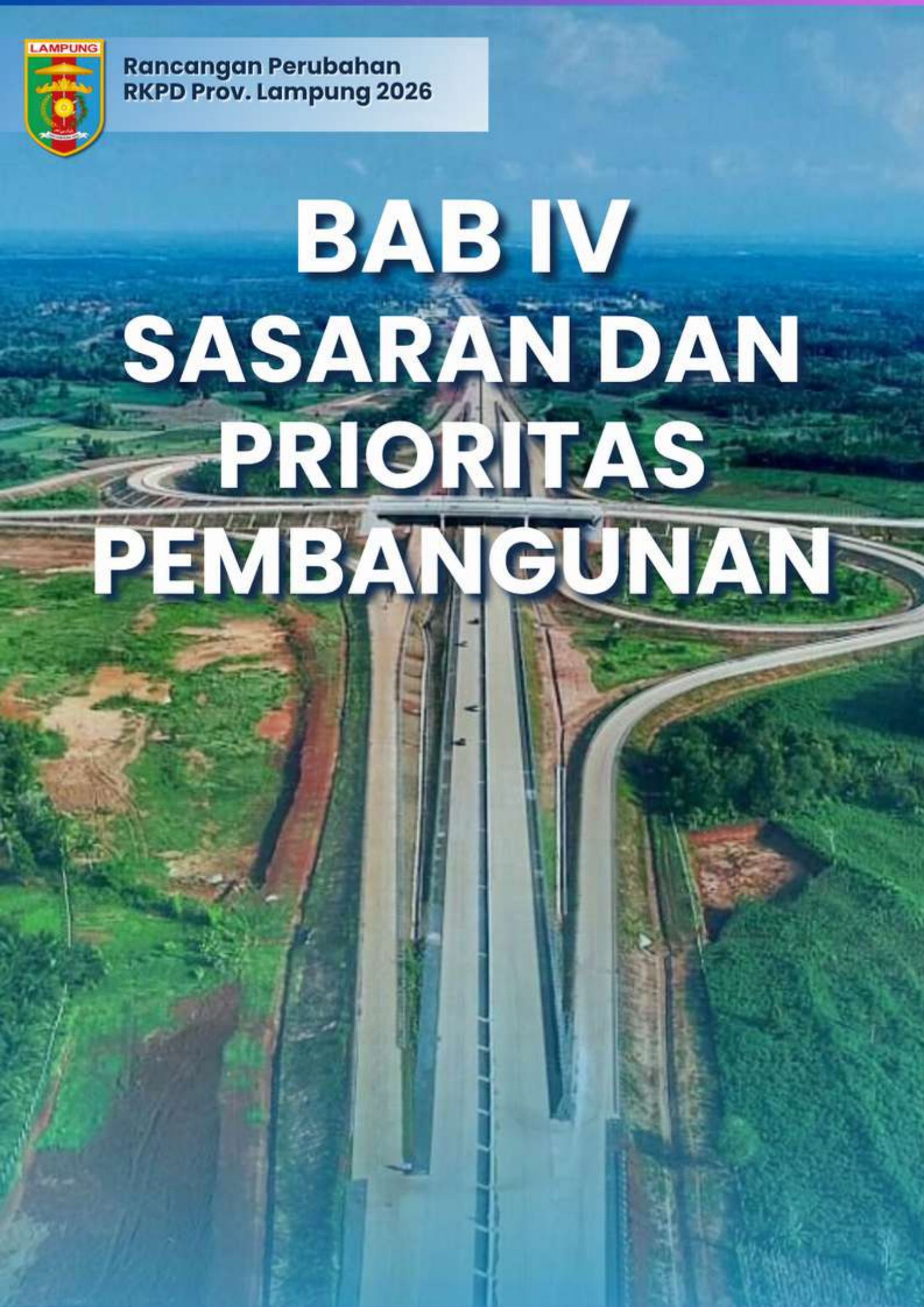
NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
1	2026	Preservasi Jalan Ruas Kasui - Air Ringkih (Bts. Sumsel) (Link. 075)	KASUI - AIR RINGKIH (BTS SUMATERA SELATAN)	RIGID	80	12+700 - 12+780
				RIGID	2,748	12+950 - 15+698
				RIGID	1,052	15+950 - 17+002
				RIGID	200	19+920 - 20+120
				RIGID	132	20+168 - 20+300
				RIGID	240	20+460 - 20+700
				RIGID	540	21+460 - 22+000
				RIGID	648	22+500 - 23+148
2	2026	Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan R.E. Martadinata (B.Lampung) (Link. 041.12.K)	JALAN RE. MARTADINATA (B.LAMPUNG)	RIGID	3.368	02+500 - 05+868
3	2026	Preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Pringsewu (Link. 033)	KALIREJO - PRINGSEWU	RIGID	1,75	10+600 - 12+350
				FLEXIBLE	200	12+450 - 12+650
				RIGID	750	12+650 - 13+400
4	2026	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Lempasing - Padang Cermin (Link. 042)	LEMPASING - PADANG CERMIN	RIGID	2.52	0+000 - 2+520
5	2026	Preservasi Jalan Ruas Jabung - Sp. Labuhan Maringgai (Link. 006)	JABUNG - SP. LABUHAN MARINGGAI	RIGID	100	19+800 - 19+900
				RIGID	160	20+590 - 20+750
				RIGID	35	20+800 - 20+835
				FLEXIBLE	3,12	16+680 - 19+800
				FLEXIBLE	690	19+900 - 20+590
				FLEXIBLE	50	20+750 - 20+800
				FLEXIBLE	2,127	20+835 - 22+962
6	2026	Pelebaran Penambahan Lajur Jalan Ruas Sp. Korpri - Purwotani (Link. 016)	SP. KORPRI - PURWOTANI	RIGID	180	2+550 - 2+730
				RIGID	8,322	6+022 - 14+164
7	2026	Preservasi Jalan Ruas Bandar Jaya - Sp. Mandala (Link. 022)	BANDAR JAYA - SP. MANDALA	RIGID	850	0+700 - 01+570
				FLEXIBLE	1,13	1+570 - 2+700
				FLEXIBLE	700	5+500 - 6+200
				RIGID	425	11+550 - 11+975
				RIGID	850	12+100 - 12+950
				FLEXIBLE	20	12+950 - 12+970
				FLEXIBLE	20	13+680 - 13+700
				RIGID	500	13+700 - 14+200
				FLEXIBLE	20	14+200 - 14+220
				RIGID	1,65	19+550 - 21+200
				RIGID	1,7	21+700 - 23+400
				RIGID	1,7	23+800 - 25+500
				FLEXIBLE	20	25+500 - 25+520

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
				FLEXIBLE	20	29+730 - 29+750
				RIGID	300	29+750 - 30+050
				FLEXIBLE	20	30+050 - 30+070
				RIGID	650	30+400 - 31+050
				RIGID	200	31+150 - 31+350
8	2026	Preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Bangunrejo (Link. 025)	KALIREJO - BANGUNREJO	RIGID	200	00+000 - 00+200
				RIGID	2	01+100 - 03+100
				RIGID	1,6	04+900 - 06+500
				RIGID	1,735	11+265 - 13+000
9	2026	Preservasi Jalan Ruas Wates - Metro (Link. 027)	WATES - METRO	RIGID	525	04+495 - 05+020
				RIGID	820	06+000 - 06+820
10	2026	Preservasi Jalan Ruas Padang Ratu - Pekurun Udik (Link. 030)	PADANG RATU - PEKURUN UDIK	RIGID	3.5	—
11	2026	Preservasi Jalan Ruas Padang Ratu - Kalirejo (Link. 032)	PADANG RATU - KALIREJO	RIGID	375	6+400 - 6+775
				RIGID	500	9+350 - 9+850
				RIGID	1,55	11+950 - 13+500
				RIGID	2,46	14+700 - 17+160
				RIGID	600	18+000 - 18+600
				RIGID	500	19+200 - 19+700
				RIGID	515	21+735 - 22+250
12	2026	Preservasi Jalan Ruas Tegal Mukti - Tajab (Link. 088)	TEGAL MUKTI - TAJAB	FLEXIBLE	1,164	0+000 - 01+528
				FLEXIBLE	822	12+300 - 13+122
				FLEXIBLE	530	13+597- 14+127
				FLEXIBLE	2,429	14+898- 17+327
				FLEXIBLE	3,992	17+585- 21+577
13	2026	Preservasi Jalan Ruas Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar (Link. 044)	SP. TELUK KILUAN - SP. UMBAR	RIGID	2.671	0+950 - 3+621
14	2026	Preservasi Jalan Ruas Sp. Umbar - Putih Doh (Link. 045)	SP. UMBAR - PUTIH DOH	RIGID	570	4+435 - 5+000
				RIGID	900	5+100 - 6+000
				RIGID	350	6+000 - 6+350
				RIGID	200	7+200 - 7+400
				RIGID	200	7+500 - 7+700
				RIGID	400	8+600 - 9+000
				RIGID	100	9+350 - 9+450
15	2026	Preservasi Jalan Ruas Suoh - Sp. Blok 9 (Link. 049)	SUOH - SP. BLOK 9	RIGID	1,05	1+350 - 2+300
				RIGID	4,18	3+020 - 7+300
16	2026	Preservasi Jalan Ruas Gedong Aji - Umbul Mesir (Link. 093) di Kabupaten Tulang Bawang 1 (Pinjaman Daerah)	GEDONG AJI - UMBUL MESIR	RIGID	6.302	0+850 - 7+152
17	2026	Preservasi Jalan Ruas Gedong Aji - Umbul Mesir 2 (Link. 093) di Kabupaten Tulang Bawang 2 (Pinjaman Daerah)	GEDONG AJI - UMBUL MESIR	RIGID	5.663	25+837 - 31+500
18	2026	Preservasi Jalan Ruas Brabasan - Wiralaga (Link.	BRABASAN - WIRALAGA	RIGID	556	5+644 - 6+200
				RIGID	300	6+600 - 6+900

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
		095) di Kabupaten Mesuji (Pinjaman Daerah)		RIGID	800	7+300 - 8+100
				RIGID	1,1	8+400 - 9+500
				RIGID	2,2	10+500 - 12+700
				RIGID	600	14+400 - 15+000
				RIGID	350	15+350 - 15+700
				RIGID	300	21+100 - 21+400
				RIGID	300	21+900 - 22+200
				RIGID	2,319	27+124 - 29+443
		TOTAL			**63,807**	

Rancangan Perubahan
RKPD Prov. Lampung 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Presiden menekankan agar berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengangkat tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 4.1.





Keterangan: *) Enam Direktif Presiden
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Gambar 4. 1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan antara lain dilakukan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Selain itu, swasembada pangan memerlukan penguatan tata kelola sistem pangan, yaitu melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) menjadi lembaga di bawah Presiden, untuk mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran etanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi *biofuel*, meningkatkan pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Sementara itu, swasembada air antara lain dilakukan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir agar meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum, disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui transformasi digital pemerintah yang difokuskan pada (i) pengembangan arsitektur pemerintah digital; (ii) penguatan keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan

publik terintegrasi sesuai proses bisnis tematik; dan (iii) implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital.

Selanjutnya, investasi merupakan salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Investasi didorong tidak hanya dengan peningkatan nilai realisasi investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong produktivitas ekonomi.

Transformasi digital menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya saing nasional di tingkat global, membangun kegiatan sosial yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta perkembangan teknologi digital, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan peningkatan produktivitas.

Riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi diarahkan melalui pendekatan ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi serta mudah dimengerti oleh berbagai *stakeholder*. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, peningkatan kapasitas iptekin akan dilakukan melalui peningkatan peran lembaga intermediasi yang ada di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), *Science Techno Park* (STP), pusat diseminasi, *Transfer Technology Office* (TTO), dan inkubator, sehingga riset dan inovasi dapat lebih terarah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas

(*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Melalui kebijakan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi yang tecermin dari terkendalinya inflasi dan nilai tukar rupiah, serta ketahanan sektor eksternal.

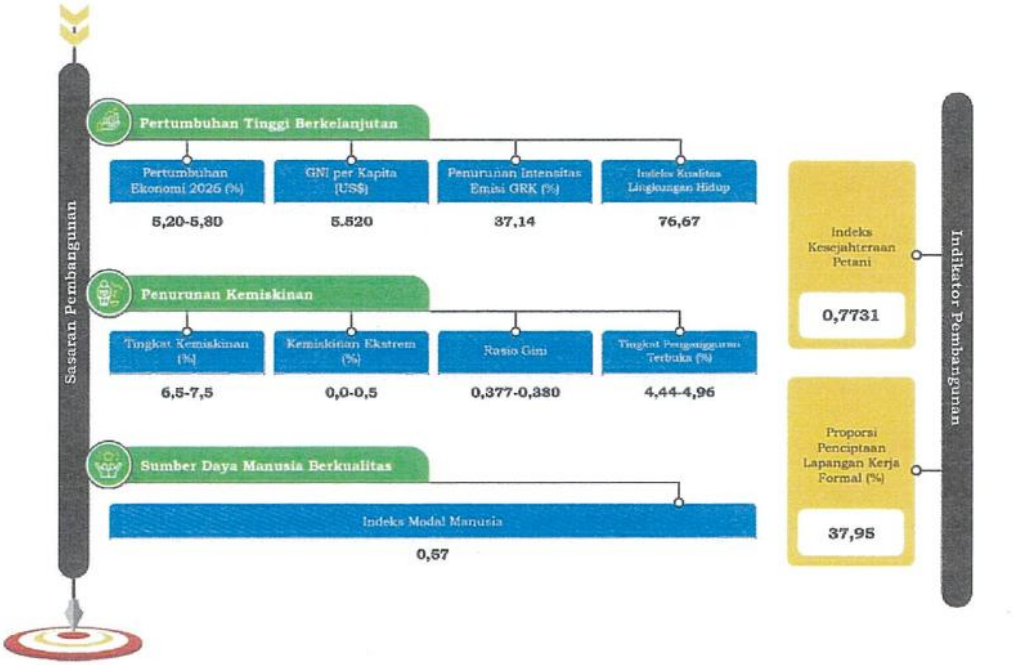
Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, percepatan hilirisasi utamanya dilakukan melalui konstruksi dan operasionalisasi smelter yang mendukung penambahan kapasitas produksi industri olahan nikel.

Kebijakan pembangunan RKP tahun 2026 disusun selaras dengan Direktif Presiden untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 dan menjawab isu strategis yang menjadi perhatian Presiden. Adapun enam Direktif Presiden yaitu 1) ekosistem makan bergizi gratis; (2) pengelolaan sampah terpadu; (3) sekolah rakyat; (4) digitalisasi pendidikan; (5) percepatan pengentasan kemiskinan; serta (6) koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2026 yang didasarkan pada tiga pilar, yaitu pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia berkualitas.

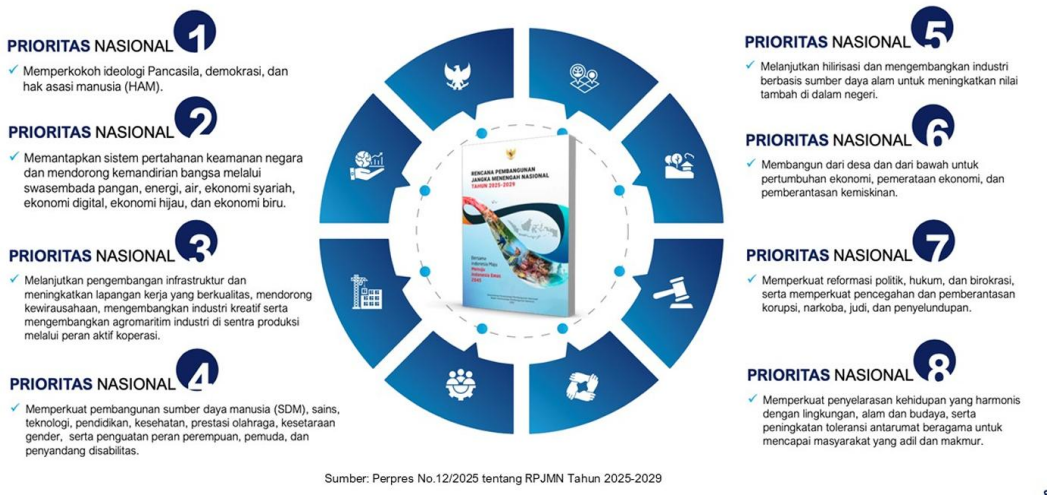
Sasaran pembangunan tahun 2026 dalam pilar pertumbuhan tinggi berkelanjutan mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20-5,80 persen, *Gross National Income* (GNI) per kapita di angka US$ 5.520, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 37,14 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup di angka 76,67. Pada pilar penurunan kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,50-7,50 persen, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0,0-0,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44-4,96, serta rasio gini di angka 0,377-0,380. Terakhir, pada pilar

sumber daya manusia berkualitas, Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,57. Sementara itu, untuk menjamin pemerataan pertumbuhan yang berkualitas, dituangkan dua indikator pembangunan yaitu Indeks Kesejahteraan Petani di angka 0,7731 dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal sebesar 37,95 persen. Secara lengkap, penjabaran sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 tertuang dalam Gambar 3.2. Sasaran Pembangunan RKP 2026 khususnya pertumbuhan tinggi berkelanjutan melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan GNI per kapita telah diulas pada Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro (terutama di Subbab 2.3.1). Selanjutnya, sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 yang lain diuraikan secara lebih detail sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 4. 3 Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif, dan merata.Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan agar berjalan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menghasilkan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan produktif. Demokrasi sebagai sistem politik Indonesia perlu terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya dari prosedural menuju arah substansial dengan menjamin kebebasan dan kesetaraan untuk mendorong keterbukaan akses bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperoleh sumber daya di berbagai sektor. Demokrasi yang berkualitas menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kelompok rentan.

Hal ini diupayakan melalui penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Penataan dan penguatan sistem komunikasi publik dan media diperlukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tingkat kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi yang transparan dan akuntabel dapat mencegah misinformasi (*hoax*), dan mendukung kebijakan publik menjadi lebih efektif serta diterima oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, sistem komunikasi publik dan media juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital serta menyasar pada seluruh komponen masyarakat.

Dalam kehidupan berdemokrasi, media massa memiliki peranan penting sebagai kanal informasi, media literasi, pengawas kebijakan, serta bentuk transparansi pemerintah bagi masyarakat luas. Transformasi digital pada dunia pers dan media merupakan inovasi penting dalam menjamin kebebasan pers yang berintegritas dan berkelanjutan, serta sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada kebijakan dan pelaksanaanpembangunan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, serta Bertanggung Jawab, Edukatif, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S), yang selanjutnya berdampak pada independensi dan keberlanjutan dunia pers dan media di masa depan.

Fondasi pembangunan harus sejalan dengan pengarusutamaan HAM, agar setiap individu memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan inklusif, perlindungan HAM, serta penghapusan diskriminasi. Dengan integrasi nilai Pancasila, penguatan demokrasi, dan HAM, RKP Tahun 2026 memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terselenggara secara inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif, dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Sasaran Utama dalam Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 yang tercantum pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Utama pada Prioritas 1

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
1	Indeks Demokrasi Indonesia[1]	79,81	81,69–85,23	82,12–85,66
2	Indeks HAM[2]	2,70 (2023)	2,75	2,80

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS); dan 2) Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1

Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; (iv) penguatan kesetaraan masyarakat sipil; serta (v) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan

produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

Penguatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan postur pertahanan, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan berbasis teknologi, serta optimalisasi komponen cadangan dan komponen pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan nasional. Sementara kemandirian di sektor strategis difokuskan pada kebijakan pangan, energi, dan air dengan mengadopsi pendekatan *nexus* pangan, energi, dan air (*FEW Nexus*) secara berkelanjutan.

Kemandirian juga dibangun berbasis Ekonomi Pancasila dengan prinsip pertama untuk memperkuat ekonomi yang religius dan sekaligus berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini dilaksanakan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kemandirian perekonomian juga dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, ketahanan nasional juga diperkuat melalui diplomasi yang proaktif dan adaptif untuk memperluas jejaring kerja sama strategis, memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional, serta mendorong kepemimpinan Indonesia sebagai aktor penting dalam perdamaian dan pembangunan global. Pelaksanaannya diwujudkan melalui pengembangan ekonomi digital, hijau dan biru. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, seperti pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), penguatan transisi energi berkeadilan, penguatan ekonomi dan industri digital, serta perluasan kontribusi ekonomi hijau dan biru. Regulasi dan kelembagaan juga diperkuat untuk memastikan koordinasi dan integrasi di setiap sektor berjalan efektif, untuk mencapai kemandirian dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sasaran Utama pada Prioritas 2

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan				
1	Asia Power Index (*Military Capability*)	15,7	16,0	17,0
2	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	65,6	65,7	65,8
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,80 (2020)	67,50	68,00
4	*Global Cybersecurity Index*	100	100	95
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	61
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 [a]	73,2	75,4
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,67	3,16	2,8-3,1
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) [b]	8,27	7,21	6,55
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)				
9	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,82
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) [b]	14,68	16,00	16-20
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*)				
11	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,50
12	Kapasitas Tampungan Air (m^3/kapita) [b]	59,59	58,99	59,39
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24,00 (2020)	39,20	42,24
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) [b]	10,25	12,50	17,00
Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan				
15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	3 (2023)	3	3
16	*Indonesia Blue Economy Index* (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	41,26
17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	43	41

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
18	Indeks Ekonomi Hijau	60,37 (2023)	68,34	71,80
19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64 (2023)	58,00	60,00
20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)[b]	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	28 (17 terdaur ulang)
21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)[b]	17,47 (2023)	18,37	19,07
22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)[b]	28,53 (2023)	26,67	27,35
23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,47
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,53 (2024)	76,49	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
Keterangan: a) sementara; b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kemandirian Bangsa menuju Swasembada Pangan, Energi, dan Air dalam Memenuhi Kebutuhan secara Berkelanjutan dengan Pendekatan *FEW Nexus*;
3. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan

infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung pencapaian kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Dalam upaya ini, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pengembangan konektivitas multimoda dan layanan digital, termasuk infrastruktur keantariksaan, serta transisi energi listrik ramah lingkungan yang tidak hanya memperlancar distribusi pangan dan energi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan. Pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan akan didorong untuk menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi ekonomi daerah. Selain itu, pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan aset sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan memperkuat pembiayaan sektor strategis, termasuk pertanian, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing juga didorong melalui peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong kewirausahaan. Peningkatan peran aktif koperasi dilakukan sebagai upaya strategis dalam mengintegrasikan petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya ke dalam ekosistem produksi yang lebih modern dan efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, sasaran pembangunan tahun 2026 telah dirumuskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Utama pada Prioritas 3

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,00 (2019)	46,50	47,00
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	169,10	182,00	188,60
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,21	60,12	64,51
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6,81	7,20	7,63
5	Aset Asuransi/PDB (%)[a]	8,93	9,10	9,30
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,72	57,80	59,90
7	Total Kredit/PDB (%)	35,35	37,80	38,46
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70 (2023)	91,00	91,50
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50[b]	35,00	37,95
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,97	1,10	1,12
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,15
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,18
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,72 (2022)	4,20–4,30	4,60–4,70
14	Devisa Pariwisata (miliar USD)	16,71	17,10–18,30	22,00–24,70
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,92	7,30–7,90	7,40–8,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib; b) Angka Realisasi 2024 Sakernas Agustus 2024 (BPS)

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.
3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

4.4 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (*human capabilities*) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya. Visi pembangunan manusia seutuhnya diwujudkan melalui penciptaan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan ini dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu layanan dasar yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pengembangan anak usia dini holistik integratif, pendidikan dasar dan menengah, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah; penguatan modal manusia melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, serta pembudayaan dan prestasi olahraga; dan penguatan modal sosial budaya yang meliputi agama, kebudayaan, pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, serta keluarga dan pengasuhan. Seluruhnya dilaksanakan

dengan pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta pengendalian pertumbuhan penduduk agar tumbuh seimbang.
Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta memastikan akses bagi penduduk dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan penduduk yang tinggal di wilayah dengan hambatan geografis. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Meskipun kinerja pembangunan manusia menunjukkan tren positif, upaya akseleratif masih diperlukan untuk mencapai target peningkatan produktivitas pada tahun 2026. SDM yang terampil, berdaya saing, dan memiliki karakter unggul diperlukan untuk menjawab tantangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Keberhasilan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas pada tahun 2026 diwujudkan melalui lima sasaran utama pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran Utama pada Prioritas 4

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)	9,22[1]	9,33	9,45
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,21[1]	13,32	13,36
3	Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	 359 (2022)[3] 366 (2022)[3] 383 (2022)[3]	 396 404 416	 396 404 416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	 63,06 55,92	 64,89 57,36	 65,89 58,86
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)[c]	32,00[2]	33,94	34,92
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,20[2]	11,11	11,49
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,14[2]	68,32	68,50
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,15[2]	74,43	74,68
9	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,11[4]	2,10	2,10
10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)[c]	189 (2020)[2]	122	109
11	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)[c]	19,80[5]	18,80	17,50
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)[c]	387 (2023)[6]	329	252
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)[c]	98,42[7]	98,60	98,70
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	73,83
15	Indeks Perlindungan Anak[a]	68,29 (2023)	70,19	72,33
16	Indeks Pembangunan Pemuda[b]	62,88	65,16	67,24
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,421[2]	0,407	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85[2]	92,02–92,11	92,11–92,21
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94,00	94,50
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69,00	69,50
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	54	53	52
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,44–4,96
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)[c]	0,28 (2020)	0,30	0,31
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)[c]	56,42	56,30–58,80	56,40–59,31

Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
25	Peringkat pada Asian Games (peringkat)	13 (2023)[8]	- [d]	9–11[8]
26	Peringkat pada Asian Para Games (peringkat)	6 (2023)[9]	- [d]	5–7[9]
27	Peringkat pada ASEAN Para Games (peringkat)	1 (2023)[10]	- [d]	1–2[10]
28	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Aktif Berolahraga (%)	9,06	10,36–11,45	10,80–11,94[1]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah);
Keterangan Sumber: 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN; 8) Olympic Council of Asia; 9) Asian Paralympic Committee; 10) ASEAN Para Sports Federation
Keterangan Indikator: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaruan konsep dan indikator penyusun; dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional; d) ajang olahraga tidak diagendakan pada tahun tersebut.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 4

Dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
2. Kesehatan untuk Semua;
3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
5. Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat;

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, hilirisasi industri, termasuk yang berbasis sumber daya hayati, perlu diperkuat agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih berdaya saing. Dengan industri yang lebih efisien dan produktif, ketersediaan pangan dan energi serta produk olahan lainnya akan lebih stabil dan

berkelanjutan. Produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi yang meningkat juga akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tidak hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor pendukung lainnya seperti jasa, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif dan berdaya saing, termasuk yang berbasis hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk memastikan industri tersebut dapat beroperasi secara optimal dan kompetitif, diperlukan kinerja logistik yang andal, efektif, dan efisien. Infrastruktur konektivitas yang memadai, seperti jaringan transportasi yang efisien serta sistem distribusi yang terintegrasi, sangat penting untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Selain itu, kinerja logistik yang andal dan merata juga akan mempercepat distribusi, memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk tersebut, serta membuka peluang usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Sasaran Utama pada Prioritas 5

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,98[a]	20,80	21,20
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	13,30
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,15[a]	29,0	29,0
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,2	21,8	22,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
Keterangan Sumber: [a]BPS

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan;
2. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif.

Perlindungan sosial adaptif merupakan perlindungan sosial yang menjawab dinamika ekonomi nasional maupun global, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bencana. Perlindungan sosial yang responsif dan inklusif dicapai melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif sehingga sesuai dengan risiko, kerentanan, dan kedaruratan yang dihadapi seluruh penduduk. Perlindungan sosial termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi sosial, layanan sosial, dan perawatan yang diberikan kepada penduduk dengan kerentanan

tertentu. Upaya akselerasi graduasi dari kemiskinan, kemudian melalui upaya integrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang afirmatif, mencakup peningkatan kapasitas, perluasan akses, serta pendampingan yang intensif dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan menuju kesejahteraan.

Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan menargetkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mendukung upaya digitalisasi penyaluran bantuan dan program yang transparan dan efisien. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi dan memperhatikan daerah tertinggal dan kawasan afirmasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata.

Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Untuk meningkatkan manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap seluruh masyarakat, penguatan bisnis melalui koperasi produksi menjadi salah satu prioritas.

Kota juga dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar dan bersifat inklusif. Pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, maupun layanan dan infrastruktur dasar lainnya. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diarahkan tidak menjadi pusat pemerintahan saja, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan wilayah sekitarnya. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, IKN dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2026 telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sasaran Utama pada Prioritas 6

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan				
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57[1]	7,0–8,1	6,5–7,5
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)[c]	1,26	0,5–1,0	0–0,5
3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,13	17,50	18,20
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)[b]	31,21	32,15	34,99
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	9,07 (2023)	10,00	10,40
Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,25	67,00	68,66
Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan				
7	Proporsi Desa Mandiri (%)	22,85[d]	23,29	23,91[d]
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
8	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)[a]	56,56 (2022)	57,29	57,70
9	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)[b]	44,13 (2022)	44,35	44,58

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
Keterangan Sumber: [1]SUSENAS
Keterangan: a) indikator mencakup Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan dan PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional; b) indikator termasuk dalam indikator RPJPN Tahun 2025-2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029; c) menggunakan US$ 2,15 PPP tahun 2017; d) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 6

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan;
2. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan;
3. Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah;
4. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi

investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui penguatan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kebijakan fiskal menjadi pilar utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola migrasi untuk mendukung perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan fiskal berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Stabilitas makroekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan nasional.

Sebagai pencipta nilai (*value creator*) dan agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan daya saing dan efisiensi dalam penugasan pemerintah. Peningkatan daya saing dan efisiensi BUMN dalam berbagai program strategis, termasuk swasembada energi dan pangan, akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Strategi ini juga didukung oleh Danantara, yang diarahkan untuk meningkatkan investasi serta meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan yang terpadu akan meningkatkan ketahanan sosial dan memastikan terwujudnya generasi produktif yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Melalui strategi ini, reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penguatan industri akan membentuk fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 pada Gambar 4.7 sebagai berikut:

Gambar 4.7 Sasaran Utama pada Prioritas 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)[d]	0,69	0,70
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00–64,99	65,00–66,99
4	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)[d]	0,51	0,52
5	Indeks Integritas Nasional	71,53	74,52	74,52[b]
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	75,69	75,81	72,80
7	Indeks Pemerintah Digital	3,12	3,12	1,70[e]
8	Indeks Pelayanan Publik	4,02	3,48	3,48[c]
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)*)	1,73 (2023)	1,70	1,70[a]
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
11	*Return on Asset* (RoA) BUMN	3,14 (2023)	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,88	12,36	11,71–12,31
13	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24	10,08–11,54
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
Keterangan Sumber: *)Badan Narkotika Nasional
Keterangan: [a] angka target 2026 merupakan angka Target 2025. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika dilakukan penghitungan 2 tahun sekali dengan rentang waktu penghitungan 2025, 2027, dan 2029; [b] Angka Target 2026 merupakan angka Target 2025, Indeks Integritas Nasional dilakukan perhitungan 2 tahun sekali dengan rentang waktu perhitungan 2025, 2027, 2029; [c] Instrumen evaluasi pelayanan publik akan disempurnakan; [d] Pengukuran dilakukan T+1 sehingga pada tahun 2024 dilakukan pengukuran IPH untuk capaian pembangunan hukum tahun 2023; [e] Angka target 2026 merupakan target awal setelah perubahan metodelogi perhitungan dari indeks SPBE ke indeks pemerintah digital.

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 7

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional;
2. Birokrasi Pemerintahan yang adaptif dan Melayani;
3. Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba;
4. Tata Kelola BUMN yang baik;
5. Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal;
6. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.

Selaras dengan itu, optimalisasi pemanfaatan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan perlu terus didorong dengan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah terbukti mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk dalam sistem pertanian berbasis ekologi, konservasi hutan, serta

perlindungan ekosistem laut. Tradisi keagamaan dan budaya juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada upaya mitigasi bencana dan resiliensi terhadap perubahan iklim. Pendekatan berbasis ekosistem dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana menjadi solusi adaptif dalam menghadapi ancaman lingkungan, seperti pengelolaan air, pertanian adaptif, serta perlindungan kawasan rawan bencana. Dalam hal ini, literasi kebencanaan melalui kurikulum pendidikan perlu dikembangkan agar masyarakat dapat adaptif terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, investasi di bidang pengurangan risiko bencana juga harus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana. Dengan memperkuat hubungan antara pembangunan ekonomi, ketahanan bencana dan lingkungan, serta warisan budaya dan nilai-nilai agama, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2026 dirumuskan sasaran pembangunan pada Gambar 4.8 sebagai berikut:

Gambar 4.8 Sasaran Utama pada Prioritas 8

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	*Outlook* 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	66,15
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	58,99
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	77,14
Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,136

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 8

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diarahkan mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih periode 2025-2029, yaitu "**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"** dengan 3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.

CITA KE-1 : Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

CITA KE-2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif

CITA KE-3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, yang menjadi tujuan dan saran pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1

Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan;
2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional;
3. Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa;
4. Meningkatnya ekonomi daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan;
6. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat.

Tujuan 2

Meningkatnya kualitas pembangunan manusia, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas daya saing pendidikan;
2. Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan.

Tujuan 3

3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas, dengan sasaran : Terwujudnya birokrasi berintegritas

3.2 Terwujudnya Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana, dengan sasaran : meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana.

3.3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya, dengan sasaran : terwujudnya semangat lampung bersama.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029. Dengan mempertimbangkan evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya, dinamika tantangan pembangunan, serta isu strategis

terkini, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun untuk memperkuat akselerasi transformasi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut Tabel 4.9 tentang Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2025	2026		OPD PENDUKUNG
						Sebelum	Sesudah	
	Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS							
	Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1.1	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,28	5,2 - 5,7	5,2 - 5,7	-
			Gini Rasio	indeks	0,274 - 0,290	0,274 – 0,290	0,274- 0,287	-
			Nilai Tukar Petani	Nilai	129,64	125-127	127-130	
		1.1.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan PMTB	persen	2,28	2,78	2,78	Bapenda, Dinas PMPTSP
			Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	10,5	10,5	10,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	persen	0,62	1,4	1,4	Dinas KPTPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Indeks Ketahanan Pangan	indeks	73,06	83,58	73,56	Dinas KPTPH, Dinas PSDA,Disbun, BMBK
		1.1.3 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	persen	22,93	23,96	23,96	Dinas PMDT
		1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,75	5,75	5,69	Disparekraf, DiskopUKM
		1.1.5 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	Kemantapan Jalan	persen	79,79	85,7	83,55	Dinas BMBK
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	36,89	26,49	37,17	Dinas PKPCK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2025	2026		OPD PENDUKUNG
						Sebelum	Sesudah	
		1.1.6 meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat kemiskinan	persen	9,66	8,90 - 9,90	8,90-9,66	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, , Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Biro Perekonomian, BPS, Dinas Tenaga Kerja
			Tingkat inflasi	persen	1,25	2,5 + 1	2,5 + 1	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,14	3,51 - 4,05	3,51 – 4,05	
	Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif							
2.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		Indeks Modal Manusia	indeks	0,53	0,55	0,55	-
		2.1.1 Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	Rata rata lama sekolah	tahun	8,5	8,55-8,60	8,55-8,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
			Harapan Lama sekolah	tahun	12,80-12,82	12,83-12,85	12,83-12,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.12 Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	58,72 (2024)	53.68	62,46	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dispora, Dinkes, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	indeks	0,363	0,414	0,414	
		2.1.3 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	74,90	74,93	74.8	Dinas Kesehatan, RSUAM, RSJ, RSBNH
			Prevalensi Stunting	persen	13,2	12,62	12,62	Dinas Kesehatan, RSAM, Dinas KPTPH, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PKPCK, Dinas PPPA, Dinas PMDT, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo
		2.1.4 Meningkatnya kualitas pembangunan	Indeks Perlindungan Anak	indeks	71,58	67,94	67.94	Dinas PPPA, Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2025	2026		OPD PENDUKUNG
						Sebelum	Sesudah	
		keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan						
			Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,375	0,395	0,395	Dinas PPPA, Dinas Sosial, Disnaker
	Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas							
3.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,34 (A) (2024)	84,01-85,00	84,01-85,00	-
		3.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,34 (A) (2024)	84,01-85,00	84,01-85,00	Sekretariat Daerah, Sekretriat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKAD,Inspektorat Dinas Kominfo, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, Sekretariat DPRD, Badan Pengubung, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.2	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	55,3	62,41–64,03	62,41 – 64,03	-
		3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	73,81	71,2	74,48	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kehutanan, Dinas Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan & Keswan.
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,97	127,94-128,94	127,94-128,94	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,52	9,95	9.95	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	36	36,6	36,6	
3.3	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.		Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	79,5	80,5	80,5	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2025	2026		OPD PENDUKUNG
						Sebelum	Sesudah	
			Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	60,97 (2024)	59,7	63,57	-
		3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Provinsi	indeks	77,83	80-81	80-81	Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra
			Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	38.71	38.71	

Sumber : Bappeda, 2026

Tabel 4.9 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 :

"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2026, pada Gambar 4.4 berikut.



Sumber : Bappeda, 2026

Gambar 4.4 Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Daerah 1 : Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;

Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor industri serta jasa.

Di sisi sosial, infrastruktur yang berkualitas seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat penting. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses yang merata, menciptakan kesempatan yang

setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan guna mendukung fungsi sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, serta penguatan pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, tetapi juga untuk memperkuat daya saing daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 1 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 1

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	2026	
			Sebelum	Sesudah
Kemantapan Jalan	persen	79,79	85,7	83,55
Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	36,89	26,49	37,17
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	36,32 (2024)	36,6	36,6

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Dinas BMBK, Dinas PKPCK, Dinas PSDA, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas KPTPH, Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup.

Prioritas Daerah 2 : Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi.

Penguatan SDM yang unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pola pikir yang kritis serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, inovasi menjadi faktor yang tak kalah penting. SDM yang inovatif tidak hanya mampu menguasai pengetahuan yang ada, tetapi juga mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknis, penguatan kreativitas, dan kemampuan berpikir out-of-the-box harus menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 2 : 1) Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan; 2) Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga; 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan 4) Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif, pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, serta penguatan pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian prioritas tersebut, dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 2 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 2

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Indeks Modal Manusia	indeks	0,53 (2023)	0,55	0,55
Rata rata lama sekolah	tahun	8,5	8,55-8,60	8,55-8,60
Harapan Lama sekolah	tahun	12,80-12,82	12,83-12,85	12,83-12,85
Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	58,72 (2024)	53.68	62,46
Umur Harapan Hidup	tahun	74,90	74,93	74.8
Prevalensi Stunting	persen	13,2	12,62	12,62
Indeks Perlindungan Anak	indeks	71,58	67,94	67.94
Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,375	0,395	0,395

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dispora, Dinkes, PPPA, Dinas Kesehatan, RSUAM, RSJ, RSBNH, Dinas KPTPH, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PKPCK, Dinas PPPA, Dinas PMDT, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Disnaker

Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;

Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Faktor investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, mengembangkan ekonomi berbasis desa, memanfaatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inisiasi lumbung energi terbarukan—saling terkait dan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 3 : 1) Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan; 2) Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional; 3) Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa; dan 4) Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah dan penguatan hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong transformasi struktur perekonomian melalui peningkatan investasi, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, penguatan produktivitas sektor pertanian sebagai pendukung lumbung pangan nasional, pengembangan ekonomi berbasis desa, serta optimalisasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 3 sebagaimana disajikan pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 3

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,28	5,2 - 5,7	5,2 - 5,7
Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,47	3,48	3,48
Gini Rasio	indeks	0,274 - 0,290	0,274 – 0,290	0,274-0,287
Pertumbuhan PMTB	persen	2,28	2,78	2,78
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	10,5	10,5	10,5
Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	persen	0,62	1,4	1,4
Indeks Ketahanan Pangan	indeks	73,06	83,58	73,56
Persentase Desa Mandiri	persen	22,93	23,96	23,96
PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,75	5,75	5,69

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Dinas PMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas KPTPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PSDA,Disbun, BMBK, Disparekraf, DiskopUKM, Dinas PMDT, Bapenda.

Prioritas Daerah 4: **Pengentasan Kemiskinan;**

Upaya-upaya dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka, maka mereka akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Tidak kalah penting, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan air bersih sangat berpengaruh dalam mengurangi beban kemiskinan.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 4 : Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat.

Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja, serta penguatan perlindungan sosial dan layanan dasar. Berbagai intervensi pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni, dan air minum yang aman menjadi bagian penting dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 4 sebagaimana disajikan pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 4

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Tingkat kemiskinan	persen	9,66	8,90 - 9,90	8,90- 9,66
Tingkat inflasi	persen	1,25	2,5 + 1	2,5 + 1
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,14	3,51 - 4,05	3,51 – 4,05

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Dinas KPTPH, , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Ekraf, Dinas BMBK, Dinas PKPCK, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Biro Perekonomian dan Disnaker.

Prioritas Daerah 5 : **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;**

Pemerintahan yang efektif memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, tanpa pemborosan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang efektif juga memprioritaskan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berintegritas menuntut para pejabat dan aparatnya untuk selalu bertindak dengan jujur, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 5 : Terwujudnya Birokrasi Berintegritas

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas, Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pembangunan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan integritas aparatur, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 5 sebagaimana disajikan pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 5

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	84,31	84,35-85,00	84,35-85,00

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Sekretriat Daerah, BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, Kominfo, Litbang, BKD, BPSDM, Set DPRD, Badan Penghuibung, Dukcapil, Dinas Perpustakaan dan Arsip

Prioritas Daerah 6 : **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;**

Dukungan Kualitas lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan produktif, sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam jangka panjang.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penguatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana yang dapat mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi. Melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 6 sebagaimana disajikan pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 6

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	55,3	62,41– 64,03	62,41 – 64,03
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	73,81	71,2	74,48
Indeks Resiko Bencana	Indeks	124,59	127,94- 128,94	123,59- 124,59
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,52	9,95	9,95

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

DLH, Dinas Kehutanan, DKP, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kehutanan, KPTPH, Perkebunan, DKP, PKPCK, ESDM, Perindag, Perhubungan

Prioritas Daerah 7 : Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;

Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Keharmonisan memungkinkan saling menghargai meski ada perbedaan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Keamanan juga penting, karena masyarakat yang aman memungkinkan semua orang beraktivitas tanpa rasa takut, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kualitas hidup. Keamanan mencakup perlindungan fisik serta stabilitas sosial, memastikan kenyamanan emosional dan psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Penguatan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Melestarikan tradisi, seni, dan adat istiadat lokal tidak hanya memberikan kekayaan budaya, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam di antara masyarakat.

Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 7 : Terwujudnya Semangat Lampung Bersama.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, serta pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan modal sosial pembangunan. Kehidupan masyarakat yang kondusif, aman, dan menjunjung tinggi keberagaman menjadi fondasi penting dalam mendukung stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan dalam keberagaman diharapkan mampu memperkokoh jati diri masyarakat Lampung sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2026 dirumuskan sasaran utama Prioritas Daerah 7 sebagaimana disajikan pada tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Sasaran Utama pada Prioritas Daerah 7

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target 2026	
			Sebelum	Sesudah
Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79,5	80,5	80,5
Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	60,97 (2024)	59,7	63,57
Ekspresi Budaya	persen	79,5	80,5	80,5

Sumber : Bappeda, 2026

OPD Pengampu :

Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dina Pariwisata dan Ekraf, Biro Kesra

4.2.1 Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu **"Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**, strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan. Strategi ini bertumpu pada penguatan keunggulan daerah, pemantapan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi sinergi pusat-daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Pada Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Visi: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas				
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif				
1.	Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi	1.1	Mendorong investasi dan hilirisasi industri	1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi 2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung 3. Meningkatkan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan 4. Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah 5. Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan 6. Mempermudah proses Perizinan dan Non-Perizinan 7. Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan 8. Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
		1.2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				2. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian 3. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 4. Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau; 5. Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara; 6. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan
		1.3	Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Meningkatkan jumlah Bumdes berkembang dan maju untuk mendukung penciptaan ekosistem ekonomi berbasis desa
		1.4	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah	1. Penguatan Infrastruktur Destinasi Wisata • Peningkatan aksesibilitas jalan menuju destinasi utama (pantai, taman nasional, dll). • Penyediaan fasilitas umum yang ramah wisatawan. 2. Pengembangan Destinasi Unggulan • Pengembangan kawasan wisata prioritas seperti Teluk Kiluan, Pahawang, dan Way Kambas. • Promosi dan penataan desa wisata berbasis potensi lokal. 3. Digitalisasi Promosi Wisata • Pemanfaatan media sosial, website resmi, dan platform digital untuk pemasaran destinasi. • Kolaborasi dengan influencer dan content creator lokal. 4. Penguatan SDM Pariwisata • Pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku industri wisata.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. 5. Inkubasi dan Pendampingan UMKM Kreatif • Pelatihan desain produk, manajemen usaha, dan branding. • Fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan lembaga keuangan daerah.
		1.5	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	1. Menyusun roadmap energi terbarukan Provinsi Lampung 2. Mendorong Penyelesaian kendala regulasi dan harga jual listrik panas bumi 3. Melakukan riset per jenis EBT 4. Mendorong Mengembangkan pilot project TPST berbasis ekonomi sirkular yang menghasilkan listrik 5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi lokal sebagai sumber energi alternatif 6. Pemanfaatan EBT sekala kecil untuk rumah tangga
		1.6	Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	1. Penguatan konektivitas jaringan jalan pendukung sentra produksi komoditas utama Provinsi Lampung, akses bagi pengembangan investasi, hilirisasi industri dan sektor pariwisata. 2. Penguatan peran transportasi laut sebagai moda pendukung distribusi logistik antar pulau. 3. Pengembangan transportasi massal perkotaan khususnya dalam mendukung pertumbuhan kawasan Metropolitan Lampung Raya. 4. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 5. Mendorong peran transportasi udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah. 6. Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif				
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	2.1	Generasi Cerdas dan Berakhlak	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) 2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 4. Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				5. Penguatan sistem pembiayaan pendidikan 6. Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM
		2.2	Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	1. Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja 2. Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. 3. Meningkatkan semangat kewirausaha muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda
		2.3	Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Menguatkan sistem pembinaan organisasi pemuda dan meningkatkan prestasi pemuda secara terpadu 2. Meningkatkan prestasi olahraga pemuda dan olahraga masyarakat
		2.4	Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	1. Meningkatkan status gizi masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		2.5	Lampung Pusat Teknologi Terpadu	1. Meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri melalui intervensi dan rekomendasi tindak lanjut program pembangunan dan pemberdayaan desa
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas				
3.	Menurunkan angka kemiskinan	3.1	Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	1. Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) • Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. • Penggunaan teknologi digital untuk menyinkronkan data antarinstansi. 2. Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif • Penyaluran bansos tunai dan non-tunai dengan target prioritas rumah tangga miskin ekstrem. • Intervensi darurat saat terjadi bencana, inflasi, atau krisis ekonomi lokal. 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. 4. Aksesibilitas Layanan Dasar

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Penghapusan hambatan administratif seperti kepemilikan identitas atau BPJS. 5. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix) • Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. • Program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. 6. Pemantauan dan Evaluasi Tepat Waktu • Monitoring berkala efektivitas program berbasis indikator kemiskinan multidimensi. • Tindak lanjut cepat atas ketidaksesuaian implementasi di lapangan.
		3.2	Penguatan ketahanan keluarga	1. Memperkuat ketahanan keluarga dari segi ekonomi ,sosial, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan melalui partisipasi masyarakat
		3.3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	1. Memastikan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif dalam perlindungan hak-hak anak 2. Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak, perlindungan dan pencegahan kekerasan 3. Mendirikan dan memperkuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai sarana pendidikan dan pencegahan dalam perlindungan anak
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	4.1	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	1. Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik
5	Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	5.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	4. Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon • Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Penguatan sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di tingkat daerah. • Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. 2. Meningkatkan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim • Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem dan bencana iklim.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan. 5. 3. Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Daerah • Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). • Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana. • Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	6.1	Membangun Semangat Lampung Bersama	1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah dan TNI Polri 2. Mempersiapkan pendidikan karakter dan muatan lokal untuk pendidikan dasar hingga menengah 3. Melestarikan warisan budaya Lampung

Sumber : Bappeda, 2026

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025–2030 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital di sektor publik dan swasta, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dengan mengarusutamakan perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan, guna memastikan terwujudnya Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, pada Tabel 4.18 berikut.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		
Tujuan 1.1. Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		
1.1.1	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	1. Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 2. Lampung sebagai magnet investasi PMA dan PMDN. 3. Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis. 4. Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. 5. Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim. 6. Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. 7. Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi. 8. Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global. 9. Optimalisasi BUMD Provinsi Lampung ke dalam sektor yang strategis dan menyangkut hajat masyarakat Lampung dan ketahanan ekonomi Provinsi Lampung. 10. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung. 11. Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. 12. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. 13. Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 14. Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.
1.1.2	Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	1. Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan. 2. Menjamin distribusi pupuk, benih, dan pestisida. 3. Memberikan subsidi yang ditujukan khusus untuk nelayan, petani, dan peternak. 4. Melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyaluran/distribusi pupuk pertanian. 5. Menjamin dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat waktu. 6. Menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes. 7. Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. 8. Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan supply produk lokal. 9. Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. 10. Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		11. Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (*off farm*). 12. Budidaya ikan endemik Lampung berkelanjutan. 13. Mendorong inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (*Internet of Things*) dalam pengembangan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan (on farm). 14. Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor. 15. Memaksimalkan peran BUMD bidang pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan. 16. Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung. 17. Menerapkan program asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi petani dan nelayan.
1.1.3	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Revitalisasi atau pembenahan tata niaga komoditas unggulan Lampung. 2. Peningkatan nilai tambah komoditas Provinsi Lampung yang dilakukan dari desa. 3. Mendorong penyempurnaan kelembagaan ekonomi profesional (koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lampung Hub, Pelabuhan Komoditi). 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes. 5. Mendirikan Lampung Hub sebagai ruang kolaborasi hexahelix (pemerintah, regulasi, swasta, pengusaha, masyarakat, media, dan komunitas kreatif). 6. Inisiasi pembangunan Pelabuhan Komoditi Sebalang dan Labuhan Maringgai sebagai Pilot Project Pelabuhan Nasional di Lampung. (Pembangunan Pelabuhan Logistik Sebalang sebagai simpul penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung)* FGD Tematik Infrastruktur. 7. Menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi partisipatif berbasis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, UMKM, dan swasta. 8. Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 9. Penguatan permodalan bank daerah untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan bank daerah dengan menggandeng partner strategis atau melalui kelompok usaha bank (KUB). 10. Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. 11. Mengembangkan layanan digital bank daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keuangan.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		12. Mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal.
1.1.4	Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi. 2. Penguatan konektivitas menuju dan dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan (green/ eco tourism). 4. Meningkatkan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM. 5. Memperkuat peran Pokdarwis sebagai kekuatan lokal pariwisata. 6. Membangun ekosistem digital pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pelayanan prima. 7. Menyediakan identitas digital yang kuat dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung secara nasional dan global. 8. Memperkuat peran Badan Promosi dan Pengelola Pariwisata Lampung dalam rangka peningkatan indeks kinerja pariwisata (IKP).
1.1.5	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	1. Mendorong interkonektivitas jalan dan moda transportasi antar wilayah. 2. Mewujudkan keadilan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pembangunan infrastruktur dengan kearifan lokal. 4. Aksesibilitas transportasi publik dengan konsep smart, modern, terjangkau, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan ramah terhadap lansia, anak, dan kaum disabilitas. 5. Memelihara infrastruktur jalan untuk kelancaran mobilitas publik, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya logistik. 6. Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial. 7. Melanjutkan Pembangunan Kota Bandar Negara sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan peradaban dengan dengan konsep *Eco City* yang Hijau, Cerdas, dan Ramah 8. Menerapkan konsep pelayanan ramah publik dan terpadu kepada masyarakat dengan berbasis pada TI dan Teknologi *Smart City.* 9. Menyiapkan kawasan komersial sebagai penunjang utama Kota Baru 'Bandar Negara'. 10. Pengembangan Roadmap industri energi terbarukan berbasis biomassa (Pengembangan Roadmap industri berbasis energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur. 11. Menyediakan skema pembiayaan dan kredit yang memudahkan masyarakat dan perusahaan kecil mengadopsi teknologi energi terbarukan. 12. Inisiasi pengembangan potensi energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		13. Memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan. 14. Mendorong kerjasama energi terbarukan antara industri dan masyarakat penyedia bahan biomassa (berbagai sumber energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur. 15. Melakukan optimalisasi BUMD dalam pengelolaan transaksi energi di interkoneksi Lampung untuk peningkatan PAD (Optimalisasi BUMD dalam Pengelolaan Transaksi energi daerah secara mandiri dan strategis untuk peningkatan PAD)* FGD Tematik Infrastruktur.
1.1.6	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	1. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. 2. Memetakan dengan tepat menggunakan big data bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan. 3. Menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu dan tepat sasaran. 4. Memantau kondisi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan. 5. Optimalisasi peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah (PKH, Tagana, Pendamping Desa, TKSK, Pekerja Sosial, atau sejenisnya).
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif		
Tujuan 2.1.Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		
2.1.1	Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	1. Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter. 2. Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi. 3. Pemerataan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah. 4. Memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja Lampung. 5. Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat. 6. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. 7. Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren. 9. Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal. 10. Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran. 11. Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 12. Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
2.1.2	Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	1. Membangun sinergitas para pemuda, atlit, dan organisasi olahraga (PSSI, KONI, KORMI, dan lainnya) untuk penciptaan prestasi olahraga dan kebugaran masyarakat. 2. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan secara profesional dalam keterlibatan pembangunan daerah dan Pengembangan daya saing Kepemudaan. 3. Memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga. 4. Mengangkat silat sebagai budaya olahraga daerah. 5. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi. 6. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat. 7. Mencanangkan dan mempersiapkan Lampung sebagai tuan rumah PON tahun 2032. 8. Membangun pusat olahraga berstandar internasional (Lampung Sport Center). 9. Mendukung pengembangan UMKM dan pengusaha pemula. 10. Mengakses potensi pemuda melalui peningkatan kompetensi untuk berwirausaha. 11. Meningkatkan kemudahan dan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi generasi muda. 16. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis dan penyediaan fasilitas pelatihan bisnis yang komprehensif untuk umum, generasi muda, perempuan, dan kaum disabilitas. 12. Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap manfaat dan risiko keuangan. 13. Mendorong pemuda desa untuk berwirausaha. 14. Memfasilitasi kegiatan business matching antar stakeholders terkait untuk meningkatkan angka aktivasi dan sustainability usaha bisnis pemuda. 15. Mengadakan kompetisi atau program akselerator bidang inovasi dan kewirausahaan untuk mendorong generasi muda mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 16. Memfasilitasi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk melakukan penelitian bersama dalam rangka penciptaan inovasi-inovasi baru. 17. Mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif dengan Menyiapkan Pusat Kreativitas dan Inovasi Daerah (*Lampung Creative and Innovation Center*) melalui kemitraan bersama perguruan tinggi. 18. Mendorong pemasangan sistem monitoring berbasis digital untuk melacak dan merespons semua tindak kejahatan dan musibah di area publik. 19. Melakukan implementasi desa cerdas sebagai peningkatan indeks desa membangun (IDM).

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		20. Melakukan penelitian terapan yang berfokus pada solusi pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional. 21. Implementasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Lampung yang dilakukan dari desa. 22. Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular yang mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dengan meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. 23. Melibatkan dan mendukung perguruan tinggi swasta dan negeri dalam program-program pembangunan Lampung.
2.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Mendukung program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu. 2. Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal di tingkat provinsi. 3. Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung. 4. Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota. 5. Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular. 6. Melakukan kampanye imunisasi bagi anak usia dini, remaja, dan perempuan. 7. Berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas-komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat. 8. Memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu. 9. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. 10. Menyelenggarakan bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi medis, penanganan pertolongan pertama, dan bantuan medis lainnya dalam keadaan darurat.
2.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	1. Melanjutkan Program Keluarga Harapan. 2. Mensosialisasikan fungsi keluarga sebagai jaring pengaman sosial. 3. Membudayakan keluarga inti harmonis. 4. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan pranata sosial budaya yang tangguh. 5. Lampung ramah anak dan perempuan. 6. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi kaum rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar. 7. Memberikan akses dan meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		8. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan perlindungan kepada ibu dan anak terdampak. 9. Standarisasi infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. 10. Menyelenggarakan pembinaan bagi kaum difabel guna menciptakan kemandirian kaum disabilitas.
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		
Tujuan 3.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		
3.1.1	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	1. Menjunjung tinggi pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan berdasarkan hukum. 2. Memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan. 3. Menguatkan jejaring kerjasama antar kota-kabupaten. 4. Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. 5. Memperkuat instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif. 6. Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas. 7. Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Memperkuat sinergitas pertahanan dan keamanan daerah bersama TNI, Polisi, dan lembaga lainnya. 9. Mengembangkan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah. 10. Mengoptimalkan fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital. 11. Melakukan pemutakhiran website resmi yang berisi informasi terkait pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan, progres proyek, dan anggaran yang digunakan. 12. 12.Mengadakan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah dan mendengarkan masukan dari masyarakat. 13. Menjamin pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang transparan dan akuntabel. 14. Membangun Data Recovery Center (DRC) untuk mendukung SPBE yang aman dan handal. 15. 15.Mengintegrasikan sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di Command Center

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		secara realtime yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
Tujuan 3.2 Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	1. Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan. 2. Mewujudkan desa tangguh bencana. 3. Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak. 4. Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. 5. Mengelola kawasan pesisir Lampung dengan program berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. 6. Mencanangkan dan mempersiapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah zero waste. 7. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). 8. Mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. 9. Memitigasi dampak perubahan iklim global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
	Tujuan 3.3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	
3.3.1	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila dengan merevitalisasi prinsip hidup orang Lampung “Piil Pesenggiri”. 2. Membangun semangat persatuan masyarakat Lampung melalui pendekatan budaya “Sakai Sambayan. 3. Sinergitas TNI, Polri, Tokoh masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. 4. Menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya (festival yang meliputi seni, musik, tari, dan kuliner dari berbagai suku di Provinsi Lampung). 5. Melakukan pendampingan, revitalisasi dan supervisi bagi lembaga kebudayaan dan atau kelompok masyarakat 6. Penguatan keimanan dan ketaqwaan melalui kegiatan pembinaan, kolaborasi, dukungan kegiatan keagamaan, penyediaan sarana & prasarana ibadah, dan pemberian bantuan/insentif kepada umat dan pemuka agama. 7. Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan (sanggar, balai desa, perguruan silat, lembaga adat). 8. Optimalisasi masyarakat desa sebagai penggerak aktivitas kebudayaan. 9. Menyelenggarakan workshop, seminar, dan diskusi publik tentang berbagai budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Lampung. 10. Penggunaan simbol, aksara dan bahasa Lampung di ruang publik.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		11. Mendorong kreasi seni dan budaya karya seniman dan budayawan lokal. 12. Penguatan muatan pendidikan berbasis budaya Lampung.

Sumber : Bappeda, 2026

Tabel 4.18 Sasaran dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

4.2.2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2026

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian sasaran makro pembangunan. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I-2026, maka sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4.19 Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2026	Sasaran pada APBD 2026	Capaian s/d Tw 1 2026	Sasaran pada Perubahan RKPD 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,7	5,2–5,7	5,58	5,2 - 5,7
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	54,0-56,0	54,0 – 56,0	55,01 (Capaian 2025)	55,5 - 58,0
3	Kontribus PDRB Provinsi (Persen)	2,2	2,2	2,146	2,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 - 9,90	9,90-8,90	9,66	8,90- 9,66
5	Indeks Gini	0,274 - 0,290	0,290-0,274	0,287 (Capaian Sept 2025)	0,274-0,287
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,55	0,55	0,53 (Capaian 2023)	0,55
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,80-74,4	73,8-74,4	73,98 (capaian 2025)	73,98-74,4

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2026	Sasaran pada APBD 2026	Capaian s/d Tw 1 2026	Sasaran pada Perubahan RKPD 2026
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	62,41– 64,03	62,41 – 64,03	55,30 (Angka sementara 2025)	62,41– 64,03
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,2	N A	73,81 (Capaian 2025)	74,48
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51 - 4,05	3,51 - 4,05	3,95 (Capaian Febriari 2026)	3,51 – 4,05

Sumber : Bappeda, 2026

4.2.3 Program Unggulan Daerah

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan sinergi dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi lima program unggulan yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Kelima program ini dirancang untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat, membangun ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu:

1. Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan terhadap MBG dilakukan dengan memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan menengah, utamanya di daerah tertinggal, terpencil, dan miskin. Pemerintah Provinsi Lampung akan:

- Menyediakan infrastruktur dapur umum berbasis sekolah atau komunitas.
- Mendorong pelibatan UMKM lokal dan petani dalam penyediaan bahan pangan bergizi.
- Melakukan edukasi gizi seimbang bagi guru, orang tua, dan anak.

2. Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa melalui Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi.

Desa merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan program peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Diharapkan BUMDes dan koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tapi juga simpul distribusi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.. Strategi utama dalam program ini meliputi:

- Pelatihan manajerial dan digitalisasi usaha bagi pengurus BUMDes dan koperasi.
- Penyediaan akses pembiayaan dan modal usaha produktif.
- Pendampingan usaha melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri.
- Integrasi produk BUMDes dalam rantai pasok lokal dan nasional.

3. Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi pertanian yang signifikan, Lampung mengusung target besar menjadi *Lumbung Pangan Nasional*. Dengan target swasembada dan ekspor produk pertanian unggulan (seperti jagung, padi, singkong, kopi, dan pisang), Lampung diarahkan menjadi poros ketahanan pangan di Sumatera dan nasional.

- Modernisasi pertanian berbasis teknologi.
- Penguatan ketersediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
- Peningkatan luas dan produktivitas lahan pertanian.
- Revitalisasi infrastruktur irigasi dan pasca-panen.

4. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.

Sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi Program Lumbung Energi Terbarukan sebagai langkah strategis menuju transisi energi hijau.

Program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah di wilayah Lampung—seperti tenaga surya, bioenergi, mikrohidro, dan angin—sekaligus memperkuat kemandirian energi hingga ke tingkat desa. Upaya yang dilakukan antara lain :

- Mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis komunitas;
- Mengembangkan desa mandiri energi melalui pemanfaatan sumber daya lokal;
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset;
- Menyediakan insentif bagi investasi hijau di sektor energi.

5. Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kemandirian ekonomi lokal, Provinsi Lampung menjalankan program stabilisasi harga pangan. Langkah strategis mencakup:

- Penguatan peran Satgas Pangan dan digitalisasi sistem distribusi logistik.
- Penyediaan subsidi transportasi untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- Pemanfaatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pasar tani sebagai simpul kendali harga.
- Kebijakan afirmatif untuk menyerap hasil pertanian dan produk UMKM lokal di pasar lokal dan instansi pemerintah.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, Prioritas Nasional 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029

Dengan memperhatikan posisi strategis tahun 2026 sebagai tahun transisi dan awal RPJMD, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan untuk menyelaraskan antara agenda pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Integrasi ini mencakup sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, dan pelaksanaan program yang berbasis pada prinsip kolaboratif dan hasil nyata. Oleh karena itu, tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi wujud nyata peran Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pada Tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 :		
"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	**Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026**	**Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2026**
Tahun 2025-2029		
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	**Prioritas Daerah 1.** Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	**Prioritas Nasional 3** :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Prioritas Daerah 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan secara tepat sasaran	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 :		
"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	**Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026**	**Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2026**
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	**Prioritas Daerah 2.** Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	**Prioritas Daerah 5.** Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	**Prioritas Nasional 7 :** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Prioritas Daerah 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	**Prioritas Nasional 8 :** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Prioritas Daerah 7. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	**Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
		Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber : Bappeda, 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026; Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.22 dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
1	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
3	**Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RTRW Provinsi
					Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKÂ
4	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	**Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
					Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
6	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
8	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
					peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	**Prioritas Nasional 3** :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
					Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan sampah Regional
					Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
					Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
					Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
13	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
14	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
15	**Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	**Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Ter Akselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
					Penyediaan Akses Internet
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	**Prioritas Nasional 3 :** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	**Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
19	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	**Prioritas Nasional 7 :** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					Peningkatan kualitas statistik sektoral
21	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
22	**Prioritas Nasional 3** :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya
					Pengembangan Cagar Budaya
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
23	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
24	**Prioritas Nasional 8 :** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
					Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
					Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
26	**Prioritas Nasional 3 :** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
					Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					Fasilitasi Kekayaan Intelektual
					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
27	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
					Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					Penyiapan Perhutanan Sosial

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
29	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
					Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
30	**Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
					Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Internasional/Nasional
					Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	**Prioritas Nasional 5 :** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
					Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
33	**Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				

Sumber : Rakorterkenbang 2025

Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2026

Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Keselarasan antara program pembangunan daerah dan Program Prioritas Nasional (PN) menjadi penting untuk memastikan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga target-target pembangunan nasional dapat didukung secara optimal melalui intervensi pembangunan di daerah.

Upaya penyelarasan dilakukan melalui pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah terhadap Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun keselarasan program pembangunan daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 disajikan pada tabel tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.02PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
	01.03PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
	01.04PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.05PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.		
	02.01PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.02PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
		Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	02.03PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==
	02.04PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.05PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
	02.06PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan Di Wilayah Pesisir , Laut Dan Pulau	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Cipta Karya
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	02.11 PP: Swasembada Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.12 PP: Swasembada Air	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Umkm
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / Green Jobs	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Hutan Adat	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ)	Dinas Perhubungan
	PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Ekraf
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesra
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)		
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Diknas
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dispora
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UMKM
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Balitbangda
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Kepegawaian Daerah	Bkd
		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengembangan Kurikulum	Dikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dispora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pppa
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas PMDT
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan TPH
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUAM

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rsam
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rsj
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSAM, RSJ
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMDT
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPPA
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPPA
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Bappeda
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Peternakan & Keswan
		Program Mineral dan Batubara	Dinas EDSM
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PKPCK
	05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas PTSP
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas PTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PTSP
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas PTSP
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PTSP
		Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas PTSP
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas PTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.		
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas PKPCK
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bappeda
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PKPCK
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dinas PKPCK
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi	
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas PKPCK
		Program Kawasan Permukiman	Dinas PKPCK
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMDT
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
	07.02 PP: Reformasi Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	07.03	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Lampung
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Lampung
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pem Otda
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
	08.03	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Bappeda, 2026

4.4 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. IKU menggambarkan secara langsung kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai instrumen pengukuran, IKU bersifat strategis dan berorientasi pada hasil. Artinya, IKU tidak sekadar mengukur banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi lebih menekankan pada capaian nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui IKU, dapat diketahui sejauh mana program dan kebijakan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Penetapan IKU menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah. Capaian terhadap indikator ini menjadi ukuran utama dalam menentukan keberhasilan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kontribusi seluruh perangkat daerah berbeda-beda sesuai dengan cascading kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung. Target capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025 atau Triwulan 1 Tahun 2026 yang diselaraskan dengan target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Pada Tabel 4.24 berikut.

Tabel 4.24 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama Provinsi	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026	
				Sebelum	Sesudah
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,28	5,2 - 5,7	5,2 - 5,7
2	Gini Ratio	Nilai	0,287	0,290-0,274	0,274-0,287
3	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	73,06	83,58	73,56
4	Persentase Desa Mandiri	Persen	22,93	23,96	23,96
5	Kemantapan Jalan	Persen	79,79	85,7	83,55
6	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	36,89	26,49	37,17
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,66	8,90 - 9,90	8,90- 9,66
8	Tingkat Inflasi	Persen	1,25	2,5 + 1	2,5 + 1
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,14	3,51 - 4,05	3,51 – 4,05
10	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,53 (2023)	0,55	0,55
11	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58,72 (2024)	53.68	62,46
12	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	71,58	67,94	67.94
13	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,375	0,395	0,395
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84,31 (A)	84,35-85,00	84,35-85,00
15	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	55,3	62,41–64,03	62,41 – 64,03
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	71,2	74,48
17	Indeks Risiko Bencana	Nilai	124,59	127,94-128,94	123,59-124,59
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	36,32 (2024)	36,6	36,6
19	Indeks Demokrasi Provinsi	Nilai	77,83	80,5	80,5
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,97 (2024)	59,7	63,57

Sumber : Bappeda, 2026

Penetapan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKD mencerminkan capaian kinerja utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Target IKD ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian RPJMD yang sedang berjalan, serta mempertimbangkan kondisi dan tantangan aktual daerah. Penetapan ini juga mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Permendagri terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta indikator makro pembangunan seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), dan lain sebagainya.

Proses penetapan target IKD dilakukan secara partisipatif dan akuntabel, melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Setiap indikator disusun dengan menetapkan satuan, baseline, dan target capaian yang realistis sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja yang terukur. Target IKD yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, RKA, serta sebagai alat monitoring dan evaluasi atas efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penetapan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, pada Tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	73,06	83,58	73,56	Dinas KPTPH
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**	%	8,5	7,56	7,56	Dinas KPTPH
3	Kapasitas Air Baku (m3/kapita)**	m3/kapita	0,44	1,18		Dinas PSDA
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **	%	18,72	21,29	21,29	Dinas PKPCK
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	73,81	71,2	74,48	DLH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	5	6,8	6,8	Dinas PKPCK
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	%	24	28	28	DLH
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah**	%	14,46	17,88	17,88	Dinas PKPCK
9.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**	%	9,52	9,95	9,95	Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda
	a. Kumulatif**					
	b. Tahunan**	%	15,32	17,14	17,14	
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	124,59	127,94-128,94	123,59-124,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	angka	0,537	0,546	0,546	Dinas LH, Dinas Kehutanan, DKP, KPTPH
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,54	0,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,17	1,12	1,12	Disdukcapil

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
	Rasio jenis kelamin	%	104,12	104	104	Disdukcapil
	Kepadatan penduduk	orang/km^2	283,67	286	286	Disdukcapil
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28	5,2 - 5,7	5,2 - 5,7	BPS
2	Tingkat Kemiskinan**	%	9,66	8,90 - 9,90	8,90- 9,66	Dinsos, BPS
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	55,1	60,1	55,5 - 59,0	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	4,14	3,51 - 4,05	3,51 – 4,05	BPS, Dinas Tenaga Kerja
5	Indeks Gini	Angka	0,287	0,290-0,274	0,274-0,287	BPS
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,53	0,55	0,55	BPS
7	Usia Harapan Hidup**	Tahun	74,6	74,8	74,8	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,27	0,29	0,29	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**	Angka	122	109	109	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
9	Prevalensi Stunting**	%	13,2	12,62	12,62	Dinkes
10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	90	90	90	Dinkes
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	%	70	72	72	Dinas Kesehatan
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**	%	95	95	95	Dinas Kesehatan, RSAM, RSBNH
11	a) Cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (%)**	%	70	72	72	Dinas Kesehatan
	b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,6	98,68	98,68	Dinas Kesehatan
12	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	8,45-8,50	8,55-8,60	8,55-8,60	Disdikbud
13	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,80-12,82	12,83-12,85	12,83-12,85	Disdikbud
14	Angka Literasi **	%	69,26	70,12	70,12	Disdikbud
	Angka Numerasi**		66,23	68,53	68,53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:**	%	30,2	32,2	32,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Literasi membaca					
	- Numerasi		20,3	22,2	22,2	
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)**	%	7,77	8,08	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	%	72,42	73,06	73,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	65.77	69.03	69.03	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)**	%	22	24	24	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	38,39	45,53	45,53	BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	74,33	74,7	74,7	Kemenag
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Angka	60,97 (2024)	59,7	63,57	Disdikbud
24	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	71,58	67,94	67.94	Dinas PPPA
25	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,375	0,395	0,395	Dinas PPPA
27	Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	58,72 (2024)	53.68	62,46	Dispora
28	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	100	100	100	Badan Kesbangpol
29	Ketahanan Sosial Budaya	%	81,8	83,8	83,8	Badan Kesbangpol
30	Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana	%	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1.	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	%	47,3	47	47	BPS
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	18,97	19,15	19,15	BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,62	1,65	1,65	BPS, Disparekraf
4.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	6,5	8	8	BPS/Disparekraf
5.	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,54	0,62	0,62	BPS, Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan
6.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	NA	NA	NA	BPS/Disparekraf
7.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**	%	2,65	2,7	2,7	Dinas Koperasi dan UKM
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)**	%	99,55	99,57	99,57	Dinas Perindag
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	%	0,66	0,67	0,67	Dinas Koperasi dan UKM
9.	Rasio Kewirausahaan Daerah**	%	2,9	2,93	2,93	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	4,06	4,11	4,11	Biro Perekonomian
11.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**	%	32	33	33	Dinas Tenaga Kerja
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,6	70,7	70,7	Dinas Tenaga Kerja
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	55,34	56,24	56,24	Dinas PPPA, Dinas Tenaga Kerja
14.	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	65,7	65,9	65,9	Balitbangda
15.	Indeks Ekonomi Hijau**	Angka	49,53	51,81	51,81	Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas KPTH, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
16.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36,32 (2024)	36,6	36,6	Dinas ESDM, Perkebunan, KPTPH, Peternakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	5,85	6,09	6	Dinas Kominfo
18.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi**	Nilai	9,15	8,75	8,75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	2,28	2,78	2,78	BPS/DPM PTSP
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	68,95	70,192	70,192	Dinas PKPCK
21.	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Angka	67,33	68,83	68,83	Inspektorat
22.	Persentase Desa Mandiri	%	22,93	23,96	23,96	Dinas PMDT
23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	1,19	1,19	1,19	BPKAD
24.	Tingkat Inflasi**	%	1,25	2,5 + 1	2,5 + 1	Biro Perekonomian
25.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**	%	12,6	12,9	12,9	BI/OJK/Biro Perekonomian
26.	Aset Dana Pensiun/PDRB**	%	0,04	0,04	0,04	BI/OJK/Biro Perekonomian
27.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi**	Juta Rupiah	1,7	1,85	1,85	BI/OJK/Biro Perekonomian
28.	Total Kredit/PDRB**	%	15	15,5	15,5	BI/OJK/Biro Perekonomian
29.	Inklusi Keuangan**	%	85,5	86,5	86,5	BI/OJK/Biro Perekonomian
30.	Persentase BUMD Berkinerja Sehat	%	67	100	100	Biro Perekonomian
31	Jumlah Produk Bersertifikasi Halal;	Angka	114.566	114.793	114.793	Dinas Perindag
32	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	1,71	1,78	1,78	Biro Perekonomian
33	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,53	0,56	0,56	Biro Kesra
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	87,5	87,8	87,8	Biro Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	4,1	4,2	4,2	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,3	4,4	4,4	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNH
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	%	84	83	83	SatPol PP
5	Persentase Capaian Aksi HAM**	%	75	78	78	Badan Kesbangpol

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2025	Target 2026		PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
				Sebelum	Sesudah	
6	Indeks Demokrasi Indonesia**	Angka	79,5	80,5	80,5	Badan Kesbangpol
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	Angka	73	73,5	73,5	Satpol PP
8	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	***3,47***	3,48	3,48	Balitbangda
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/Nilai	**86,5**	87	87	Biro Organisasi
10	Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	**83,1**	83,5	87,75	Badan Penghubung
		%	**89,8**	89,9	89,9	BAPENDA
		%	**82**	84	84	RSUAM
		%	**89,5**	89,75	89,75	RSJ
		Indeks	**87,5**	87,6	87,6	Dinas Perhubungan
		Indeks	**3,44**	3,44	3,44	PMPTSP

Sumber : Bappeda, 2026

4.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB untuk periode 2025–2030. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

RAD TPB Provinsi Lampung bertujuan untuk menerjemahkan 17 tujuan dan 169 target SDGs ke dalam konteks lokal, sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah. Penyusunan RAD ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dokumen tematik lainnya seperti RPKD (Penanggulangan Kemiskinan Daerah), RAD-PG

(Pangan dan Gizi), dan RAD-PD (Penyandang Disabilitas). Dokumen RAD TPB ini memuat indikator-indikator terpilih yang menjadi acuan dalam pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta, guna menciptakan sinergi lintas sektor yang kuat dan partisipatif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyadari berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan kurangnya pemahaman terhadap SDGs di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, strategi inovatif diterapkan, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta mendorong pembiayaan pembangunan alternatif melalui kolaborasi multipihak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa **program utama** yang menjadi fokus RAD TPB Provinsi Lampung, antara lain:

1. **Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola SDGs**
   Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi TPB, termasuk harmonisasi indikator SDGs dengan kebijakan daerah.
2. **Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**
   Provinsi Lampung akan melanjutkan program-program pengurangan kemiskinan, baik melalui skema perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun peningkatan akses layanan dasar.
3. **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**
   Akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu akan menjadi prioritas utama, didukung oleh peningkatan infrastruktur, tenaga pendidik dan medis, serta digitalisasi layanan.

4. **Penguatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**
   Melalui dukungan terhadap UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi hijau, program ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. **Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana**
   Pemerintah daerah akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan kesiapsiagaan bencana, guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. **Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Pihak.**

   Dalam semangat kolaborasi, Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun kemitraan strategis lintas sektor guna mempercepat pencapaian target SDGs, termasuk pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan filantropi.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun 2024 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 pada tabel 4.26 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan s.d Tahun 2024

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan	24	3	1	4	32	13%
2	Tanpa Kelaparan	8	5	1	1	15	6%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	4	0	1	34	14%

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
4	Pendidikan berkualitas	18	4	0	6	28	12%
5	Kesetaraan Gender	11	2	0	3	16	7%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	1	1	3	12	5%
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	0	3	1%
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	9	5	0	24	10%
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	2	0	0	6	2%
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	2	0	1	11	5%
11	Kota dan Permukiman yang Berkelaniutan	5	2	0	2	9	4%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	1%
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	0%
14	Ekosistem Laut	3	3	0	0	6	2%
15	Ekosistem Darat	4	1	0	0	5	2%
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16	5	0	10	31	13%
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	0	0	0	6	2%
	JUMLAH	158	45	8	31	242	100%
	PERSENTASE	65%	19%	3%	13%	100%	100%

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung mencapai yaitu 65%, sedangkan yang belum tercapai hanya 19% dan tidak ada data 3% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

Sedangkan capaian 242 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial dan pilar hukum dan tata kelola, kategori capaian terhadap 4 pilar tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan pembanguanan yaitu :

Tabel 4. 27 Tabel Capaian Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuans.d Tahun 2024

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
7	Energi Bersih dan Terjangkau Total	2	1	0	0	3	6,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Total	10	9	5	0	24	48,00
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Total	4	2	0	0	6	12,00
10	Berkurangnya Kesenjangan Total	8	2	0	1	11	22,00
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Total	6	0	0	0	6	12,00
	TOTAL PILAR EKONOMI	30	14	5	1	50	100,00
	PERSENTASE	60	28	10	2	100	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10% serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.

2. Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan Pembangunan antara lain :

Tabel 4. 28 Tabel Capaian Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuans.d Tahun 2024

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak Total	7	1	1	3	12	33,33
11	Kota dan Permukiman yang Berkelaniutan Total	5	2	0	2	9	25,00
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Total	2	1	0	0	3	8,33
13	Penanggulangan Perubahan Iklim Total	1	0	0	0	1	2,78
14	Ekosistem Laut Total	3	3	0	0	6	16,67
15	Ekosistem Darat Total	4	1	0	0	5	13,89
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	22	8	1	5	36	100,00
	PERSENTASE	61,11	22,22	2,78	13,89	100,00	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%, sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

3. Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan pembangunan yaitu :

Tabel 4. 29 Tabel Capaian Indikator Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan s.d Tahun 2024

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan Total	24	3	1	4	32	25,60
2	Tanpa Kelaparan Total	8	5	1	1	15	12,00
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Total	29	4	0	1	34	27,20
4	Pendidikan berkualitas Total	18	4	0	6	28	22,40
5	Kesetaraan Gender Total	11	2	0	3	16	12,80
	TOTAL PILAR SOSIAL	90	18	2	15	125	100,00
	PERSENTASE	72	14,4	1,6	12	100	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih menggunakan data sebelumnya 12%.

4. Pilar Pembangunan hukum dan tata kelola dengan 1 tujuan pembangunan yaitu

Tabel 4. 30 Tabel Capaian Indikator Pilar Pembangunan Sosial TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan s.d Tahun 2024

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realiasai capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Total	16	5	0	10	31	100,00
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	16	5	0	10	31	100,00
	PERSENTASE	51,6	16,1	-	32,3	100,0	

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Dari data diatas terlihat bahwa pilar hukum dan tata kelola dengan 1 TPB dengan indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 51,6%, sedangkan yang belum tercapai hanya 16,1% dan tidak ada data 0 serta masih menggunakan data sebelumnya 32,3%.

4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

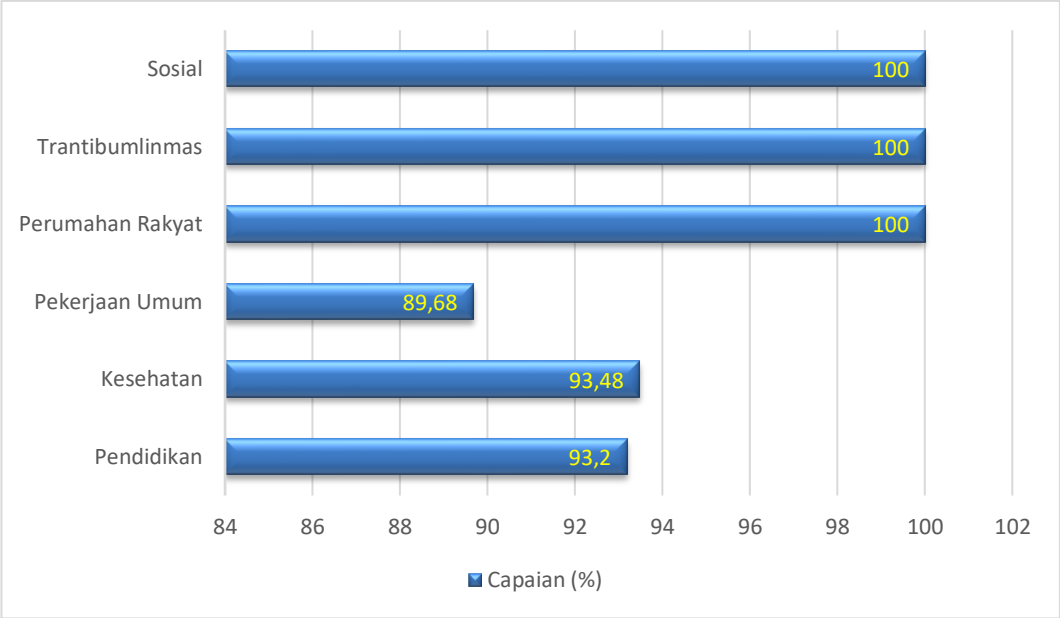
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025 menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Target capaian SPM tersebut umumnya berada pada angka **100%**, yang mencerminkan harapan pencapaian maksimal dalam pelaksanaan layanan dasar di setiap sektor.

Jika dibandingkan dengan target tersebut, realisasi capaian menunjukkan bahwa beberapa sektor telah mencapai target sepenuhnya, yaitu sektor **Perumahan Rakyat**, Trantibumlinmas dan Sosial, yang masing-masing mencatat **100% capaian**. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan dasar di tiga sektor tersebut telah dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, sektor lainnya mencatat realisasi yang mendekati target, meskipun belum mencapai 100%. Sektor **Pendidikan** mencapai **93,2%**, **Kesehatan** mencapai **93,48%** dan **Pekerjaan Umum** mencapai **89,68%**,, yang semuanya menunjukkan kinerja sangat baik dan hanya terpaut sedikit dari target yang ditetapkan.

Di antara 6 sektor SPM tersebut, sektor **Pekerjaan umum** masih menunjukkan capaian yang paling rendah, yaitu **89,68%**, sehingga menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan program SPM lebih lanjut agar dapat tercapai di tahun 2026.

Capaian SPM sampai denga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2026 diolah

Gambar 4.5 Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2025

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 secara lebih detail disajikan pada Lampiran I. Adapun uraian dalam sub bab ini merupakan rekapitulasi dari program dan kegiatan berdasarkan : 1) Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2026, 2) Urusan pemerintahan; dan 3) Perangkat Daerah serta Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegitan terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Daerah mengacu pada Asta cita dan Kepala Daerah Terpilih.

5.1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2026

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

Rencana program prioritas dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2026

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	78.821.580	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	78.821.580	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	200.451.120	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	113.042.620	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	51.476.190	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	51.476.190	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	36.612.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	36.612.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	58.542.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	58.542.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
9	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	37.468.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	37.468.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	810.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	810.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	654.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	654.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
12	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	42.544.550	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	42.544.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.097.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.097.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
15	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	17.257.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	17.257.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	mendukung fungsi sosial dan ekonomi					
19	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7.483.610	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7.483.610	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	407.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	319.591.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7.255.920	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	7.255.920	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	340.934.130	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	340.934.130	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	mendukung fungsi sosial dan ekonomi					
23	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	192.416.980	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	105.008.480	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	8.886.270	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	8.886.270	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	16.817.450	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	16.817.450	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	mendukung fungsi sosial dan ekonomi					
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	145.084.560	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	145.084.560	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	151.456.600	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	151.456.600	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	62.482.940	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	62.482.940	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	mendukung fungsi sosial dan ekonomi					
31	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.034.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.034.460	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
34	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.057.173.216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.057.173.216	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.986.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.986.700	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
36	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.451.590	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.451.590	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
37	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
38	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.012.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.012.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
39	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.198.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.198.750	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
40	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.603.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.603.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
41	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.191.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.191.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
42	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.257.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.257.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
43	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.089.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.089.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
44	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
45	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
46	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	349.634.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
47	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	197.292.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	197.292.815	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
48	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	566.244.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	566.244.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
49	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
50	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.108.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.108.300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
51	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
52	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.200.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
53	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
54	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.525.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.525.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
55	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	141.300.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	141.300.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
56	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
57	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
							PROVINSI LAMPUNG
58	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	74.981.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	74.981.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
59	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
60	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.700.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
61	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
62	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4.800.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
63	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	204.485.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	204.485.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
64	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	41.109.500	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	41.109.500	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
65	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	116.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	116.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
66	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
67	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
			PANGAN MASYARAKAT		PANGAN MASYARAKAT		PROVINSI LAMPUNG
68	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
69	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	171.632.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	73.492.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
70	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
71	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	32.964.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	32.964.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
72	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
73	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
74	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	15.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
			PANGAN MASYARAKAT		PANGAN MASYARAKAT		PROVINSI LAMPUNG
75	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
76	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
77	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
78	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
79	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	27.850.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	27.850.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
80	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
81	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
							PROVINSI LAMPUNG
82	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
83	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.600.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
84	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	74.640.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	74.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
85	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
86	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.660.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.660.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
87	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
88	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	300.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
							PROVINSI LAMPUNG
89	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	56.069.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	56.069.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
90	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	74.077.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	74.077.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
91	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
92	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	91.470.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	91.470.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
93	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.935.500	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.935.500	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
94	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	36.114.100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	36.114.100	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
95	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
							PROVINSI LAMPUNG
96	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	375.783.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	375.783.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
97	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.700.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
98	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
99	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
100	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
101	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
102	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	25.015.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	25.015.000	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
							PROVINSI LAMPUNG
103	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
104	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
105	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
106	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
107	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
108	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
109	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
110	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
111	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
112	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	36.063.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	36.063.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
113	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
114	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
115	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
116	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
117	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	59.066.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	59.066.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
118	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
119	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
120	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	207.670.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	207.670.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
121	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	67.242.600	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	67.242.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
122	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.964.649.570	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
123	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
124	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
125	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
126	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
127	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
128	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
129	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	199.477.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
130	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	883.072.700	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.779.720.700	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
131	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.337.160.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.733.846.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
132	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
133	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.220.725.741	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
134	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	31.740.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	31.740.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
135	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
136	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.339.043.300	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
137	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.816.715.490	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.581.447.032	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
138	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.299.007.700	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.299.007.700	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
139	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.049.252.300	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.049.252.300	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
140	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.810.247.800	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.790.203.800	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
141	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	186.532.300	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	186.532.300	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
142	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	281.714.180	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	281.714.180	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
143	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	176.870.560	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	89.462.060	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
144	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	310.000.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	310.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
145	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	19.061.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	19.061.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
146	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.916.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.916.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
147	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	48.494.550	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	48.494.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
148	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.148.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.148.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
149	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	13.801.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	13.801.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)		DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
150	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
151	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
152	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	30.750.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	30.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
153	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	40.248.080	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	40.248.080	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
154	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	23.132.440	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	23.132.440	Dinas Perkebunan
155	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Dinas Perkebunan
156	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.800	Dinas Perkebunan
157	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.304.329.869	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.304.329.869	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
158	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.344.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.344.200	Dinas Perkebunan
159	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000	Dinas Perkebunan
160	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.983.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.983.900	Dinas Perkebunan
161	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.404.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.404.400	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
162	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.675.025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.675.025	Dinas Perkebunan
163	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000	Dinas Perkebunan
164	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.345.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.345.000	Dinas Perkebunan
165	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.662.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.662.000	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
166	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.847.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.847.000	Dinas Perkebunan
167	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.060.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.060.000	Dinas Perkebunan
168	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.570.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.570.000	Dinas Perkebunan
169	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	160.000.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	160.000.900	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
170	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.052.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.052.000	Dinas Perkebunan
171	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.676.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.676.600	Dinas Perkebunan
172	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.483.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.483.600	Dinas Perkebunan
173	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.583.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.583.600	Dinas Perkebunan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
174	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.159.540	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.159.540	Dinas Perkebunan
175	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.391.200	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.391.200	Dinas Perkebunan
176	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.176.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.176.000	Dinas Perkebunan
177	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60.231.073	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60.231.073	Dinas Perkebunan
178	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.300.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
179	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.000.000	Dinas Sosial
180	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.658.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	18.658.000	Dinas Sosial
181	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.142.880	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.142.880	Dinas Sosial
182	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	27.747.500	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	27.747.500	Dinas Sosial
183	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	122.008.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	122.008.000	Dinas Sosial
184	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	17.130.194.647	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	17.130.194.647	Dinas Sosial
185	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	19.640.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	19.640.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
186	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	290.169.930	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	290.169.930	Dinas Sosial
187	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	98.513.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	98.513.000	Dinas Sosial
188	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	15.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	15.000.000	Dinas Sosial
189	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	50.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
190	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.145.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.145.560	Dinas Sosial
191	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.038.240	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.038.240	Dinas Sosial
192	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.562.920	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.562.920	Dinas Sosial
193	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.445.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.445.650	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
194	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.430.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.430.000	Dinas Sosial
195	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.104.764.612	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.104.764.612	Dinas Sosial
196	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.667.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.667.100	Dinas Sosial
197	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.207.720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.207.720	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
198	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.130.640	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.130.640	Dinas Sosial
199	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.971.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.971.395	Dinas Sosial
200	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.525.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.525.800	Dinas Sosial
201	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
202	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	Dinas Sosial
203	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.789.815	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.789.815	Dinas Sosial
204	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	Dinas Sosial
205	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
206	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000	Dinas Sosial
207	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.738.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.738.000	Dinas Sosial
208	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.000.000	Dinas Sosial
209	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.576.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.576.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
210	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.875.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.875.000	Dinas Sosial
211	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.000	Dinas Sosial
212	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	Dinas Sosial
213	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.520.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.520.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
214	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.000.000	Dinas Sosial
215	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.480.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.480.000	Dinas Sosial
216	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.258.080.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.258.080.000	Dinas Sosial
217	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.100.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.100.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
218	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.146.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.146.000	Dinas Sosial
219	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.474.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.474.000	Dinas Sosial
220	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	299.936.400	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	299.936.400	Dinas Sosial
221	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	44.333.500	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	44.333.500	Dinas Sosial
222	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
223	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	220.389.800	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	220.389.800	Dinas Sosial
224	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.770.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.770.000	Dinas Sosial
225	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	Dinas Sosial
226	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	517.210.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	517.210.000	Dinas Sosial
227	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.489.200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.489.200	Dinas Sosial
228	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	871.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	871.000	Dinas Sosial
229	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
230	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	191.782.200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	191.782.200	Dinas Sosial
231	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	50.144.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	50.144.000	Dinas Sosial
232	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.364.500	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.364.500	Dinas Sosial
233	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	60.938.471	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	60.938.471	Dinas Sosial
234	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	248.043.400	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	248.043.400	Dinas Sosial
235	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	514.231.370	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	514.231.370	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
236	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.497.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.497.000	Dinas Sosial
237	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.012.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.012.000	Dinas Sosial
238	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.532.067.900	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.532.067.900	Dinas Sosial
239	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.950.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.950.000	Dinas Sosial
240	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	275.720.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	275.720.000	Dinas Sosial
241	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.999.600	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.999.600	Dinas Sosial
242	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.000.100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.000.100	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
243	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.000.000	Dinas Sosial
244	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.473.150	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.473.150	Dinas Sosial
245	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.229.900	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.229.900	Dinas Sosial
246	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	59.984.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	59.984.000	Dinas Sosial
247	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.000.000	Dinas Sosial
248	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	450.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	450.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
249	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.424.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.424.000	Dinas Sosial
250	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	600.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	600.000	Dinas Sosial
251	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	909.804.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	909.804.000	Dinas Sosial
252	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	50.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	50.000.000	Dinas Sosial
253	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	36.558.300	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	36.558.300	Dinas Sosial
254	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.150.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.150.000	Dinas Sosial
255	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.069.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.069.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
256	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.120.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.120.000	Dinas Sosial
257	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.620.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.620.000	Dinas Sosial
258	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	Dinas Sosial
259	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	Dinas Sosial
260	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.448.800	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.448.800	Dinas Sosial
261	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
262	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.856.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.856.000	Dinas Sosial
263	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	497.550.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	497.550.000	Dinas Sosial
264	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	46.776.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	46.776.000	Dinas Sosial
265	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.807.800	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.807.800	Dinas Sosial
266	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.128.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.128.000	Dinas Sosial
267	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	19.848.200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	19.848.200	Dinas Sosial
268	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	35.473.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	35.473.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
269	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	94.230.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	94.230.000	Dinas Sosial
270	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.346.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.346.000	Dinas Sosial
271	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.000.000	Dinas Sosial
272	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.750.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.750.000	Dinas Sosial
273	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	600.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	600.000	Dinas Sosial

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
274	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.300.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.300.000	Dinas Kesehatan
275	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
276	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.840.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
277	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.000.000	Dinas Kesehatan
278	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
279	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.586.935	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.586.935	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
280	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.000.000	Dinas Kesehatan
281	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
282	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.350.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.350.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
283	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.090.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	119.540.000	Dinas Kesehatan
284	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.604.540	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
285	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
286	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.000.000	Dinas Kesehatan
287	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
288	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
289	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.000.000	Dinas Kesehatan
290	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.036.667	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.036.667	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
291	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
292	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.960.631.840	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.960.631.840	Dinas Kesehatan
293	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.614.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.614.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
294	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.617.442	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.617.442	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
295	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.100.000.000	Dinas Kesehatan
296	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
297	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.500.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.500.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
298	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000	Dinas Kesehatan
299	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.536.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.536.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
300	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
301	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	234.949.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	234.949.000	Dinas Kesehatan
302	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
303	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.171.879.328	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.171.879.328	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
304	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.200.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.200.000	Dinas Kesehatan
305	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
306	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.011.939.374	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.011.939.374	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
307	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92.191.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	92.191.000	Dinas Kesehatan
308	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.500.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.500.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
309	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	281.732.160	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	281.732.160	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
310	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	Dinas Kesehatan
311	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
312	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.833.070	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
313	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.000.000	Dinas Kesehatan
314	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
315	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.900.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.900.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
316	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.352.030	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.352.030	Dinas Kesehatan
317	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
318	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	481.157.600	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	481.157.600	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
319	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	170.838.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	170.838.000	Dinas Kesehatan
320	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.425.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.425.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
321	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	414.051.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	414.051.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
322	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.000.000	Dinas Kesehatan
323	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
324	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.500.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
325	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan
326	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
327	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
328	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	110.000.000	Dinas Kesehatan
329	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
330	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.329.155.260	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.329.155.260	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
331	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.021.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.021.000.000	Dinas Kesehatan
332	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.200.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
333	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.135.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.135.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
334	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan
335	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
336	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
337	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.799.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.282.400	Dinas Kesehatan
338	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.500.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
339	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
340	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.800.000	Dinas Kesehatan
341	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.600.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
342	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.905.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.905.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
343	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.896.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.896.000	Dinas Kesehatan
344	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.311.576	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.311.576	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
345	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	645.625.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	645.625.934	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
346	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.130.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.230.000	Dinas Kesehatan
347	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	463.069.500	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
348	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.302.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94.992.850	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
349	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Dinas Kesehatan
350	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
351	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
352	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.170.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.170.000	Dinas Kesehatan
353	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.729.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.729.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
354	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
355	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.431.880.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.438.480.000	Dinas Kesehatan
356	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.232.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.832.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
357	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.636.900	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
358	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.399.400	Dinas Kesehatan
359	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.993.400	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
360	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.268.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
361	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.500.000	Dinas Kesehatan
362	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
363	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	13.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	13.000.000	Dinas Kesehatan

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
364	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	15.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	15.000.000	Dinas Kesehatan
365	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
366	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
367	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
368	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
369	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
370	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
371	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.437.904.900	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.807.116.173	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
372	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
373	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	57.433.900	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	57.433.900	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
374	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	63.895.800	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	63.895.800	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
375	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN	58.854.600	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	58.854.600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
			BARANG DAN JASA				
376	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	97.527.200	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	97.527.200	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
377	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	60.700.400	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	60.700.400	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
378	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	50.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	50.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
379	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	242.276.200	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	242.276.200	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
380	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	57.823.500	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	57.823.500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
381	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
382	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
383	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	179.717.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	179.717.600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
384	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.547.008	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.547.008	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
385	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.677.146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.677.146	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
386	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.399.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.399.600	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
387	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.738.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.738.680	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
388	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.730.366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.730.366	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
389	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.100.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
390	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N DAERAH PROVINSI		N DAERAH PROVINSI		
391	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
392	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.123.921.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.123.921.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
393	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
394	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.584.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.584.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
395	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.076.200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.076.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
396	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.213.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.213.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
397	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
398	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.468.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.468.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
399	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.261.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.261.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
400	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.323.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.323.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
401	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
402	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.985.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.985.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
403	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.876.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	243.876.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
404	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.637.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.637.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
405	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
406	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
407	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
408	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
409	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274.312.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274.312.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
410	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.223.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.223.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	RKP 2026		RKPD 2026 Sebelum Perubahan		PRKPD 2026 Sesudah Perubahan		Perangkat Daerah
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
411	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
412	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: SIPD RI, Bappeda 2026,diolah

Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam RKP 2026 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2026

Untuk mengetahui Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2026, kami sampaikan pada table 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Pada Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**2.277.329.607.100,00**	**2.168.713.083.452,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.277.329.607.100,00	2.168.713.083.452,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.626.989.473.700,00	1.490.539.836.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	644.930.133.400,00	674.100.885.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.410.000.000,00	4.072.361.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**7.121.392.900,00**	**5.277.966.499,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.121.392.900,00	5.277.966.499,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.215.097.900,00	2.527.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	900.000.000,00	114.385.499,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000,00	56.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000,00	79.686.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.656.295.000,00	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**215.154.000.000,00**	**212.234.455.794,62**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	215.154.000.000,00	212.234.455.794,62	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.339.870.210,00	75.294.234.635,23	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.881.866.790,00	136.156.767.159,39	DINAS KESEHATAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	650.263.000,00	612.314.000,00	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	65.000.000,00	28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	217.000.000,00	143.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**514.619.000.000,00**	**530.290.919.589,50**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	514.619.000.000,00	530.290.919.589,50	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	512.119.000.000,00	508.426.479.569,50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.500.000.000,00	21.864.440.020,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**61.137.000.000,00**	**55.210.818.273,68**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	61.137.000.000,00	55.210.818.273,68	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.074.515.088,20	52.962.808.788,68	RUMAH SAKIT JIWA
21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.821.608.811,80	2.248.009.485,00	RUMAH SAKIT JIWA
22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	240.876.100,00	0,00	RUMAH SAKIT JIWA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.691.997.000.000,00**	**1.738.848.922.797,23**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.691.997.000.000,00	1.738.848.922.797,23	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.126.264.760,00	56.272.733.887,23	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.633.562.832.840,00	1.681.149.129.710,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
25	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.307.902.400,00	1.427.059.200,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**90.463.000.000,00**	**139.153.150.096,20**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	90.463.000.000,00	139.153.150.096,20	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.036.388.230,20	55.977.504.653,20	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
27	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	32.426.611.769,80	83.175.645.443,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**154.632.000.000,00**	**218.881.125.436,75**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.308.009.092,41	110.683.281.015,14	
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.200.000.000,00	2.072.437.456,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
29	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.200.000.000,00	606.664.550,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.550.000.000,00	951.712.330,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.800.000.000,00	171.777.900,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
32	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	21.600.000.000,00	155.721.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.568.382.942,34	84.682.421.269,46	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
34	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.612.987.150,07	18.837.059.277,68	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.776.639.000,00	3.205.486.732,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	68.323.990.907,59	108.197.844.421,61	
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.532.000.640,03	17.441.199.615,42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
37	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	206.135.000,00	152.950.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
38	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.963.064.000,00	16.229.728.729,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
39	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	26.622.791.267,56	74.373.965.777,19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.900.000.000,00**	**895.419.400,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.900.000.000,00	895.419.400,00	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
40	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	700.000.000,00	68.490.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
41	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.200.000.000,00	826.928.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**63.159.000.000,00**	**57.527.189.752,63**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	63.159.000.000,00	57.527.189.752,63	
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.314.000.000,00	56.837.827.502,63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
43	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	845.000.000,00	689.362.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**43.676.000.000,00**	**51.743.300.470,59**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.676.000.000,00	51.743.300.470,59	
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.421.210.800,00	10.798.794.658,68	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
45	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	34.254.789.200,00	40.944.505.811,91	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	NON URUSAN	**0**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0		
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**46.860.000.000,00**	**44.230.039.597,43**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	46.860.000.000,00	44.230.039.597,43	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.564.104.351,80	23.192.625.264,23	DINAS SOSIAL
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	110.142.880,00	57.100.880,00	DINAS SOSIAL
49	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	120.000.000,00	98.513.000,00	DINAS SOSIAL
50	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.193.046.691,00	5.542.296.691,00	DINAS SOSIAL
51	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.000.000,00	8.831.622.900,00	DINAS SOSIAL
52	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20.697.706.077,20	6.442.880.862,20	DINAS SOSIAL
53	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	65.000.000,00	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**33.827.000.000,00**	**34.938.530.881,25**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.827.000.000,00	34.938.530.881,25	
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.270.218.672,00	28.274.403.381,25	DINAS TENAGA KERJA
55	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	38.268.328,00	20.485.800,00	DINAS TENAGA KERJA
56	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.095.000.000,00	6.060.719.500,00	DINAS TENAGA KERJA
57	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	230.000.000,00	125.241.900,00	DINAS TENAGA KERJA
58	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	968.513.000,00	300.777.300,00	DINAS TENAGA KERJA
59	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	225.000.000,00	156.903.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**12.743.000.000,00**	**12.204.126.792,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.493.000.000,00	12.054.126.792,00	
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.470.190.000,00	10.819.126.792,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
61	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	350.000.000,00	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
62	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.202.681.900,00	488.108.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
63	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50.000.000,00	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000	122.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
65	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100.000.000,00	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	220.128.100,00	279.892.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	250.000.000,00	150.000.000,00	
67	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	25.000.000,00	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
68	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	25.000.000,00	44547000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	200.000.000,00	105.453.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**16.306.000.000,00**	**17.508.365.707,02**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.306.000.000,00	17.508.365.707,02	
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.159.046.570,00	16.655.145.667,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
71	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	135.008.000,00	135.008.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	341.297.463,00	191.095.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
73	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	23.317.200,00	23.317.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	62.395.440,00	40.804.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54.501.000,00	54.501.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	26.040.000,00	16.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	28.490.000	28.490.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124.360.000,00	109.386.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	351.544.327,00	254.578.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**6.048.000.000,00**	**5.524.482.042,38**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.048.000.000,00	5.524.482.042,38	
80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.748.000.000,00	5.423.612.362,38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	148.000.000,00	47.585.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
82	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	55.000.000,00	23.716.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
				DAN PENCATATAN SIPIL
83	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	42.000.000,00	17.999.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
84	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	55.000.000,00	11.567.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**12.790.000.000,00**	**13.585.428.486,85**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.790.000.000,00	13.585.428.486,85	
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.665.000.000,00	10.966.952.486,85	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
86	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	20.000.000,00	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
87	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	385.000.000,00	509.336.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
88	PROGRAM PENATAAN DESA	20.000.000,00	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.700.000.000,00	2.109.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**80.000.000,00**	**0**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	80.000.000,00	0	
90	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80.000.000,00	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**19.902.000.000,00**	**18.439.440.513,30**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.902.000.000,00	18.439.440.513,30	
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.878.500.000,00	17.347.181.693,30	DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.700.000.000,00	879.335.007,00	DINAS PERHUBUNGAN
93	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	323.500.000,00	212.923.813,00	DINAS PERHUBUNGAN
94	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**34.028.000.000,00**	**42.720.154.455,65**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.808.000.000,00	42.651.954.455,65	
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.700.000.000,00	15.657.651.755,65	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
96	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.588.000.000,00	18.019.700.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
97	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.520.000.000,00	8.974.602.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	120.000.000,00	28.200.000,00	
98	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	120.000.000,00	28.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000,00	40.000.000,00	
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000,00	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**15.898.000.000,00**	**16.894.091.784,29**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.898.000.000,00	16.894.091.784,29	
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.783.000.000,00	16.219.590.634,29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
101	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000,00	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	70.000.000,00	29337000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
103	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.000.000,00	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
104	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	75.000.000,00	42.544.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	315.000.000,00	138.432.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
106	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	475.000.000,00	420.937.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
107	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	140.000.000,00	28.250.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**17.590.000.000,00**	**16.002.359.352,25**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.590.000.000,00	16.002.359.352,25	
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.990.000.000,00	15.670.885.752,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
109	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	236.344.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
112	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	59.066.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	36.063.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**39.072.000.000,00**	**37.704.200.100,52**	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.072.000.000,00	37.704.200.100,52	
114	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.722.000.000,00	18.457.808.075,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
115	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	800.000.000,00	373.004.525,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
116	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.250.000.000,00	18.073.387.500,52	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
117	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**14.998.000.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.898.000.000,00	14.823.448.536,27	
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.981.199.000,00	14.260.155.036,27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
119	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	525.647.200,00	472.139.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
120	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	391.153.800,00	91.153.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.000.000,00	99.282.600,00	
121	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	99.282.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
122	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**21.738.000.000,00**	**21.211.532.058,38**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.738.000.000,00	21.211.532.058,38	
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.556.000.000,00	20.334.653.118,38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
124	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	130.000.000,00	22.531.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
125	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	315.000.000,00	94.632.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
126	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	280.000.000,00	166.727.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
127	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	130.000.000,00	43.943.960,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
128	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	327.000.000,00	12.771.197.511,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**13.785.915.410,00**	**12.771.197.511,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.785.915.410,00	12.771.197.511,00	
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.385.915.410,00	12.215.475.611,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
130	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	400.000.000,00	112.679.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
131	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	350.000.000,00	183.668.900,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
132	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	272.500.000,00	60.201.900,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
133	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	377.500.000,00	199.171.800,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	NON URUSAN	**616.084.590,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	616.084.590,00		
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	616.084.590,00		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**17.723.000.000,00**	**15.422.276.340,62**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.723.000.000,00	15.422.276.340,62	
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.453.960,00	14.134.557.567,70	DINAS PERKEBUNAN
136	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	139.783.000,00	60.726.740,00	DINAS PERKEBUNAN
137	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.782.725.390,00	1.104.177.891,32	DINAS PERKEBUNAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
138	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.944.355,00	63.380.520,00	DINAS PERKEBUNAN
139	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	26.519.402,00	19.431.921,60	DINAS PERKEBUNAN
140	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	215.573.893,00	40.001.700,00	DINAS PERKEBUNAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**5.978.331.564,92**	**25.355.597.358,87**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.978.331.564,92	25.355.597.358,87	
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.422.863.564,92	20.933.304.286,87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
142	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.343.615.400,00	3.235.063.240,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
143	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.626.913.000,00	258.693.850,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
144	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	501.880.600,00	838.707.907,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
145	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	23.059.000,00	9.664.745,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
146	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60.000.000,00	80.163.330,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	NON URUSAN	**19.067.668.435,08**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	19.067.668.435,08		
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.067.668.435,08		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**12.099.878.000,00**	**348.461.730,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.099.878.000,00	348.461.730,00	
148	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	6.000.000,00	4.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
149	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	578.000.000,00	232.957.730,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
150	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	36.000.000,00	19.554.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
151	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	11.479.878.000,00	91.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**52.404.122.000,00**	**57.290.925.535,33**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52.404.122.000,00	57.290.925.535,33	
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.246.282.000,00	39.461.734.035,33	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
153	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.050.000.000,00	569.114.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
154	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.360.000.000,00	17.055.130.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
155	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	350.000.000	196.231.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
156	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	397.840.000,00	8.715.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**64.826.000.000,00**	**62.877.654.362,05**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	64.826.000.000,00	62.877.654.362,05	
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.534.116.000,00	62.083.451.455,05	DINAS KEHUTANAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
158	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	444.134.000,00	338.377.975,00	DINAS KEHUTANAN
159	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	702.250.000,00	250.132.100,00	DINAS KEHUTANAN
160	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.075.750.000,00	189.137.500,00	DINAS KEHUTANAN
161	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	69.750.000,00	16.555.332,00	DINAS KEHUTANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**20.529.000.000,00**	**18.547.743.189,88**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.529.000.000,00	18.547.743.189,88	
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.429.000.000,00	16.850.554.020,38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
163	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	446.897.600,00	329.357.950,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
164	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	611.617.890,00	260.748.890,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
165	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.124.791.870,50	581.879.990,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
166	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	916.692.639,50	525.202.339,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**44.996.000.000,00**	**50.638.869.156,40**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.235.193.500,00	15.745.828.656,40	
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.910.193.500,00	15.447.022.756,40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
168	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
169	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	40.000.000,00	35.238.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
170	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	45.000.000,00	23.567.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
171	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	240.000.000,00	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
172	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	28.760.806.500,00	34.893.040.500,00	
173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
174	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	28.735.806.500,00	34.883.698.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
175	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	9.341.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
176	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	NON URUSAN	**0**	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0	0	
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
179	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	839.519.700,00	859.541.230,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
180	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
181	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	74.970.042.000,00	77.481.683.840,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO HUKUM

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
183	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.116.763.145,00	265.802.400,00	BIRO HUKUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO PEREKONOMIAN
185	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.207.866.000,00	334.106.300,00	BIRO PEREKONOMIAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
187	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.225.000.000,00	557.092.586,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
188	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
189	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	704.000.000,00	351.143.600,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
190	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO ORGANISASI
191	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	610.491.900,00	411.825.900,00	BIRO ORGANISASI
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO UMUM
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**229.482.000.000,00**	**370.270.043.652,75**	
	SEKRETARIAT DPRD	229.482.000.000,00	370.270.043.652,75	
194	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.167.000.000,00	278.802.659.004,75	SEKRETARIAT DPRD
195	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	105.315.000.000,00	91.467.384.648,00	SEKRETARIAT DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**28.596.000.000,00**	**30.139.422.890,80**	
	PERENCANAAN	28.596.000.000,00	30.139.422.890,80	
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.736.000.000,00	26.248.192.009,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
197	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.010.000.000,00	2.064.273.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
198	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.850.000.000,00	1.826.957.709,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**1.713.149.000.000,00**	**1.157.754.932.161,38**	
	KEUANGAN	1.713.149.000.000,00	1.157.754.932.161,38	
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.149.685.337,54	169.151.750.267,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
200	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.493.552.426.142,46	981.199.386.028,49	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
201	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	7.403.795.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**94.199.000.000,00**	**96.631.573.000,00**	
	KEUANGAN	94.199.000.000,00	96.631.573.000,00	
202	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.898.104.000,00	86.147.304.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
203	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.300.896.000,00	10.484.268.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**20.096.000.000,00**	**20.591.536.757,68**	
	KEPEGAWAIAN	20.096.000.000,00	20.591.536.757,68	
204	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.482.450.740,00	19.090.695.998,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
205	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.613.549.260,00	1.500.840.759,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**22.157.000.000,00**	**25.515.568.604,73**	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	22.157.000.000,00	25.515.568.604,73	
206	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.557.108.200,00	18.919.270.604,73	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
207	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.599.891.800,00	6.596.298.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**8.979.000.000,00**	**9.405.128.000,00**	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.979.000.000,00	9.405.128.000,00	
208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.479.000.000,00	8.313.703.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
209	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	368.000.000,00	1.076.425.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
210	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	132.000.000,00	15.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**17.788.000.000,00**	**17.565.131.694,73**	
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	17.788.000.000,00	17.565.131.694,73	
211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.625.574.500,00	16.311.283.094,73	BADAN PENGHUBUNG
212	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.162.425.500,00	1.253.848.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**3.841.265.000,00**	**41.526.960.811,88**	
	INSPEKTORAT DAERAH	3.841.265.000,00	41.526.960.811,88	
213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.328.737.000,00	39.947.699.611,88	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
214	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.430.950.000,00	1.345.449.100,00	INSPEKTORAT
215	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	81.578.000,00	233.812.100,00	INSPEKTORAT
	NON URUSAN	**34.714.735.000,00**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	34.714.735.000,00		
216	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.714.735.000,00		INSPEKTORAT
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		**30.886.031.909,13**	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		30.886.031.909,13	
217	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	1.046.241.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
218	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	21.045.791.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
219	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	795.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
220	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	30.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
221	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	43.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7.923.909.309,13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	NON URUSAN	19.482.000.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	19.482.000.000,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Perangkat Daerah
223	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.482.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Sumber : SIPD RI, Bappeda, diolah

Sebagai informasi tentang jumlah Sub kegiatan yang mendukung Prioritas daerah pada perubahan RKPD tahun anggaran 2026, kai sampaikan pada table 5.3 sebagai berikut;

Tabel 5. 2 Alokasi Dukungan Pagu Per Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah
1	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	66
2	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	101
3	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi.	84
4	Pengentasan Kemiskinan;	34
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;	297
6	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;	16
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;	39

Sumber : SIPD RI, Bappeda 2026, diolah

5.2 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Untuk menyampaikan bentuk penyelenggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada dokumen Perubahan RKPD 2026 Provinsi Lmapung, berikut kai sampaikan Program dan Kegiatan yang mendukung SPM sebagai berikut;

Tabel 5. 4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM sebelum dan sesudah Perubahan RKPD 2026

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.210.000.000,00	3.954.961.200,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000,00	117.400.000,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0	0

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00	3.559.873.600,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	25.440.000,00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.575.840.000,00	0
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	75.000.000.000,00	69.916.400.000,00
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	0
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	300.000.000,00	5.449.185.200,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	1.224.000.000,00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	25.440.000,00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	37.040.000.000,00	0
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	45.000.000.000,00	39.831.000.000,00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	0	0
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0	0
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	86.700.000,00	25.000.000,00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	75.000.000,00	5.400.000,00
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.650.000.000,00	2.006.564.400,00
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0	0
25	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	700.000.000,00	166.614.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
26	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	369.663.042,00	102.617.442,00
27	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.400.000.000,00	1.824.117.456,00
28	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	750.000.000,00	951.712.330,00
29	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	0	0
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00	14.346.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.000.000,00	600.000,00
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.000.000,00	94.230.000,00
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100.000.000,00	35.473.000,00
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.000.000,00	6.000.000,00
36	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1.000.000,00	564.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
37	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	4.000.000,00	16.807.800,00
38	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.000.000,00	18.348.200,00
39	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	559.509.000,00	492.750.000,00
40	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	30.000.000,00	49.590.000,00
41	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	547.541.370,00	505.243.370,00
42	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000,00	1.950.000,00
43	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	75.000.000,00	253.587.400,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
44	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	200.000.000,00	81.016.471,00
45	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.617.000,00	6.497.000,00
46	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00	5.012.000,00
47	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pengasuhan	45.804.571,00	36.456.000,00
48	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	22.000.000,00	49.248.000,00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	30.000.000,00	13.364.500,00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	1.532.067.900,00	1.482.387.900,00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	200.000.000,00	181.588.200,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.868.000,00	2.856.000,00
53	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.000.000,00	1.000.000,00
54	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12.960.000,00	15.620.000,00
55	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	18.278.300,00	7.120.000,00
56	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00
57	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.000.000,00	1.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
58	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	20.448.800,00	20.448.800,00
59	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	14.219.000,00	3.150.000,00
60	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	20.000.000,00	36.558.300,00
61	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000,00	15.069.000,00
62	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	911.852.000,00	901.804.000,00
63	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	50.000.000,00	50.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
64	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000,00	3.000.000,00
65	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	600.000,00	600.000,00
66	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	2.000.000,00	3.424.000,00
67	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	15.000.000,00	7.229.900,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
68	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40.000.000,00	1.473.150,00
69	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	20.000.000,00	59.984.000,00
70	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	1.998.000,00	450.000,00
71	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	2.532.750,00	7.000.100,00
72	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.000.000,00	5.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
73	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	273.750.000,00	275.720.000,00
74	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	15.000.000,00	14.999.600,00
75	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.238.058.647,20	5.983.315.432,20
76	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	122.090.000,00	122.008.000,00
77	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	27.747.500,00	27.747.500,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
78	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	19.640.000,00	19.640.000,00
79	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	290.169.930,00	290.169.930,00

Sumber: SIPD RI, Bappeda 2026, diolah

5.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 216 program yang terdiri dari 678 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2026 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2026, secara umum kami sampaiakn pada tabel 5.5 sebagia berikut;

Tabel 5. 5 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan	8	19	2.284.450.000.000,00	8	19	2.173.990.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	5	20	213.154.000.000,00	5	20	205.042.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada	3	9	2.000.000.000,00	3	9	6.792.037.683,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	3	6	514.619.000.000,00	3	6	530.291.000.000,00
5	Rumah Sakit Jiwa	3	9	61.137.000.000,00	2	3	55.210.818.274,00
6	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	1.692.000.000.000,00	3	12	1.738.850.000.000,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	10	90.463.000.000,00	2	10	139.153.000.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	14	26	156.532.000.000,00	14	26	219.777.000.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	63.159.000.000,00	2	10	57.527.189.753,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	43.676.000.000,00	2	12	51.743.300.471,00
11	Dinas sosial Provinsi Lampung	7	18	46.860.000.000,00	7	18	44.230.039.597,00
12	Dinas Tenaga Kerja	6	20	33.827.000.000,00	6	20	34.938.530.881,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	25	12.743.000.000,00	10	25	12.204.126.792,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	10	21	16.306.000.000,00	10	21	17.508.365.707,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	6.048.000.000,00	5	17	5.524.482.042,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	7	13	12.870.000.000,00	7	13	13.653.478.487,00
17	Dinas Perhubungan	4	20	19.902.000.000,00	4	20	18.439.440.513,00
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	5	14	34.028.000.000,00	5	14	42.720.154.456,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8	15	15.898.000.000,00	8	15	16.894.091.784,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	17.590.000.000,00	6	14	16.002.359.352,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	16	39.072.000.000,00	4	16	37.704.200.101,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	18	14.998.000.000,00	5	18	14.922.731.136,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	25	21.738.000.000,00	6	25	21.211.532.058,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
24	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	16	14.402.000.000,00	5	16	12.771.197.511,00
25	Dinas Perkebunan	6	12	17.723.000.000,00	6	12	15.422.276.341,00
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	18	25.046.000.000,00	6	18	25.355.597.359,00
27	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura	9	24	64.504.000.000,00	9	24	57.639.387.265,00
28	Dinas Kehutanan	5	19	64.826.000.000,00	5	19	62.877.654.362,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	23	20.529.000.000,00	5	23	18.547.743.190,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	21	44.996.000.000,00	10	21	50.638.869.156,00
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	6	1.394.000.000,00	2	6	1.155.661.000,00
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	75.694.000.000,00	2	8	78.119.543.240,00
33	Biro Hukum	2	5	2.135.000.000,00	2	5	1.001.808.900,00
34	Biro Perekonomian	2	7	1.680.000.000,00	2	7	754.810.300,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	1.625.000.000,00	2	9	892.178.096,00
36	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	1.327.000.000,00	2	7	718.026.500,00
37	Biro Organisasi	2	5	757.508.100,00	2	5	1.013.721.000,00
38	Biro Umum	1	10	167.876.000.000,00	1	10	184.211.000.000,00
39	Biro Administrasi Pimpinan	1	7	3.248.000.000,00	1	7	2.960.928.000,00
40	Sekretariat DPRD	2	17	229.482.000.000,00	2	17	370.270.000.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	28.596.000.000,00	3	15	30.139.422.891,00
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	15	1.713.150.000.000,00	3	15	1.157.750.000.000,00
43	Badan Pendapatan Daerah	2	9	94.199.000.000,00	2	9	96.631.573.000,00
44	Badan Kepegawaian Daerah	2	9	20.096.000.000,00	2	9	20.591.536.758,00
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	2	10	22.157.000.000,00	2	9	25.515.568.605,00
46	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	13	8.979.000.000,00	3	13	9.405.128.000,00
47	Badan Penghubung	2	8	17.788.000.000,00	2	8	17.565.131.695,00
48	Inspektorat	3	11	38.556.000.000,00	3	11	41.526.960.812,00
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	6	12	18.964.304.600,00	6	12	31.181.004.909,00
JUMLAH		**217**	**685**	**8.112.799.812.700,00**	**217**	**678**	**7.788.986.607.977,00**

Sumber : SIPD RI, Bappeda 2026, diolah

5.4 Dukungan Program Unggulan melalui pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Unggulan Tahun 2026

Dalam rangka mempercepat capaian pembangunan dan memastikan program unggulan daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung mengintegrasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai pendekatan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2026.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza-Jihan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan yang signifikan dan berdampak langsung pada masyarakat dalam waktu singkat. Dalam implementasinya, PHTC difokuskan pada beberapa kegiatan utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung dan cepat:

1. **Pengembangan Pupuk Organik Cair untuk mendukung Kemiskinan dan Stunting Melalui Pembinaan Kawasan Padi**

   Dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting melalui pembinaan kawasan padi, Pemerintah Daerah menetapkan kegiatan Belanja Pupuk Organik Cair sebagai bagian dari program penataan prasarana pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Cepat 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2025–2029.

   Total pagu anggaran untuk kegiatan ini tahun 2026 Rp. 10.350.430.950, dan pada Perubahan RKPD ini senilai Rp. 11.600.000.000, pada 800 lokasi didesa seluruh Kabupaten/Kota untuk kegunaan:

   a) Membenahi kualitas tanah lahan pertanian
   b) Mengurangi ketergantungan pupuk sintetis
   c) Menurunkan biaya produksi usaha budidaya pertanian

d) Meningkatkanproduktifitas tanaman
e) Pemberdaayaanpetanimelalui kelompok
f) menujukemandirian pupuk secara insitu.

2. Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Lampung

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mencatat total panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.695,479 kilometer, tersebar dalam 98 ruas jalan dan 16 koridor utama yang menghubungkan wilayah strategis di Provinsi Lampung. Dari total panjang tersebut, kondisi jalan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mengalami penambahan 1,71% dari tahun 2024 sepanjang 1.323,908 km, atau sekitar 78,08% dari total ruas jalan dan pada tahun 2025 Jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 1.352,825 km, atau sekitar 79 79% dari total ruas jalan..
- Jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) sepanjang 342,654 km, atau 20,21%.

Pada tahun 2026 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melaksanakan penanganan jalan melalui pinjaman daerah untuk 18 paket pekerjaan pada 17 ruas jalan provinsi dengan pagu 1 triliun dengan penanganan sepanjang 63,807 km.

Tabel 5.6 Penanganan Jalan Pinjaman 2026

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
1	2026	Preservasi Jalan Ruas Kasui - Air Ringkih (Bts. Sumsel) (Link. 075)	KASUI - AIR RINGKIH (BTS SUMATERA SELATAN)	RIGID	80	12+700 - 12+780
				RIGID	2,748	12+950 - 15+698
				RIGID	1,052	15+950 - 17+002
				RIGID	200	19+920 - 20+120
				RIGID	132	20+168 - 20+300
				RIGID	240	20+460 - 20+700
				RIGID	540	21+460 - 22+000
				RIGID	648	22+500 - 23+148

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
2	2026	Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan R.E. Martadinata (B.Lampung) (Link. 041.12.K)	JALAN RE. MARTADINATA (B.LAMPUNG)	RIGID	3.368	02+500 - 05+868
3	2026	Preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Pringsewu (Link. 033)	KALIREJO - PRINGSEWU	RIGID	1,75	10+600 - 12+350
				FLEXIBLE	200	12+450 - 12+650
				RIGID	750	12+650 - 13+400
4	2026	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Lempasing - Padang Cermin (Link. 042)	LEMPASING - PADANG CERMIN	RIGID	2.52	0+000 - 2+520
5	2026	Preservasi Jalan Ruas Jabung - Sp. Labuhan Maringgai (Link. 006)	JABUNG - SP. LABUHAN MARINGGAI	RIGID	100	19+800 - 19+900
				RIGID	160	20+590 - 20+750
				RIGID	35	20+800 - 20+835
				FLEXIBLE	3,12	16+680 - 19+800
				FLEXIBLE	690	19+900 - 20+590
				FLEXIBLE	50	20+750 - 20+800
				FLEXIBLE	2,127	20+835 - 22+962
6	2026	Pelebaran Penambahan Lajur Jalan Ruas Sp. Korpri - Purwotani (Link. 016)	SP. KORPRI - PURWOTANI	RIGID	180	2+550 - 2+730
				RIGID	8,322	6+022 - 14+164
7	2026	Preservasi Jalan Ruas Bandar Jaya - Sp. Mandala (Link. 022)	BANDAR JAYA - SP. MANDALA	RIGID	850	0+700 - 01+570
				FLEXIBLE	1,13	1+570 - 2+700
				FLEXIBLE	700	5+500 - 6+200
				RIGID	425	11+550 - 11+975
				RIGID	850	12+100 - 12+950
				FLEXIBLE	20	12+950 - 12+970
				FLEXIBLE	20	13+680 - 13+700
				RIGID	500	13+700 - 14+200
				FLEXIBLE	20	14+200 - 14+220
				RIGID	1,65	19+550 - 21+200
				RIGID	1,7	21+700 - 23+400
				RIGID	1,7	23+800 - 25+500
				FLEXIBLE	20	25+500 - 25+520
				FLEXIBLE	20	29+730 - 29+750
				RIGID	300	29+750 - 30+050
				FLEXIBLE	20	30+050 - 30+070
				RIGID	650	30+400 - 31+050
				RIGID	200	31+150 - 31+350
8	2026	Preservasi Jalan Ruas Kalirejo - Bangunrejo (Link. 025)	KALIREJO - BANGUNREJO	RIGID	200	00+000 - 00+200
				RIGID	2	01+100 - 03+100
				RIGID	1,6	04+900 - 06+500
				RIGID	1,735	11+265 - 13+000
9	2026	Preservasi Jalan Ruas Wates - Metro (Link. 027)	WATES - METRO	RIGID	525	04+495 - 05+020
				RIGID	820	06+000 - 06+820

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
10	2026	Preservasi Jalan Ruas Padang Ratu - Pekurun Udik (Link. 030)	PADANG RATU - PEKURUN UDIK	RIGID	3.5	—
11	2026	Preservasi Jalan Ruas Padang Ratu - Kalirejo (Link. 032)	PADANG RATU - KALIREJO	RIGID	375	6+400 - 6+775
				RIGID	500	9+350 - 9+850
				RIGID	1,55	11+950 - 13+500
				RIGID	2,46	14+700 - 17+160
				RIGID	600	18+000 - 18+600
				RIGID	500	19+200 - 19+700
				RIGID	515	21+735 - 22+250
12	2026	Preservasi Jalan Ruas Tegal Mukti - Tajab (Link. 088)	TEGAL MUKTI - TAJAB	FLEXIBLE	1,164	0+000 - 01+528
				FLEXIBLE	822	12+300 - 13+122
				FLEXIBLE	530	13+597- 14+127
				FLEXIBLE	2,429	14+898- 17+327
				FLEXIBLE	3,992	17+585- 21+577
13	2026	Preservasi Jalan Ruas Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar (Link. 044)	SP. TELUK KILUAN - SP. UMBAR	RIGID	2.671	0+950 - 3+621
14	2026	Preservasi Jalan Ruas Sp. Umbar - Putih Doh (Link. 045)	SP. UMBAR - PUTIH DOH	RIGID	570	4+435 - 5+000
				RIGID	900	5+100 - 6+000
				RIGID	350	6+000 - 6+350
				RIGID	200	7+200 - 7+400
				RIGID	200	7+500 - 7+700
				RIGID	400	8+600 - 9+000
				RIGID	100	9+350 - 9+450
15	2026	Preservasi Jalan Ruas Suoh - Sp. Blok 9 (Link. 049)	SUOH - SP. BLOK 9	RIGID	1,05	1+350 - 2+300
				RIGID	4,18	3+020 - 7+300
16	2026	Preservasi Jalan Ruas Gedong Aji - Umbul Mesir (Link. 093) di Kabupaten Tulang Bawang 1 (Pinjaman Daerah)	GEDONG AJI - UMBUL MESIR	RIGID	6.302	0+850 - 7+152
17	2026	Preservasi Jalan Ruas Gedong Aji - Umbul Mesir 2 (Link. 093) di Kabupaten Tulang Bawang 2 (Pinjaman Daerah)	GEDONG AJI - UMBUL MESIR	RIGID	5.663	25+837 - 31+500
18	2026	Preservasi Jalan Ruas Brabasan - Wiralaga (Link. 095) di Kabupaten Mesuji (Pinjaman Daerah)	BRABASAN - WIRALAGA	RIGID	556	5+644 - 6+200
				RIGID	300	6+600 - 6+900
				RIGID	800	7+300 - 8+100
				RIGID	1,1	8+400 - 9+500
				RIGID	2,2	10+500 - 12+700
				RIGID	600	14+400 - 15+000
				RIGID	350	15+350 - 15+700
				RIGID	300	21+100 - 21+400

NO	TAHUN ANGGARAN	PAKET PEKERJAAN	NAMA RUAS	JENIS PENANGANAN	PANJANG (M)	STA
				RIGID	300	21+900 - 22+200
				RIGID	2,319	27+124 - 29+443
		TOTAL			**63,807**	

Sumber : Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, 2026

3. Bantuan mesin pengering padi (dryer)

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra utama produksi padi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada tahun 2024 luas panen padi di wilayah ini mencapai sekitar 531.720 hektare, dengan produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 2,79 juta ton. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 luas panen padi mencapai sekitar 530.110 hektare dengan produksi sebesar 2,76 juta ton GKG. Oleh sebab itu peningkatan produksi tersebut harus diimbangi dengan upaya optimalisasi penanganan pascapanen, terutama dalam proses pengeringan gabah.

Terbatasnya fasilitas pengeringan gabah terutama di tingkat petani kecil di Provinsi Lampung membuat potensi nilai tambah tidak sepenuhnya dinikmati oleh para petani. Sebagian besar petani masih mengandalkan metode pengeringan tradisional melalui penjemuran di bawah sinar matahari, yang sangat tergantung pada kondisi cuaca dan tidak menjamin hasil yang seragam. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu gabah di tingkat petani, serta melemahkan posisi tawar mereka dalam rantai distribusi pangan. Dalam banyak kasus, gabah dalam kondisi belum kering optimal dikirim ke luar daerah untuk diproses di provinsi lain, gabah tersebut dikeringkan, digiling, dan kembali masuk ke pasar Lampung dalam bentuk beras konsumsi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Pengering mekanis seperti bed dryer menjadi solusi efektif yang dapat mengatasi kendala tersebut. Dengan alat ini, proses pengeringan tidak lagi tergantung pada cuaca dan dapat dilakukan dalam volume besar,

serta mampu menekan kadar air yang sesuai dengan standar mutu, sehingga mutu gabah lebih terjaga. Selain akan meningkatkan mutu gabah dan harga jual di tingkat petani, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri penggilingan lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menjaga agar nilai ekonomi hasil panen tetap berputar di dalam wilayah Provinsi Lampung.

Dengan demikian, penyediaan bed dryer merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pertanian yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Lampung sejak tahun 2025 hingga kini memberikan bantuan mesin pengering padi (dryer) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Tani (Poktan). Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas gabah kering giling serta beras, guna memperkuat daya saing produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung.

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Bad Dryer ke Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2026

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima (Gapoktan, Poktan, BUMDes)			Total
		APBD 2025	APBD P 2025	APBD 2026	
1	Lampung Barat	3	-	-	3
2	Tanggamus	3	-	3	6
3	Lampung Selatan	5	4	17	26
4	Lampung Timur	2	1	10	13
5	Lampung Tengah	-	1	20	21
6	Lampung Utara	3	1	11	15
7	Way Kanan	2	-	4	6
8	Tulang Bawang		1	3	4
9	Pesawaran	1	2	2	5
10	Pringsewu	2	-	2	4
11	Mesuji	1	-	3	4
12	Tulang Bawang Barat		-	5	5
13	Pesisir Barat	1	-	1	2

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima (Gapoktan, Poktan, BUMDes)			Total
		APBD 2025	APBD P 2025	APBD 2026	
14	Bandar Lampung	-	-	-	-
15	Metro	-	-	1	1
	Provinsi Lampung	**23**	**10**	**82**	**115**

Sumber: Disperindag Prov Lampung, 2026

4. **Dukungan Anggaran Jalan Lingkungan Menuju Lokasi RMU dan Dryer.**

   Provinsi Lampung tahun 2026 mengakomodir dukungan jalan lingkungan/desa menuju industri pertanian yang menjalankan kegiatan industri pertanian Rice Mill Unit (RMU) dan Dryer Padi/Jagung di beberapa kabupaten, antara lain:

No	Desa	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH (Rp)
1	Desa Terbanggi Besar Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah	110.91	M^1	1,800,000	199,638,000
2	Desa Bandar Negeri Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur	110.91	M^1	1,800,000	199,638,000
3	Desa Nibung Kec Gunung Pelindung Kab Lampung Timur	110.91	m	1,800,000	199,638,000
4	Desa Way Redak Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat	221.82	M^1	1,800,000	399,276,000

5. **Program DESAKU MAJU**

   Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Program Desaku Maju sebagai salah satu program unggulan dalam agenda pembangunan daerah. Diluncurkan pada masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

   Desaku Maju hadir dengan visi menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

   Fokus Program Desaku Maju:

a) **Penguatan Ekonomi Desa**

Melalui dukungan terhadap hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan UMKM, program ini mendorong desa menjadi sentra produksi dan distribusi yang mandiri.

b) **Peningkatan Infrastruktur**

Perbaikan dan pembangunan jalan desa, serta sarana produksi seperti instalasi pengolahan pupuk dan alat pengering hasil pertanian, menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing desa.

c) **Pemberdayaan SDM dan Pelatihan Vokasi**

Program ini juga memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa agar mereka memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal.

d) **Revitalisasi Peran BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa diperkuat sebagai pengelola usaha strategis desa, agar mampu menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Indikator keberhasilan Desaku Maju meningkatnya status desa mandiri berupa persentase desa mandiri yang target pada tahun 2025 21,42% capaiannya 21,05% dan target pada tahun 2026 23,96%.

Program Unggulan Provinsi Lampung

Pada Tahun anggaran 2026 ini,Provinsi Lampung memiliki beerap program unggulan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat provinsi lampung, namu juga mampu mendorong program Prioritas Nasional yaitu :

1. Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar untuk memperkuat gizi rakyat dan mempercepat penurunan stunting. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang disiplin, standar yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Program makan bergizi tidak hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi juga harus menjamin keamanan

pangan. Apabila aspek keamanan pangan diabaikan, maka yang terjadi bukan peningkatan kualitas gizi, melainkan munculnya masalah kesehatan baru yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik.



Sumber : Bappeda 2026

Gambar 5.4 : Peninjauan pelaksanaan Program MBG oleh Gubernur Lampung

Penguatan pemenuhan gizi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan Program MBG yang diarahkan untuk memberikan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan sasaran posyandu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. Program ini menyasar 2.372.731 jiwa yang terdiri dari siswa sekolah 2.021.981 jiwa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebanyak 350.750 jiwa. Pelaksanaan program dilakukan melalui penguatan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T sebanyak 91 SPPG guna memastikan layanan dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Satgas MBG terus melakukan percepatan pembangunan dan pengoperasian dapur MBG. Hingga tahun 2026, jumlah realisasi dapur MBG telah mencapai 1.120 unit atau 140,3% dari target awal sebanyak 798 unit, dengan 1.071 dapur telah beroperasi aktif. Selain memperkuat layanan pemenuhan gizi, program ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dengan total lebih dari 50.649 relawan yang terlibat dalam operasional SPPG.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat aspek regulasi, pengawasan, dan keamanan pangan melalui penerbitan berbagai keputusan gubernur, surat edaran, serta pembentukan Satgas MBG tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan standar higiene, sanitasi, dan tata kelola dapur berjalan sesuai ketentuan. Hingga saat ini, tercatat 23.888 penjamah makanan telah memiliki sertifikasi, sementara proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terus dipercepat guna menjamin mutu layanan kepada masyarakat, adapun SLHS yang telah terbit sebanyak 405 SPPG (37,81%).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pelibatan Lembaga Ekonomi Desa seperti BUM Desa, koperasi, dan Gapoktan. Melalui kemitraan dengan SPPG, kebutuhan bahan pangan program MBG diharapkan dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal masyarakat desa sehingga mampu menciptakan pasar yang pasti bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi kemitraan antara Lembaga Ekonomi Desa seperti BUM Desa, koperasi, dan Gapoktan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai penyokong utama kebutuhan program MBG sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Dengan langkah tersebut, program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menciptakan perputaran ekonomi desa yang lebih produktif, berkelanjutan, dan inklusif.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain memastikan ketersediaan bahan baku yang aman dan berkualitas,

kemitraan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta menjadikan Lembaga Ekonomi Desa sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mendukung keberhasilan program MBG di Provinsi Lampung.

Meskipun demikian, hasil monitoring lapangan masih menemukan beberapa kendala, seperti standar bangunan dapur yang belum optimal, pengelolaan limbah yang belum memadai, hingga kedisiplinan relawan terhadap SOP keamanan pangan. Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan perbaikan pada peningkatan kualitas infrastruktur, sertifikasi wajib, penguatan SOP, serta pengawasan ketat terhadap operasional dapur MBG. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan target zero case keracunan makanan sekaligus memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional

Provinsi Lampung memiliki peran dan potensi strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Lampung tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan untuk komoditas tertentu, tetapi juga menjadi wilayah prioritas dalam program-program pangan pemerintah. Pada tahun 2026 Provinsi Lampung memperkuat sektor peternakan sebagai bagian dari strategi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan daerah menuju lumbung pangan nasional. Penguatan ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari aspek penyediaan pakan ternak berkualitas, pengendalian penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis, peningkatan mutu pembibitan, hingga penguatan kapasitas peternak. Salah satu capaian penting dalam penguatan pakan ternak adalah pengembangan Rumput Pakchong Varietas Tansa di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, yang telah mencapai luas tanam 55 hektar. Dari sisi kesehatan hewan, Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam pengendalian PMK dengan capaian vaksinasi

hingga bulan April 2026 sebesar 84.624 layanan atau 25,04%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pelayanan terpadu kesehatan hewan di sentra peternakan rakyat yang tidak hanya melakukan vaksinasi PMK dan LSD, tetapi juga pemeriksaan kesehatan ternak serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak.



Sumber : Bappeda 2026

Gambar 5.5 : Pelaksanaan Panen raya serentak di 14 Provinsi

Langkah ini memberikan dampak nyata dalam menjaga kesehatan ternak, melindungi usaha peternakan rakyat, dan memastikan stabilitas produksi pangan asal ternak tetap terjaga. Penguatan reproduksi ternak juga dilakukan melalui UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan produksi mani/semen beku sapi sejak tahun 2001. Seiring dengan peningkatan mutu, sejak Juni 2022 produksi semen beku telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga saat ini melalui Sertifikasi SNI Nomor 45023/LSPro/I-SNI-SBI/IX/2025, sebanyak 16 ekor sapi pejantan dari berbagai bangsa seperti Limousin, Simmental, Brahman, dan Bali telah memenuhi standar nasional, sehingga mutu semen beku lebih terjamin dan tingkat keberhasilan inseminasi buatan bagi peternak dapat meningkat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi (monev) Uji Zuriat Sapi Perah Periode IV di Dairy Farm PT. GGLC Lampung Tengah bersama Tim BET Cipelang. Hingga 2025, tercatat capaian uji zuriat sebanyak 28 ekor dari target 40 ekor sebagai bagian dari penguatan pemuliaan sapi perah berbasis performa produksi. Rataan produksi susu sapi perah hasil uji zuriat menunjukkan

capaian di atas 27 liter/ekor/hari, yang menggambarkan potensi genetik lokal yang kompetitif dan berpeluang meningkatkan produksi susu dalam negeri.

2. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan

Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 menjadi momentum penguatan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendukung ketahanan energi daerah dan nasional, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Berbagai capaian strategis telah direalisasikan, khususnya dalam percepatan eksplorasi migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).



Sumber : Bappeda 2026
Gambar 5.6 : Peninjauan proyek Geothermal di Kabupaten Tanggamus

Pada subsektor minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan survei seismik 2D Garbera di Wilayah Kerja (WK) Migas Sumbagsel Area I yang dikelola oleh PT Pertamina pada Juni 2025. Kegiatan ini menjadi tonggak penting setelah lebih dari 13 tahun wilayah kerja tersebut tidak menunjukkan progres signifikan. Selain itu, WK Migas Air Komering milik Huatong Services Indonesia telah memulai tahapan eksplorasi pada Mei 2025, menandai meningkatnya kembali aktivitas hulu migas di wilayah Lampung. Wilayah administrasi pekerjaan berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung

Tengah, Lampung Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur. Pelaksanaan pekerjaan diperkirakan akan slesai di bulan Agustus tahun 2026.

Pada WK Migas Sumbagsel Area I yang dikelola oleh PHE OSES, telah diimplementasikan Participating Interest (PI) 10 persen sebagai bentuk peningkatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam serta optimalisasi penerimaan daerah di masa mendatang.

Dalam pengembangan energi panas bumi, sejumlah kemajuan signifikan juga telah dicapai. Pada WK Panas Bumi Way Panas, PT Pertamina Geothermal Energy melaksanakan ground breaking eksplorasi sebesar 2 x 27,5 MW pada Juni 2025 serta ground breaking Pilot Plant Green Hydrogen pada September 2025. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan hidrogen hijau berbasis panas bumi yang pertama di Indonesia, sekaligus mendukung transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon.

Selanjutnya, pada WK Panas Bumi Sekincau Selatan yang dikelola oleh PT Star Energy Suoh Sekincau, telah dilakukan boundary modification TRHS serta penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai persiapan pengeboran eksplorasi. Pada WK Panas Bumi Way Ratai yang dikelola oleh PT Cahaya Anagata Energy, telah dilaksanakan proses 3G Surveys dan Pre-Transaction Agreement (PTA) serta persiapan eksplorasi, termasuk perpanjangan masa berlaku Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero).

Untuk WK Panas Bumi Danau Ranau, pada November 2025 telah dilakukan persiapan pelelangan kembali wilayah kerja sebagai langkah percepatan pengembangan potensi panas bumi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan potensi panas bumi Way Umpu melalui usulan penambahan data dan/atau penetapan sebagai Wilayah Penugasan Pendahuluan dan Eksplorasi (WPPE), serta percepatan penetapan Potensi Panas Bumi Sri Rejo menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Upaya pengembangan energi terbarukan di Provinsi Lampung terus dilakukan dan diarahkan ke tahap implementasi. Pada bulan April tahun 2025 telah dilaksanakan rapat pembahasan Rencana Percepatan Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya yang merupakan langkah mitigasi terhadap krisis kapasitas TPA di wilayah

aglomerasi yang direncanakan akan melayani Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.



Sumber : Bappeda 2026

Gambar 5.7 : Calon Lokasi PSEL Lampung Raya

Calon Lokasi PSEL Lampung Raya ditetapkan di Kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini progres pekerjaan sampai pada tahap persiapan proses lelang oleh Danantara dan penjadwalan penandatangan MOU antara Danantara dan Pemerintah Daerah.

Potensi energi terbarukan juga dimiliki Bendungan Batutegi yang sampai saat ini akan dikembangkan melalui Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 2 × 14 MW dan Bendungan Sekampung sebesar 2 × 27 MW. Sementara itu, Bendungan Margatiga juga memiliki potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Secara keseluruhan, capaian sektor ESDM sampai dengan Tahun 2026 menunjukkan progres signifikan dalam mengakselerasi investasi, meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat bauran energi bersih. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi dan peningkatan kapasitas pembangkitan listrik berbasis EBT, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

5. Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Untuk menerima masukan dari berbagai kalangan Provinsi Lampung membuka saluran resmi untuk menyerap aspirasi Masyarakat, Pengaduan masyarakat yang paling banyak adalah tentang kondisi jalan rusak yang membutuhkan perbaikan dan tentang keberatan atas pungutan uang komite sekolah. Beban masyarakat yang ditimbulkan oleh uang komite ini diperkuat oleh masih rendahnya angka partisipasi lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke SMA hanya 62% dan dari yang lulus SMA hanya 22% yang melanjutkan ke perguruan tinggi.



Sumber : Bappeda 2026

Gambar 5.8 : Kegiatan pembinaan Gubernur Lampung kepada satuan pendidikan se-Provinsi Lampung

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung 2025 mengalami kenaikan 0,85 poin (1,16%) dibandingkan tahun 2024, dengan nilai IPM 73,98. Kebijakan prioritas di bidang Pendidikan yaitu perluasan akses pendidikan ke-jenjang menengah atas melalui kebijakan penghapusan biaya daftar ulang, SPP, dan uang komite. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh peserta didik, baik siswa baru maupun siswa lama yang naik tingkat, di semua jalur penerimaan. Terobosan penting adalah menyediakan pendidikan murah dan berkualitas bagi putra-putri Lampung, salah satunya melalui kebijakan menghapus uang komite sekolah dan komitmen meningkatkan kualitas pembelajaran di

sekolah, termasuk kualitas guru, kepala sekolah, dan seluruh instrumen pendidikan sehingga bisa menciptakan proses belajar yang unggul.

Penghapusan uang komite, SPP, dan daftar ulang di SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini didasarkan pada revisi Pergub Nomor 61 Tahun 2020 bahwa operasional sekolah akan ditanggung APBD dan BOS, tidak lagi dibebankan kepada orang tua siswa. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ringannya biaya pendidikan 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri di seluruh Lampung.

Data BPS di Lampung mencatat biaya pendidikan di Lampung turun 15 persen atau mengalami deflasi sangat dalam -15,10 persen. Indeks harga pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Secara umum, inflasi tahun ke tahun (*y-on-y*) Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya tingkat inflasi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di Provinsi Lampung relatif terjaga, termasuk pada kelompok pendidikan yang turut menjadi salah satu penekan inflasi daerah. Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban biaya pendidikan masyarakat melalui penghapusan uang komite, SPP, dan biaya daftar ulang pada SMA/SMK/SLB Negeri. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya beban pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah, terutama melalui penurunan biaya pendidikan pada jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD. Dengan terjaganya inflasi pada level rendah, daya beli masyarakat tetap terpelihara dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah.Ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam. Uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung. Penurunan harga besar kemungkinan

dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah.

Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat. Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan. Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam inflasi.

Dalam rangka mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan Program Pelatihan Vokasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan keterampilan tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat, khususnya pada bidang keterampilan teknis yang memiliki kebutuhan tinggi di dunia usaha dan dunia industri, sekaligus mendukung pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah menetapkan target pelatihan sebanyak 928 peserta di 58 desa yang terbagi ke dalam 33 paket pelatihan pada kejuruan listrik dan las yang bersertifikat BNSP. Pelaksanaan program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja. Selain memperkuat kapasitas individu, pelatihan vokasi juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi kegiatan masih sebesar 0 persen baik dari sisi fisik maupun jumlah peserta pelatihan. Kondisi tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahapan persiapan administrasi dan teknis. Beberapa proses yang sedang dilaksanakan meliputi penyusunan jadwal dan mekanisme pelatihan, koordinasi dengan

lembaga pelatihan dan instruktur, penyusunan dokumen pendukung kegiatan, penetapan lokasi pelatihan, serta proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada awal tahun anggaran masih diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan jadwal pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, hingga Triwulan I Tahun 2026 kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan pelatihan kepada peserta. Meskipun demikian, secara umum progres kegiatan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan dan pelaksanaan pelatihan direncanakan mulai dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026 setelah seluruh proses persiapan selesai dilakukan.

Dengan dukungan koordinasi antarperangkat daerah, lembaga pelatihan, dan seluruh pihak terkait, Program Pelatihan Vokasi diharapkan mampu mencapai target secara optimal sampai akhir tahun anggaran. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan berbasis keterampilan, sehingga mendukung terwujudnya pemerataan akses dan mutu pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

6. Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Lampung

Salah satu fokus utama pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 adalah peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pada tahun 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung mencapai 79,79 persen, yang menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi guna menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.



Sumber : Bappeda 2026

Gambar 5.9 : Pelaksanaan pembangunan ruas jalan provinsi lampung yang diawali oleh wakil Gubernur Lampung

Secara spasial, kondisi kemantapan jalan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan variasi capaian. Beberapa daerah telah mencapai tingkat kemantapan yang sangat baik, seperti Kota Bandar Lampung dengan kemantapan jalan mencapai 100 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 95,85 persen, Kabupaten Pesisir Barat 95,22 persen, Kota Metro 92,64 persen, Kabupaten Pesawaran 92,09 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan 91,92 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara mencatat kemantapan jalan sebesar 93,58 persen, Kabupaten Lampung Tengah 89,15 persen, Kabupaten Pringsewu 82,14 persen, Kabupaten Mesuji 79,79 persen, dan Kabupaten Lampung Barat 79,30 persen. Sementara itu, beberapa daerah masih memerlukan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan, seperti Kabupaten Tanggamus dengan kemantapan jalan 72,96 persen, Kabupaten Tulang Bawang Barat 68,04 persen, Kabupaten Way Kanan 58,74 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang 49,03 persen.

Pada Tahun Anggaran berjalan, dialokasikan penanganan jalan desa pada 4 (empat) desa prioritas dengan rincian yaitu Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 110,91 meter; Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sepanjang 110,91 meter; Desa Nibung, Kecamatan Gunung

Pelindung, Kabupaten Lampung Timur sepanjang 110,91 meter; serta Desa Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 221,82 meter. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah desa sekaligus mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah perdesaan. Selain itu Pemerintah Provinsi lampung juga telah memberikan bantuan kepada 6 desa untuk pembangunan 19 ruas jalan lingkungan di seluruh kabupaten/kota yang bersinergi dengan program Desaku Maju sebesar 4,2 Milyar.

Peningkatan kualitas jalan desa diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih merata. Dukungan infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat integrasi kawasan dan mempercepat pembangunan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan aksesibilitas. Sampai dengan saat ini, progres pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap persiapan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara tertib administrasi, efektif, transparan, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Setelah seluruh proses persiapan selesai dilaksanakan, kegiatan penanganan jalan desa diharapkan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan fisik sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan Jalan Desa dalam Program Desaku Maju, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dalam memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis wilayah desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan daerah. Dukungan terhadap peningkatan kemantapan jalan desa diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta

mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan

BAB VI
PENUTUP



BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2026. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045".**

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL